



BIFURKASI & MULTIFURKASI DALAM TEORISASI ILMU HUBUNGAN  
INTERNASIONAL

*(Penerapan Konsepsi Teorisasi Hubungan Internasional Reinhard  
Meyers Terhadap Perluasan Agenda Keamanan)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk  
menyelesaikan Program Studi Strata 1 (S1) Ilmu Hubungan Internasional dan  
mencapai gelar Sarjana Sosial

Disusun Oleh :

**Lailatul Fitriyah**

**NIM: 040910101194**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2009**

**PERSEMBAHAN**

*For Abah H. Mustofa, the symbol of modesty and serenity in my life,  
“Thanks for standing with me”*

*For Ummi Chusnul Chotimah,  
“For teaching me to see my life differently”*

*For my sisters, Faiqoh Mustofa & Nabihatul Faizah Mustofa,  
“Thanks for sharing everything and being my angels”*



**MOTTO**

*“I have sought to interrogate... IR theory not because I hope to contribute to a better explanatory theory, ..., but in order to problematise theoretical and practical horizons that continue to be taken for granted”*

(R.B.J Walker, *Inside / Outside : IR as Political Theory*)

*“I am a latent revolutionary”*

(Hans J. Morgenthau, *Personal Diary*)

*“like debaters eager to score points. the points were scored easily enough; but that should never have been our aim in the first place”*

(Terence Ball, *Idioms of Inquiry*)

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lailatul Fitriyah

NIM : 040910101194

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : *Bifurkasi dan Multi-Furkasi Dalam Teorisi Ilmu Hubungan Internasional*, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 November 2009

Yang menyatakan,

Lailatul Fitriyah  
NIM 040910101194

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul “*Bifurkasi dan Multi-Furkasi Dalam Teorisasi Ilmu Hubungan Internasional*” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Jember, pada :

Hari : Senin

Tanggal : 16 November 2009

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Jember

Mengesahkan / mengetahui,

Ketua Penguji

Penguji II

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA, Ph.D  
NIP. 131 975 313

Drs. Abubakar Eby Hara, MA, Ph.D  
NIP. 131 833 004

Penguji III

Fuad Al-Bayumi, S.IP  
NIP. 132 310 231

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Harry Yuswandi, MA  
NIP. 130 674 836



## KATA PENGANTAR

Kecintaan saya terhadap disiplin ilmu Hubungan Internasional, bisa jadi merupakan ‘aktor’ utama di balik penulisan karya ini. Namun, tanpa kehadiran beberapa hal lainnya, dapat saya pastikan karya ini masih berada di awang-awang. Allah SWT, merupakan titik tujuan ekspresi syukur yang pertama dan utama, *Thanks for being so great to always guide me and turn my back on, every time I try to run.*

Selanjutnya, kepada tiga Dosen Pembimbing saya, Bapak Agus Trihartono, MA, Bapak Abubakar Eby Hara, Ph.D dan Bapak Heri Alfian, M.Si. *I thought that nothing was more important than studying world politics, so that I will always be grateful to them for expanding my horizons about what is really ‘important’.* Dan tentu saja, ucapan terima kasih yang luar biasa saya tujukan kepada Bapak Himawan Bayu Patriadi, Ph.D, dan Bapak Fuad Al-Bayumi, S.IP, *two of my thesis examiners who never ceasing to challenge and provoke me, thanks for the constructive revision too.* Kepada Bapak Nur Hasan, M.Hum, *thanks for the comments you gave and time you’ve spent.* Kepada Bapak Sunardi Purwoatmoko, MIS, *thanks for introducing me to realism.*

Hal berikutnya yang telah menjadi alasan terwujudnya karya ini adalah teman-teman saya. Untuk para *USEFers* (Mbok Elly, Lifa, Pak dhe, Mbah Kung, Albard, Linda, Yeni, Buddy, Titi, Pito, Nila, Trio ‘*Bitchy*’, Ales, Duit, Alpip, dll – maaf, tempat terbatas untuk menyebutkan semuanya) serta para *Debaters* di penjuru dunia, *thanks for reminding me from time to time that life does exist beyond academia.* Untuk ‘masyarakat’ HI 2004, terutama *Cosmopolitan Gank* (Lula, dan Sebastian) *thanks for belief in me and my thesis, inimitable good humour and company, and outstanding qualities as confidante too;* untuk *Worm Gank* (Creamy, dan Tanah) *thanks for balancing the composition of my brain with the joy of laugh;* untuk *FinRep-ers* (Dita, Erin, Sifa, Wahyu, Ratna, Dedy, Rocky, dll) *who offer an*

*enviable intellectual context and a lively social scene in equal measure, a heartfelt thank.*

Tak lupa pula, terima kasih untuk Mas Banker, supplier khusus data-data sektor keamanan ekonomi dari Monash University. Frederik Voute (Kings College, London), atas diskusinya tentang *English school* dan *mature anarchy*. Untuk Mas Yusli (UMM), atas satu karya penting Barry Buzan, terima kasih. Dan tentu saja kepada Holi, untuk akses pribadinya ke perpustakaan Denver University dan University of Southern California, *and for those priceless e-mails, conversations, criticisms, angers, and laughs, thanks for sharing and caring.*

Terakhir dan yang terpenting, Seperti yang telah saya tulis sebelumnya, karya ini saya persembahkan kepada Abah, Ummi, Mbak Faiq, Febby, Mas Fauzi, Thoriq, Nawal, dan si kecil 'anonim'. Terima kasih, telah membentuk 'saya' menjadi saya.

Jember, 30 November 2009

Penulis



**DAFTAR ISI**

**HALAMAN SAMPUL**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>

**BAB 1 PENDAHULUAN**

<b>1.1. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Ruang Lingkup Pembahasan .....</b>	<b>14</b>
<b>1.3. Rumusan Masalah .....</b>	<b>15</b>
<b>1.4. Landasan Teori .....</b>	<b>15</b>
1.4.1. Mekanisme Bi/Multi-Furkasi Teorisasi Hubungan Internasional .....	15
1.4.2. Konsepsi Alternatif Teori Hubungan Internasional: Perspektif Meyers .....	17
1.4.3. Perluasan Agenda Keamanan .....	18
<b>1.5. Argumentasi Utama .....</b>	<b>22</b>
<b>1.6. Outline Penulisan .....</b>	<b>23</b>

**BAB 2 PERLUASAN AGENDA KEAMANAN SEBAGAI**

**PERCABANGAN KONSEPSI KEAMANAN REALISME**

<b>2.1. Basis Ontologis Realisme .....</b>	<b>33</b>
2.1.1. <i>State</i> -Sentrisme .....	33
2.1.2. Sistem Internasional yang Anarkis .....	36
2.1.3. Negara sebagai Aktor Pencari <i>Power</i> dan Keamanan .....	39
<b>2.2. Karakteristik Hubungan Internasional Masa Perang Dingin .....</b>	<b>42</b>
2.2.1. Bipolaritas .....	42
2.2.2. Ancaman Nuklir .....	45
2.2.3. Pembauran Studi Keamanan Dengan Studi Strategis .....	46
<b>2.3. Karakteristik Hubungan Internasional Pasca-Perang Dingin .....</b>	<b>49</b>
2.3.1. Ancaman Non-Tradisional .....	50
2.3.2. Peningkatan Densitas Relasional dan Interdependensi Antar-Negara .....	53
2.3.3. Kepedulian Terhadap Dimensi Norma, Nilai, dan Identitas .....	55

**BAB 3 DIMENSI EKSPANATORI DALAM PERLUASAN AGENDA**

**KEAMANAN: BASIS KEAMANAN SEKTORAL DAN  
KOMPLEK KEAMANAN REGIONAL**

<b>3.1. Pendekatan Sektoral Terhadap Isyu Keamanan     Non-Tradisional sebagai <i>Problem-Solving</i> .....</b>	<b>65</b>
3.1.1. Sektor Keamanan Militer .....	68
3.1.2. Sektor Keamanan Politik .....	72
3.1.3. Sektor Keamanan Ekonomi .....	75
3.1.4. Sektor Keamanan Sosietal .....	82
3.1.5. Sektor Keamanan Lingkungan .....	86

**3.2. Pembentukan Keamanan Regional Sebagai Dimensi Legitimasi ..... 96**

**BAB 4 DIMENSI EMANSIPATORI DALAM PERLUASAN AGENDA**

**KEAMANAN: SEKURITISASI DAN *MATURE ANARCHY***

**4.1. Sekuritisasi Sebagai Elemen Kritik ..... 110**

**4.2. *Mature Anarchy* Sebagai Elemen Utopia ..... 119**

**BAB 5 KESIMPULAN ..... 124**

**DAFTAR PUSTAKA ..... 127**

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1a The Pillars of Realism .....	25
Gambar 1b Cold-War Properties .....	25
Gambar 1c Post-Cold War Properties .....	25
Gambar 2a Power-Based Security .....	26
Gambar 2b Sectors-Based Security .....	26
Gambar 2c Bifurkasi/Multi-Furkasi Teori Reinhard Meyers .....	27
Gambar 2d Penerapan Bifurkasi/Multi-Furkasi pada Perluasan Agenda Keamanan .....	28
Gambar 3a Konsepsi 'Teori' Reinhard Meyers .....	59
Gambar 3b Perluasan Agenda Keamanan Sebagai 'Teori Alternatif' Ala Reinhard Meyers .....	60
Gambar 3c Pola Pembagian Kawasan Keamanan Pada Masa Perang Dingin .....	94
Gambar 3d Pola Pembagian Kawasan Keamanan Pada Masa Pasca-Perang Dingin .....	95
Gambar 4a Garis Kontinum Sekuritisasi .....	111

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teorisasi Ilmu Hubungan Internasional, merupakan salah satu topik menarik yang selalu berhasil memancing perdebatan di kalangan penstudi-nya, selain topik-topik lainnya yang bernada praktikal, seperti analisis kebijakan luar negeri (*foreign policy analysis*) atau ekonomi politik internasional (*international political economy*). Hal ini disebabkan oleh pesatnya perkembangan politik internasional dan perubahan konteks sosio-kultural di tingkatan global yang menuntut revisi dan koreksi berkelanjutan di dalam ‘tubuh’ Ilmu Hubungan Internasional, sebagai salah satu ilmu yang tidak hanya memiliki fungsi eksplanatif melainkan juga fungsi penyedia solusi (*problem-solving function*)<sup>1</sup>.

Sebagai ilmu yang terbilang ‘berusia muda’, Hubungan Internasional telah memiliki banyak ragam perspektif dan percabangan teori yang begitu luas<sup>2</sup>. Sebut saja, perspektif realis, idealis, dan marxis, tiga cara pandang berbeda terhadap

---

<sup>1</sup> “...on a specific interpretation of the social function of IR as a science of crisis interpretation, crisis management, and crisis resolution.”, Reinhard Meyers, *Contemporary Developments in International Relations Theory*, hal. 5 Diakses dari: <http://www.uni-muenster.de/Politikwissenschaft/Doppeldiplom/docs/IRtheoryRM.pdf>, pada tanggal, 24 November 2008

<sup>2</sup> Kelahiran Hubungan Internasional sebagai sebuah disiplin ilmu selalu dikaitkan dengan pembukaan Departemen Ilmu Hubungan Internasional pertama di Universitas Wales, Aberystwyth, pada tahun 1919.

Tentang banyaknya ragam perspektif dan teori dalam Hubungan Internasional, Buzan pernah menuliskan:

“...reflection on the fragmentation of the discipline (International Relations): its lack of almost any generally shared epistemological, methodological, or ontological premises. We would seem to be not only a ‘divided discipline’, but increasingly one with no discernible centre at all.”, Barry Buzan, dalam *The Future of International Relations: Masters in the Making?*, Iver B. Neumann dan Ole Wæver, eds., Routledge, London, 2001, hal. xvii

hubungan internasional, yang telah menghasilkan teori deterrens (*deterrence theory*), ragam teori integrasi (*integration theories*), dan teori ketergantungan (*dependencia*).

Keberagaman perspektif dalam Ilmu Hubungan Internasional juga terlihat dari perbedaan peta perdebatan besar (*great debates*) yang diyakini telah mewarnai pertumbuhan Hubungan Internasional sebagai sebuah disiplin ilmu. Para penstudi Hubungan Internasional cenderung memiliki kesepakatan tentang profil debat besar pertama (*first debate*) – yang berlangsung di antara idealisme (*idealism*) dengan realisme (*realism*) pada dekade 1940an – dan debat besar kedua (*second debate*) – yang berlangsung di antara tradisionalisme (*traditionalism*) dan behavioralisme/saintisme (*behavioralism/scientism*) pada dekade 1960an<sup>3</sup>.

Namun, pada titik debat besar ketiga (*third debate*) para penstudi Hubungan Internasional mengajukan berbagai pandangan yang berbeda<sup>4</sup>. Bahkan, di luar model peta perdebatan yang didasarkan pada periodisasi tertentu itu, masih terdapat konsep perdebatan lainnya yang dikenal sebagai perdebatan antar-paradigma (*inter-paradigm debate*)<sup>5</sup>. Perdebatan antar-paradigma berlangsung di antara realisme, pluralisme, dan globalisme, dan dapat dikatakan masih berlangsung sampai saat ini<sup>6</sup>.

Pada akhir dekade 1980an, Perang Dingin berakhir. Momentum keruntuhan Uni Soviet membuat roda teorisasi Ilmu Hubungan Internasional berputar lebih kencang. Topik-topik perdebatan baru bermunculan bagai cendawan di musim hujan. Wilayah cakupan perdebatan yang terjadi juga bervariasi, mulai dari topik sistemik, seperti perdebatan tentang sistem internasional unipolaristik dan peran Amerika Serikat di dalamnya, topik regional seperti nasib negara-negara Eks-Soviet, maupun topik yang menyangkut negara tertentu saja (*unit-level*) seperti keberlangsungan

---

<sup>3</sup> Iver B. Neumann dan Ole Waever, eds., *op. cit.*, hal. 8

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> “Istilah ‘inter-paradigm debate’ diperkenalkan oleh Michael Banks dalam ‘The Inter-Paradigm Debate’ dalam A.J.R Groom dan Margot Light, *International Relations: A Handbook of Current Theory*, London: Pinter, 1985.”, Shaummil Hadi, *Third Debate dan Kritik Positivisme Ilmu Hubungan Internasional*, Jalasutra, Yogyakarta, 2008, hal. 266.

<sup>6</sup> Shaummil Hadi, *op. cit.*, hal. 8

payung keamanan Amerika Serikat terhadap Jepang, atau topik tentang bentuk ‘Rusia masa depan’.

Mudah untuk ditebak, guncangan keruntuhan Tembok Berlin juga dapat dirasakan pada ranah kajian paradigmatik dalam Ilmu Hubungan Internasional<sup>7</sup>. Dampak destruktif terbesar didapatkan oleh realisme, yang telah membangun dominasinya di atas fondasi superioritas kekuatan militer<sup>8</sup>. Di sisi lain, keroposnya realisme sebagai paradigma dominan membawa angin segar bagi paradigma-paradigma lainnya, terutama liberalisme dengan menurunnya relevansi geopolitik dan meningkatnya signifikansi interdependensi ekonomi<sup>9</sup>.

Kuatnya arus perubahan yang dibawa oleh periode Pasca-Perang Dingin, membuat sebagian penstudi Hubungan Internasional berkesimpulan bahwa sebuah era pergeseran paradigma (*paradigm shift*) sedang berlangsung di dalam disiplin Ilmu Hubungan Internasional<sup>10</sup>. Lebih lanjut, mereka yakin bahwa tata internasional (*international order*) ala Westphalia akan segera berakhir dan digantikan oleh tata internasional – atau global (*global order*) – lainnya yang lebih mengedepankan semangat emansipatoris dan menaruh individu (berlawanan dengan tata internasional ala Westphalia yang menunjuk negara sebagai porosnya) pada titik substansinya<sup>11</sup>.

---

<sup>7</sup> “Especially after 1989, the relevance of the nation-state, the ‘terminal entity’ (...) of international relations, and the primary point of reference of the discipline of International Relations, was increasingly being questioned.”, Jacobus Schoeman, *International Relations and Change: A Kuhnian Interpretation*, Thesis for the degree of Doctor of Philosophy, Rhodes University, 2005, hal. 2-3, diakses dari, <http://www.eprints.ru.ac.za/248/01/Schoeman-PhD.pdf>, pada tanggal, 28 April 2008

<sup>8</sup> “...the currencies of world politics are changing: military power is held to have lost its efficacy in an era of globalized geo-economic competition,...”, Kenichi Ohmae, *The End of the Nation State*, dalam T.V Paul dan John A. Hall (eds.), *International Order and the Future of World Politics*, Cambridge University Press, 1999, hal. 1

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> “...the rise of globalization and the end of the Cold War presented the Westphalian or State-Centric Paradigm of International Relations with a Kuhnian paradigm ‘crisis’. As a result, both the theory and the practice of International Relations are in the midst of (what Kuhn calls) a ‘Paradigm Shift’.”, Jacobus Schoeman, *International Relations...*, hal. ii, diakses dari, <http://www.eprints.ru.ac.za/248/01/Schoeman-PhD.pdf>, pada tanggal 28 April 2008

<sup>11</sup> “...to achieve this ontological breakthrough, a fundamental change in our vision of the discipline of International Relations, but also of the world of everyday international relations, is required. This

Pada titik ini muncul pertanyaan besar, seperti apakah gambaran tata global yang emansipatoris dan menempatkan individu sebagai substansi utamanya tersebut? Pertanyaan ini tentunya merupakan kajian yang menarik, terbukti dengan banyaknya alternatif tata global Post-Westphalia (*Post-Westphalian global order*) yang ditawarkan oleh beberapa penstudi, misalnya, demokrasi kosmopolitan (*cosmopolitan democracy*) yang diajukan oleh David Held<sup>12</sup>.

Namun, karya ini tidak ditulis untuk mengajukan gambaran alternatif lainnya. Sebaliknya, karya ini akan berupaya menjawab pertanyaan lain yang harus dipertanyakan sebelum kita terjebak dalam pusaran prediksi gambaran tata global-alternatif Post-Westphalia. Yaitu, apakah perkembangan Ilmu Hubungan Internasional memang berjalan sesuai dengan mekanisme siklus ilmu pengetahuan Kuhnian? Dan jawabannya adalah, tidak.

Pergeseran paradigma (*paradigm shift*), merupakan salah satu fase perkembangan ilmu yang digagas oleh Thomas Kuhn<sup>13</sup>. Perspektif Kuhnian meyakini bahwa ilmu tidak berkembang dalam pola yang linier, pun tidak dalam sifat

---

*entails recasting the study of International Relations as an emancipatory project and by recognizing the centrality of human beings in the practice of international relations.*”, Jacobus Schoeman, *International Relations...*, hal. ii-iii, diakses dari, <http://www.eprints.ru.ac.za/248/01/Schoeman-PhD.pdf>, pada tanggal 28 April 2008

<sup>12</sup> “...*Cosmopolitan Democracy – the multilayered and cooperative institutions of local, national, regional and global democratic governance – as the best means for coping with global political and economic problems (...)*”, David Held, *Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance*, dikutip dalam Takeshi Nakano, *A Critique of Held’s Cosmopolitan Democracy*, *Contemporary Political Theory*, vol. 5, 2006, hal. 33-34, diakses dari, <http://www.palgrave-journals.com/cpt/journal/v5/n1/9300167a.html>, pada tanggal 1 Maret 2008

Penstudi lainnya, seperti Rosenau, mengajukan konsep multilateralisme kompleks (*complex multilateralism*) yang diyakini sebagai tahapan awal dari munculnya pemerintahan global (*global governance*). Lihat: J.N. Rosenau, *Toward An Ontology for Global Governance*, dalam M. Hewson dan T.J. Sinclair (eds.), *Approaches to Global Governance Theory*, State University of New York Press, 1999.

<sup>13</sup> “...*there is a successive transition from one paradigm to another via what has become known as ‘Paradigm Shifts’.*”, Thomas Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, dikutip dalam Jacobus Schoeman, *International Relations...*, hal. 53-54, diakses dari, <http://www.eprints.ru.ac.za/248/01/Schoeman-PhD.pdf>, pada tanggal 28 April 2008



akumulatif<sup>14</sup>. Asumsi Kuhnian mengatakan bahwa ilmu pengetahuan berkembang dengan mengikuti beberapa tahapan, yakni, tahap pra-paradigma (*pre-paradigmatic science*)<sup>15</sup>, *normal science*<sup>16</sup>, anomali (*awareness of anomaly*)<sup>17</sup>, krisis (*crisis*)<sup>18</sup>, respon terhadap krisis<sup>19</sup>, dan revolusi ilmiah (*scientific revolution*) atau pergeseran paradigma (*paradigm shift*)<sup>20</sup>.

Dengan demikian, historiografi ilmu pengetahuan selalu diwarnai oleh kontestasi antar-paradigma, di mana satu dari paradigma-paradigma tersebut akan menjadi pemenang, dan mengubur habis paradigma lain yang mengalami kekalahan<sup>21</sup>. Paradigma ‘pemenang’ ini akan menjadi poros dinamika kegiatan

---

<sup>14</sup> “...from a Kuhnian perspective, the history of science is not gradual and cumulative, but rather punctuated by a series of more or less radical ‘Paradigm Shifts’.”, J. Conant dan J. Haugeland (eds.), *The Road Since Structure: Thomas S. Kuhn*, dikutip dalam Jacobus Schoeman, *International Relations...*, hal. 54, diakses dari, <http://www.eprints.ru.ac.za/248/01/Schoeman-PhD.pdf>, pada tanggal 28 April 2008

<sup>15</sup> “The point of departure here is the so-called ‘Pre-Paradigmatic’ period when no paradigm has yet asserted its authority in a specific discipline.”, Jacobus Schoeman, *International Relations...*, hal. 80, diakses dari, <http://www.eprints.ru.ac.za/248/01/Schoeman-PhD.pdf>, pada tanggal 28 April 2008

<sup>16</sup> “A phase of ‘Normal Science’ in a specified subject field is characterized by, and closely associated with, the dominant paradigm or frame-of-reference which is accepted by the scientific community.”, Jacobus Schoeman, *International Relations...*, hal. 82, diakses dari, <http://www.eprints.ru.ac.za/248/01/Schoeman-PhD.pdf>, pada tanggal 28 April 2008

<sup>17</sup> “...the Awareness of Anomaly, that is, the recognition that nature has somehow violated the paradigm-induced expectations that govern ‘Normal Science’.”, Jacobus Schoeman, *International Relations...*, hal. 86, diakses dari, <http://www.eprints.ru.ac.za/248/01/Schoeman-PhD.pdf>, pada tanggal 28 April 2008

<sup>18</sup> “...when the Awareness of Anomaly lasts long – (or penetrates deep) enough one can describe the field affected as being in a state of ‘increasing crisis’.”, Thomas Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, dikutip dalam Jacobus Schoeman, *International Relations...*, hal. 87, diakses dari, <http://www.eprints.ru.ac.za/248/01/Schoeman-PhD.pdf>, pada tanggal 28 April 2008

<sup>19</sup> “Kuhn describes the ensuing situation as the ‘Response to Crisis’.”, Thomas Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, dikutip dalam Jacobus Schoeman, *International Relations...*, hal. 87, diakses dari, <http://www.eprints.ru.ac.za/248/01/Schoeman-PhD.pdf>, pada tanggal 28 April 2008

<sup>20</sup> “Kuhn describes the transition to a new paradigm as a ‘Scientific Revolution’.”, Thomas Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, dikutip dalam Jacobus Schoeman, *International Relations...*, hal. 88, diakses dari, <http://www.eprints.ru.ac.za/248/01/Schoeman-PhD.pdf>, pada tanggal 28 April 2008

<sup>21</sup> “The decision to reject one paradigm is always simultaneously the decision to accept another, and the judgement leading to that decision involves the comparison of both paradigms with nature and with each other.”, Thomas Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, dikutip dalam Jacobus

ilmiah, sampai pada satu titik, peristiwa-peristiwa duniawi tak lagi berpihak (dalam artian, memperkokoh, menyokong, menjadi bukti) pada paradigma pemenang, dan muncullah paradigma-paradigma alternatif yang siap menantanginya<sup>22</sup>. Sekali lagi, kontestasi antar-paradigma dimulai, lalu berputarlah siklus ilmu pengetahuan yang sama<sup>23</sup>.

Dalam konteks Ilmu Hubungan Internasional, para penstudi yang meyakini prinsip siklus ilmu pengetahuan Kuhnian memandang berakhirnya Perang Dingin sebagai masa krisis (*crisis*)<sup>24</sup>. Realita internasional Pasca-Perang Dingin tak lagi berpihak pada paradigma ala Westphalia (*Westphalian paradigm*)<sup>25</sup>. Mengemukanya isu-isu non-tradisional (*non-traditional issues*), melemahnya pertahanan batas teritorial negara, berkembangnya *gadget* yang memperpendek jarak Jakarta-Washington, serta terbentuknya relasi transnasional, seluruh perkembangan itu mengarah pada pengerosan basis paradigma ala Westphalia. Sehingga, paradigma

---

Schoeman, *International Relations...*, hal. 88, diakses dari, <http://www.eprints.ru.ac.za/248/01/Schoeman-PhD.pdf>, pada tanggal 28 April 2008

<sup>22</sup> “*The crisis therefore evokes an alternate candidate for paradigm.*”, Thomas Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, dikutip dalam Jacobus Schoeman, *International Relations...*, hal. 87, diakses dari, <http://www.eprints.ru.ac.za/248/01/Schoeman-PhD.pdf>, pada tanggal 28 April 2008

<sup>23</sup> “*Kuhn’s analysis implies that a proper understanding of the historical development of any science involves identifying the rise of a paradigm and how it is displaced.*”, Ibrahim Can Sezgin, *Realism Reader*, European Studies, Universitat Siegen, 2005, hal. 4, diakses dari, <http://www.juergen-bellers.de/dokumente/realism.pdf>, pada tanggal 24 November 2008

<sup>24</sup> “*The fundamental ideas of the Westphalian paradigm are therefore challenged as political space is no longer seen to be coterminous with national territory and national governments are no longer the sole masters of their own or their citizens fate.*”, Anthony McGrew, *Power Shift: From National Government to Global Governance*, dikutip dalam Jacobus Schoeman, *International Relations...*, hal. 27, diakses dari, <http://www.eprints.ru.ac.za/248/01/Schoeman-PhD.pdf>, pada tanggal 28 April 2008

<sup>25</sup> Paradigma Westphalia merujuk kepada perspektif *state-centrist* dan berbagai konsepsi yang menyertainya, seperti konsepsi kedaulatan, warga negara, wilayah teritorial, dsb. Menggunakan paradigma Westphalia untuk menganalisa hubungan internasional, berarti memandang aktor negara sebagai aktor yang utama dalam hubungan internasional – terlepas dari keyakinan akan keberadaan/ketiadaan aktor non-negara.

“*...Westphalian Paradigm with its clear demarcations, notions of ‘inside’ and ‘outside’ and its perception of the nation-state as an all-encompassing ‘container’ of society.*”, P.J. Taylor, *Places, Spaces and Macy’s: Place-Space Tensions in the Political Geography of Modernities*, dikutip dalam Jacobus Schoeman, *International Relations...*, hal. 26, diakses dari, <http://www.eprints.ru.ac.za/248/01/Schoeman-PhD.pdf>, pada tanggal 28 April 2008

tersebut sudah tak mungkin lagi dipertahankan sebagai kerangka perkembangan Ilmu Hubungan Internasional. Disiplin ini harus mencari paradigma alternatif yang mampu mengakomodir 'realita Non-Westphalia' yang terus bermunculan.

Pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat menyatakan bahwa paradigma Westphalia benar-benar telah runtuh? Apakah keruntuhan paradigma Westphalia sama artinya dengan 'menghilangnya negara'? Jika ya, kapankah kita dapat menyatakan bahwa 'negara telah hilang'? Jika doktrin pergeseran paradigma terbukti, mengapa kita masih dapat menyaksikan eksistensi dan perkembangan paradigma *state-centrist* (semisal realisme dan *English school*) dan *non-state centrist* sekaligus? Bukankah seharusnya kontestasi antar-paradigma saat ini diwarnai oleh paradigma-paradigma *non-state centrist*?

Karya ini ditulis untuk dan dari perspektif yang meyakini varian historiografi teorisasi Ilmu Hubungan Internasional Kontra-Kuhnian. Namun, karya ini tidak dimaksudkan sebagai kritik terhadap siklus ilmu pengetahuan Kuhnian. Sebaliknya, karya ini hanya bermaksud mengajukan hasil analisa yang akan mengkonfirmasi pola historiografi teori Hubungan Internasional Kontra-Kuhnian (dengan demikian, mendiskonfirmasi siklus ilmu pengetahuan Kuhnian).

Penulis mengambil posisi ini dengan dua alasan, pertama, untuk menuliskan sebuah kritik maka penulis (se)harus(nya) menawarkan alternatif perkembangan ilmu pengetahuan lainnya (tidak hanya menyatakan 'tidak setuju' namun juga 'apa selanjutnya') dan dengan keterbatasan waktu riset yang tersedia, hal itu tidak mungkin dilakukan. Kedua, penulis meyakini prinsip pluralisme perspektif, yang berarti dua hal :

- Pertama, bahwa penulis menghormati adanya perbedaan perspektif (dalam hal ini, tentang pola perkembangan teorisasi Hubungan Internasional), dan 'kritik' merupakan sesuatu yang bermakna kontestasi (bahwa perspektif saya 'lebih

benar' dari perspektif dia). Dengan kata lain, hanya terdapat perbedaan dalam memandang proses perkembangan Ilmu Hubungan Internasional antara perspektif yang diyakini penulis dan perspektif Kuhnian.

- Kedua, pluralisme perspektif juga menjadi salah satu alasan personal, mengapa penulis cenderung memandang perkembangan Ilmu Hubungan Internasional dengan perspektif Meyers (dibandingkan dengan perspektif Kuhnian yang berakhir pada homogenitas perspektif). Mekanisme perkembangan Ilmu Hubungan Internasional ala Meyers lebih 'ramah' terhadap divergensi perspektif.

Adalah Reinhard Meyers, seorang Profesor Ilmu Politik di Universitas Munster, Jerman, yang mengajukan klaim alternatif terhadap siklus ilmu pengetahuan Kuhnian<sup>26</sup>. Meyers meyakini bahwa jalan teorisasi Hubungan Internasional tidak membenteng dalam arus kontestasi antar-paradigma, melainkan membentuk titik percabangan (bi-/multi-furkasi) yang akan muncul sebagai respon terhadap 'krisis' di tataran praksis (*extra-scientific crisis*)<sup>27</sup>. Dengan demikian, tidak ada satu paradigma pun dalam Ilmu Hubungan Internasional yang 'habis masa berlakunya'. Seluruh paradigma yang pernah diajukan akan tetap bertahan dalam koeksistensi antar-paradigma (*paradigms coexistence*)<sup>28</sup>. Dan seperti yang telah disebutkan sebelumnya,

---

<sup>26</sup> "In contrast to Kuhn's 'Structure of Scientific Revolution' I claim furthermore that – though new crises produce new theories – there is no Paradigm Shift in IR., ...", Reinhard Meyers, *Contemporary Developments...*, hal. 5, diakses dari, <http://www.uni-muenster.de/Politikwissenschaft/Doppeldiplom/docs/IRtheoryRM.pdf>, pada tanggal 24 November 2008

<sup>27</sup> "Rather, theory development follows a process of bi-/multi-furcation. i.e new theories branch off the body of established theories at particular points in time (extrascientific crises), ...", Reinhard Meyers, *Contemporary Developments...*, hal. 6, <http://www.uni-muenster.de/Politikwissenschaft/Doppeldiplom/docs/IRtheoryRM.pdf>, pada tanggal, 24 November 2008

<sup>28</sup> "It is my contention that the fissiparous state of present-day IR theory is not due - ... - to a large number of contending methodologies or canons of proof of scientific statements, but much more so to the competitive coexistence of a number of ontological referents – call them world views, Grand

kemunculan krisis ekstra-saintifik akan direspon dengan tumbuhnya percabangan teori baru, sementara teori besar (*grand theory*) yang menjadi tumpuan percabangan teori baru tersebut tetap dapat berdiri tegak dengan segala keterbatasan eksplanasinya<sup>29</sup>. Meyers merangkum gagasannya tersebut dalam sebuah kalimat yang tegas, “revolusi ilmiah (*scientific revolution*) tak pernah terjadi dalam perkembangan teorisasi Ilmu Hubungan Internasional, yang ada hanyalah koeksistensi antar-paradigma”<sup>30</sup>.

Bagaimana kita dapat membuktikan bahwa sebuah teori lahir sebagai percabangan dari paradigma tertentu? Dengan kata lain, bagaimana kita mampu membuktikan bahwa paradigma lama tetap dapat bertahan, tanpa tergerus oleh munculnya teori baru? Meyers mengungkapkan bahwa bukti terkuat tentang keberlanjutan eksistensi paradigma lama dapat kita temui dalam ‘komposisi’ teori baru itu sendiri. Setiap teori alternatif selalu dibangun di atas landasan ontologis yang sama dengan teori sebelumnya<sup>31</sup>. Bayangkan sebatang pohon Mangga, sejauh apapun cabang pohon Mangga tersebut terjulur dari pokok pohonnya, namun ketika cabang

---

*Theories, paradigms or the like ...*”, Reinhard Meyers, *Contemporary Developments...*, hal. 5, diakses dari, <http://www.uni-muenster.de/Politikwissenschaft/Doppeldiplom/docs/IRtheoryRM.pdf>, pada tanggal, 24 November 2008

<sup>29</sup> “...leaving the established theories in the overall corpus of crisis interpretations/crisis management or resolution means.”, Reinhard Meyers, *Contemporary Developments...*, hal. 6, diakses dari, <http://www.uni-muenster.de/Politikwissenschaft/Doppeldiplom/docs/IRtheoryRM.pdf>, pada tanggal, 24 November 2008

<sup>30</sup> “Against this (*Kuhn’s Scientific Revolutions*), it is my contention that IR is not characterized by theoretical revolutions, but rather by theoretical coexistence;...”, Reinhard Meyers, *Does Theory Matter?: What is and Why do We Study International Theory*, PowerPoint Presentation, Seminars on International Theory and International Politics, slide 23, diakses dari, <http://www.uni-muenster.de/.../Doppeldiplom/docs/DoesTheorymatter.pdf>, pada tanggal, 24 November 2008

<sup>31</sup> “...theories once formulated in order to explain and help resolve extrascientific crises in society or politics may be relegated to science’s theoretical toolbox once they are no longer helpful in a particular situation – but: they are not discarded, they are not replaced ..., but they remain part and parcel of the armoury science keeps ready for problem-solving...”, Reinhard Meyers, *Does Theory Matter...*, slide 23, diakses dari, <http://www.uni-muenster.de/.../Doppeldiplom/docs/DoesTheorymatter.pdf>, pada tanggal, 24 November 2008

itu berbuah, maka buah yang dihasilkannya akan selalu berupa buah Mangga, bukan Jambu, Semangka, atau bahkan Durian.

Ketertarikan Meyers kepada bidang teorisasi Ilmu Hubungan Internasional tidak hanya tercermin dalam konsep bi-/multi-furkasi teori. Lebih jauh, Meyers juga mengembangkan gagasan segar mengenai bentuk alternatif ‘teori’ Hubungan Internasional. Teori Hubungan Internasional menurut Meyers, seharusnya mencakup dua aspek utama yaitu, aspek eksplanasi (*explanation*) dan aspek pencerahan (*enlightenment*)<sup>32</sup>. Meyers menolak konsepsi teori klasik-normatif (*normative-classical theory*) – teori sebagai media justifikasi norma-norma yang telah ada, atau teori sebagai sarana penyesuaian realita konkrit dengan norma-norma tertentu - , pun tidak menerima konsepsi teori tradisional-saintistik (*traditional-scientistic theory*) – teori yang mengikuti tahapan-tahapan observasi-deskripsi-pembentukan hipotesis-pengujian hipotesis-pembentukan hukum-prognosis<sup>33</sup>.

Teori dalam Ilmu Hubungan Internasional (menurut Meyers) lahir dari proses dialektik antara pengelolaan masalah-masalah sosial dan resolusi konflik di satu sisi, dengan proses pengungkapan dan sikap mempertanyakan dominasi struktur sosial (*social power structure*) yang telah ada (pemenuhan misi emansipatoris)<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> “*Theory so defined produces orientation with regard to a (re-)constituted ‘reality’. It tries to explain social phenomena - .... It also tries to enlighten about social phenomena:...*”, Reinhard Meyers, *Contemporary Developments...*, hal. 19, diakses dari, <http://www.uni-muenster.de/Politikwissenschaft/Doppeldiplom/docs/IRtheoryRM.pdf>, pada tanggal, 24 November 2008

<sup>33</sup> “*My own position would neither refer to the Classical Normative concept of theory – as a means to formulate and justify existential norms or to devise precepts for social action which aims at approximating concrete reality to a given norm – nor to the Traditional Scientistic or empirical-inductive concept of theory – with its sequence of Observation – Description – Hypothesis Formulation – Hypothesis Testing – Formulation of Laws – Prognosis.*”, Reinhard Meyers, *Contemporary Developments...*, hal. 19, diakses dari, <http://www.uni-muenster.de/Politikwissenschaft/Doppeldiplom/docs/IRtheoryRM.pdf> , pada tanggal, 24 November 2008

<sup>34</sup> “*Rather, I refer to the dialectical tension existing between societal problem management and conflict resolution on the one hand, and an enlightening, emancipatory questioning of existing structures of social power and domination on the other.*”, Reinhard Meyers, *Contemporary Developments...*, hal. 19, diakses dari, <http://www.uni-muenster.de/Politikwissenschaft/Doppeldiplom/docs/IRtheoryRM.pdf>

Dengan demikian, teori Hubungan Internasional versi Meyers akan memberikan eksplanasi (*explanation*) tentang fenomena tertentu, sekaligus memberikan pencerahan (*enlighten*) kepada publik tentang realita sosial yang tampak ‘nyata’ di hadapan mereka.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, karya ini bertujuan untuk mengkonfirmasi klaim perkembangan teorisasi Ilmu Hubungan Internasional yang diajukan Reinhard Meyers. Untuk mencapai tujuan tersebut, karya ini akan mendeskripsikan proses teorisasi perluasan agenda keamanan (*widening security agenda*) yang dikembangkan oleh penstudi Hubungan Internasional madzab Kopenhagen. Apa dan bagaimana perluasan agenda keamanan itu? Siapa sajakah yang menggagasnya? Dan mengapa proses teorisasi perluasan agenda keamanan yang dipilih untuk mengkonfirmasi klaim teorisasi Meyers?

Pada prinsipnya, perluasan agenda keamanan adalah teori keamanan alternatif yang ditawarkan oleh penstudi Hubungan Internasional madzab Kopenhagen (*Copenhagen school*) untuk meretas perdebatan gagasan perwujudan ‘keamanan’ (bagaimana untuk mencapai ‘keamanan’) yang terbentang di antara paradigma liberalisme internasional (*international liberalism*) (a.k.a idealisme) dengan paradigma realisme<sup>35</sup>.

Di awal kemunculannya, teori ini ditawarkan oleh Barry Buzan, seorang Profesor Hubungan Internasional di *London School of Economics (LSE)*<sup>36</sup>. Lalu pada

---

[muenster.de/Politikwissenschaft/Doppeldiplom/docs/IRtheoryRM.pdf](http://muenster.de/Politikwissenschaft/Doppeldiplom/docs/IRtheoryRM.pdf), pada tanggal, 24 November 2008

<sup>35</sup> “...the division between the power and peace views has itself become a barrier to progressive thinking. In part, this barrier arises from the antagonism generated between those Realists and Idealists who take strong stands on either side of the divide.”, Barry Buzan, *Peace, Power, and Security: Contending Concepts in the Study of International Relations*, *Journal of Peace Research*, Vol.21-No.2, 1984, hal. 109-110

<sup>36</sup> “...the work of Barry Buzan has both been enormously important in the development of Security Studies and been at the core of what has been dubbed the ‘Copenhagen School’...”, Steve Smith, *Challenges to World Order*, Presentasi Kuliah Umum pada IRUA Student Research Conference, USC

perkembangan selanjutnya, teori ini disempurnakan oleh sentuhan ‘tangan dingin’ Ole Waever (Profesor Hubungan Internasional di Universitas Kopenhagen), Jaap de Wilde (Profesor Hubungan Internasional di Universitas Twente), serta beberapa penstudi lainnya (seperti Hakan Wiberg, Tarja Cronberg, Chris Browning, Lene Hansen, Pertti Joenniemi, dll), yang tergabung dalam Kelompok Riset Kopenhagen di bawah naungan *Copenhagen Peace Research Institute (COPRI)*<sup>37</sup>.

Terlepas dari apapun maksud pengagasnya (Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde) – apakah teori perluasan agenda keamanan diajukan sebagai pengganti (*paradigm shift*/Kuhnian), percabangan (bi-/multi-furkasi Meyers), atau bahkan sintesis antara konsepsi keamanan realisme-konsepsi keamanan idealisme - , penulis melihat adanya kesesuaian antara eksistensi perluasan agenda keamanan (dalam aspek proses kemunculan maupun substansi-nya) dengan klaim bi-/multi-furkasi teori Hubungan Internasional yang diajukan Meyers.

Dalam pandangan penulis, teori perluasan agenda keamanan muncul sebagai cabang dari konsepsi keamanan paradigma realis (penjelasan lebih lanjut, lihat Bab 2). Munculnya ancaman yang bersifat non-tradisional (*non-traditional threat*) dan terancamnya relevansi serta eksistensi negara dalam periode Pasca-Perang Dingin, menjadi krisis ekstra-saintifik yang memicu kelahiran teori perluasan agenda keamanan. Tentunya, eksistensi perluasan agenda keamanan sebagai ‘percabangan’ teoritis konsepsi keamanan realisme akan dibuktikan melalui landasan ontologis yang sama di antara keduanya. Walaupun, Buzan cenderung menyebut kelahiran perluasan

---

School of International Relations, 2005, diakses dari, <http://www.usc.edu/dept/LAS/ir/stevesmith.pdf>, pada tanggal 17 Januari 2008

<sup>37</sup> Sebutan *Copenhagen school* bagi perspektif Barry Buzan dan beberapa penstudi *widening security agenda* lainnya berasal dari *Copenhagen Research Group*, sebuah tim riset yang dibentuk dalam proses penulisan buku ‘*Security: A New Framework of Analysis*’.



agenda keamanan sebagai upaya ‘menjembatani’ (*bridging*) antara kubu konsepsi keamanan realisme dan kubu konsepsi keamanan idealisme<sup>38</sup>.

Alasan kedua dalam pemilihan perluasan agenda keamanan sebagai contoh kasus lebih bersifat komplementer. Penulis menemukan bahwa perluasan agenda keamanan juga memenuhi postur ‘ideal’ teori Hubungan Internasional yang digagas oleh Reinhard Meyers. Terdapat dimensi eksplanatori dan dimensi emansipatori dalam perluasan agenda keamanan (penjelasan lebih lanjut, lihat Bab 3 dan Bab 4). Narasi tentang konfrontasi eksistensi negara dengan berbagai isyu keamanan non-tradisional yang menyeruak sebagai hasil dari meningkatnya relasi saling-ketergantungan antar-aktor negara (*state actor*) maupun antara aktor negara dengan aktor non-negara (*non-state actors*), dan – sebagai hasil – dari melemahnya hingar-bingar isyu keamanan tradisional (*traditional security*), menegaskan dimensi eksplanatori perluasan agenda keamanan. Sementara dimensi emansipatori teori keamanan alternatif ini terlihat pada aspek sekuritisasi (*securitization*) isyu keamanan. Di mana sekuritisasi mampu mengungkap penyalahgunaan ambiguitas definisi terminologi ‘keamanan’ oleh pihak yang berkuasa (umumnya negara) demi mempertahankan dominasi mereka, sekaligus memperoleh justifikasi atas mobilisasi sumber daya domestik<sup>39</sup>.

Pada akhirnya, karya ini ditulis dengan tujuan menggugah wilayah kajian teoritis Hubungan Internasional, terutama di kalangan penstudi Strata Satu (*Undergraduates*) yang selama ini terlalu terpaku pada penerapan teori terhadap kasus tertentu (seringkali) tanpa mengetahui atau menyadari genealogi teori yang

---

<sup>38</sup> “*In this book I argue that the concept of security is, in itself, a more versatile, penetrating and useful way to approach the study of International Relations than either power or peace. It points to a prime motive for behavior which is different from, but no less significant than that provided by power. It also leads to a comprehensive perspective which is likewise different from, but no less useful than, that provided by peace.*”, Barry Buzan, *People, States & Fear: An Agenda for International Security Studies in The Post-Cold War Era*”. 2<sup>nd</sup> ed. Boulder: Lynne Rienner; Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1991, hal. 3

<sup>39</sup> Barry Buzan, Ole Wæver dan Jaap de Wilde, *op. cit.*, hal. 29

digunakan. Sehingga beberapa di antara mereka (penstudi S I) terjebak dalam dilema pemilihan teori yang tepat, karena masing-masing teori sama-sama menawarkan asumsi yang meyakinkan. Dalam konteks yang lebih luas, karya ini diharapkan mampu menyokong semangat pluralisme teoretis (*theoretical pluralism*) dan mendorong terwujudnya koeksistensi antar-paradigma dalam perkembangan Ilmu Hubungan Internasional.

## 1.2. Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam upayanya untuk mengkonfirmasi klaim bi-/multi-furkasi teoretis Reinhard Meyers, karya ini akan mendeskripsikan proses awal kemunculan perluasan agenda keamanan pada dekade 1980an sampai saat ini. Sementara itu, untuk menganalisa eksistensi ontologi realisme dalam teori perluasan agenda keamanan, serta untuk membuktikan keberadaan dimensi eksplanatori dan dimensi emansipatori di dalamnya, penulis menggunakan empat karya Barry Buzan, beserta penstudi mazhab Kopenhagen lainnya, sebagai bahan kajian utama.

Keempat karya itu adalah, *Peace, Power, and Security: Contending Concepts in The Study of International Relations*<sup>40</sup>; *People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in The Post-Cold War Era*<sup>41</sup>; *Security: A New Framework for Analysis*<sup>42</sup>; dan, *Regions and Powers: The Structure of International Security*<sup>43</sup>. Tentunya, karya Reinhard Meyers yang berjudul *Contemporary Developments in International Relations Theory*<sup>44</sup>, berperan sebagai kerangka rujukan utama dalam penulisan karya ini.

---

<sup>40</sup> Journal of Peace Research, Vol.21-No.2, Sage Publications, 1984.

<sup>41</sup> Boulder: Lynne Rienner; Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1991.

<sup>42</sup> Boulder: Lynne Rienner Publishers, London, 1998.

<sup>43</sup> Cambridge University Press, 2003.

<sup>44</sup> <http://www.uni-muenster.de/Politikwissenschaft/Doppeldiplom/docs/IRtheoryRM.pdf>

## 1.3. Rumusan Masalah

Terdapat dua rumusan masalah yang akan dianalisa dan dijawab dalam karya ini. Kedua rumusan masalah tersebut adalah:

- a. Apakah teori perluasan agenda keamanan merupakan percabangan dari konsepsi keamanan realisme?
- b. Apakah perluasan agenda keamanan dapat memenuhi kriteria alternatif teori Hubungan Internasional yang diajukan oleh Reinhard Meyers?

## 1.4. Landasan Teori

### 1.4.1. Mekanisme Bi/Multi-Furkasi Teorisasi Hubungan Internasional

Seperti yang telah disinggung pada bagian latar belakang permasalahan, Reinhard Meyers mengemukakan sebuah mekanisme perkembangan teorisasi Hubungan Internasional dalam pola yang berbeda dengan mekanisme teorisasi perspektif Kuhnian. Menurut Meyers, proses perkembangan Ilmu Hubungan Internasional dimulai dari eksistensi beberapa teori besar (*grand theories*) yang mewakili beberapa perspektif berbeda tentang hubungan internasional<sup>45</sup>. Sejumlah teori besar itu terikat dalam relasi yang koeksisten. Perbedaan perspektif memang menarik seluruh teori besar ke dalam arena persaingan, namun tidak ada satu teori besar-pun yang dapat benar-benar diruntuhkan, atau meruntuhkan teori lainnya<sup>46</sup>.

---

<sup>45</sup> “Each individual Grand Theory also constitutes a specific scientific world view, ontologically singular, different from other world views constituted by other Grand Theories.”, Reinhard Meyers, *Contemporary Developments...*, hal. 17, diakses dari, <http://www.uni-muenster.de/Politikwissenschaft/Doppeldiplom/docs/IRtheoryRM.pdf>, pada tanggal, 24 November 2008

<sup>46</sup> “Grand Theories and their world views compete with each other without offering science a possibility to decide which of the Grand Theories is the (only) correct representation of international reality.”, Reinhard Meyers, *Does Theory Matter?...*, slide 24, diakses dari, <http://www.uni-muenster.de/.../Doppeldiplom/docs/DoesTheorematter.pdf>, pada tanggal, 24 November 2008

Pada suatu titik, krisis ekstra-saintifik akan muncul. Periode ini diindikasikan dengan keberadaan fenomena-fenomena internasional yang tak lagi bisa dijelaskan melalui kerangka epistemologis dan metodologis teori-teori yang telah ada sebelumnya. Teori-teori baru akan bermunculan dari masing-masing pokok teori besar, dan teori itu tak akan pernah terpisah dari teori besar yang menjadi fondasi percabangannya, karena selalu terdapat benang ontologis yang mengaitkan keduanya.

Dengan demikian, paradigma lama tak akan pernah ‘mati’ atau mengalami pergeseran (*paradigm shift*) seperti yang diasumsikan oleh siklus ilmu pengetahuan Kuhnian. Hal ini didasarkan pada dua alasan, yaitu:

- Karena tidak ada kontestasi antar-paradigma. Masing-masing pokok ‘pohon’ (teori besar) memang membawa aspek ontologis yang beragam, dan kompetisi merupakan sesuatu yang tak terhindarkan. Namun, tidak akan ada dominasi antar-paradigma, tidak ada paradigma yang benar-benar mampu menumbangkan atau ditumbangkan oleh paradigma lainnya, dan ‘berkuasa’ untuk periode waktu tertentu. Masing-masing paradigma bertahan dengan interpretasi masing-masing terhadap fakta yang terhampar di hadapan mereka.
- Karena basis ontologi merupakan sesuatu yang selalu di’waris’kan kepada percabangan teori alternatif yang muncul sebagai respon terhadap krisis ekstra-saintifik. Mungkin paradigma lama tidak lagi ‘bersuara lantang’ dalam fungsi eksplanasinya – terkait dengan krisis ekstra-saintifik yang mengurangi relevansi eksplanasi tersebut – namun perspektif yang dibawanya akan terus bertahan dalam tubuh teori alternatif.

Pada akhirnya, cabang-cabang teori akan terus bermunculan seiring dengan eksistensi krisis ekstra-saintifik. Dan dengan mekanisme inilah Ilmu Hubungan Internasional memperoleh perkembangannya.

## 1.4.2. Konsepsi Alternatif Teori Hubungan Internasional: Perspektif Meyers

Kerangka konseptual kedua yang akan dipakai dalam karya ini adalah konsepsi alternatif teori Hubungan Internasional yang diajukan oleh Meyers. Konsepsi ini merupakan deskripsi Meyers tentang bentuk 'ideal' teori dalam Ilmu Hubungan Internasional. Paling tidak, terdapat dua komponen besar yang seharusnya dimiliki oleh teori Hubungan Internasional, yaitu komponen eksplanatif dan komponen emansipatif.

Komponen eksplanatif mencakup aspek genetik (kaitan antara teori dengan paradigma 'teori besar'-nya) dan aspek fungsional (fungsi eksplanatori yang terkandung dalam teori), yang pada gilirannya meliputi dua jenis kegunaan, yaitu legitimasi (pemaknaan terhadap fakta sosial yang terhampar)<sup>47</sup> dan solusi (*problem-solving*) yang berkisar pada dua opsi, yakni konservasi (mempertahankan) atau rekonstruksi (penataan kembali) tata sosial yang terancam oleh krisis sistemik<sup>48</sup>.

Sementara itu, komponen emansipatif memiliki dua aspek utama, yakni aspek kritik (terhadap tatanan sosial yang telah ada)<sup>49</sup> dan aspek utopia (desain tatanan sosial baru sebagai revisi atas tatanan sosial yang telah ada)<sup>50</sup>. Kedua komponen ini (komponen eksplanatif dan emansipatif) juga dibentuk untuk mencapai target yang

---

<sup>47</sup> "Legitimation, ascription of meaning to societal behavior and corroboration of the intentions and results of practical action.", Reinhard Meyers, *Contemporary Development...*, hal. 20, diakses dari, <http://www.uni-muenster.de/Politikwissenschaft/Doppeldiplom/docs/IRtheoryRM.pdf>, pada tanggal, 24 November 2008

<sup>48</sup> "Problem solving, conservation or reconstruction of existing social order threatened by systemic crisis.", Reinhard Meyers, *Contemporary Developments...*, hal. 20, <http://www.uni-muenster.de/Politikwissenschaft/Doppeldiplom/docs/IRtheoryRM.pdf>, pada tanggal, 24 November 2008

<sup>49</sup> "Critique, of parts or the totality of existing social orders and/or the realisation of specific values.", Reinhard Meyers, *Contemporary Developments...*, hal. 20, diakses dari, <http://www.uni-muenster.de/Politikwissenschaft/Doppeldiplom/docs/IRtheoryRM.pdf>, pada tanggal, 24 November 2008

<sup>50</sup> "Utopia, construction/design of new social order models as further development of/in contrast to existing social orders.", Reinhard Meyers, *Contemporary Developments...*, hal. 20, diakses dari, <http://www.uni-muenster.de/Politikwissenschaft/Doppeldiplom/docs/IRtheoryRM.pdf>, pada tanggal, 24 November 2008

berbeda. Komponen eksplanatif dibentuk untuk mewujudkan pengelolaan masalah, resolusi konflik, dan solusi bagi krisis sosio-politik<sup>51</sup>. Sedangkan komponen emansipatif diperlukan untuk menjamin perkembangan konteks sosial yang lebih baik dan manusiawi<sup>52</sup>.

Pendek kata, 'teori' dalam konsepsi Meyers tidak akan memandang institusi, norma-norma behavioral, relasi kekuasaan dan relasi sosial, kepentingan sosio-ekonomi serta berbagai problematika-nya, sebagai sesuatu yang ada dengan sendirinya (*given*)<sup>53</sup>. 'Teori' akan mengidentifikasi posisi, letak, dan signifikansi aspek-aspek tersebut dalam konteks genetis-nya berdasarkan garis kontinum kesejarahan (historis) yang nyata<sup>54</sup>.

### 1.4.3. Perluasan Agenda Keamanan

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, sebuah pendekatan keamanan kontemporer telah diajukan oleh para penstudi yang tergabung dalam *Copenhagen Research Group*, sebuah kelompok riset yang beranggotakan beberapa *scholars*

---

<sup>51</sup> “(Explanation) aim, enclosure, management, and resolution of conflicts, solution of societal/political crises.”, Reinhard Meyers, *Contemporary Developments...*, hal. 20, diakses dari, <http://www.uni-muenster.de/Politikwissenschaft/Doppeldiplom/docs/IRtheoryRM.pdf>, pada tanggal, 24 November 2008

<sup>52</sup> “(Emancipatory) aim, assurance of self-responsible individual and/or social development.”, Reinhard Meyers, *Contemporary Developments...*, hal. 20, diakses dari, <http://www.uni-muenster.de/Politikwissenschaft/Doppeldiplom/docs/IRtheoryRM.pdf>, pada tanggal, 24 November 2008

<sup>53</sup> “My concept of theory would not regard institutions, behavioral norms, social and power relations, political and socioeconomic interests and problematiques as givens...”, Reinhard Meyers, *Contemporary Developments...*, hal. 19, diakses dari, <http://www.uni-muenster.de/Politikwissenschaft/Doppeldiplom/docs/IRtheoryRM.pdf>, pada tanggal, 24 November 2008

<sup>54</sup> “...but it (theory) would try to localize their (institutions, behavioral norms, etc) position, standing, and importance in historically concrete genetic contexts.”, Reinhard Meyers, *Contemporary Developments...*, hal. 19, diakses dari, <http://www.uni-muenster.de/Politikwissenschaft/Doppeldiplom/docs/IRtheoryRM.pdf>, pada tanggal, 24 November 2008

ternama, seperti, Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde, dan Hakan Wiberg. Teori perluasan agenda keamanan (*broadening security perspective*) merupakan *masterpiece* hasil kajian kelompok riset tersebut.

Sedikit berbeda dengan pendekatan keamanan kontemporer lainnya, perluasan agenda keamanan meng-*highlight* aspek fungsionalnya sebagai peretas jalan tengah antara dua kubu dalam studi keamanan klasik, yaitu kubu realis – akumulasi *power* sebagai media untuk mencapai keamanan – dan kubu idealis – perwujudan perdamaian sebagai konteks yang akan menghasilkan keamanan.

Secara garis besar, terdapat tiga elemen utama yang menjadi bahan dasar bagi Buzan untuk meramu perdebatan konseptual 'keamanan' ini dalam term 'perluasan agenda keamanan'. Elemen pertama, yaitu konstruktivisme sosial (*social constructivism*). Elemen kedua adalah mekanisme sekuritisasi, yang merupakan kontribusi berharga dari Ole Waever. Sedangkan elemen ketiga, yakni kompleks keamanan (*security complex*), merupakan elemen terakhir yang Buzan kembangkan untuk pertama kalinya dalam '*People, States & Fear: An Agenda for International Security Studies in The Post-Cold War era*'.

Konstruktivisme sosial yang diajukan oleh Wendt menjadi modal penting pertama bagi teori perluasan agenda keamanan untuk membuktikan koherensi epistemologis-nya. Melalui konstruktivisme sosial, Buzan dapat mendeskripsikan proses diskursus keamanan sebagai sebuah proses sosial yang cukup stabil, sehingga dapat diperlakukan secara objektif<sup>55</sup>.

Sementara itu, mekanisme sekuritisasi pada awalnya dicetuskan oleh Ole Waever di tahun 1989 dalam sebuah *paper* yang berjudul '*Security The Speech Act: Analysing The Politics of A Word*'. Mekanisme ini menawarkan kerangka teknis untuk menjelaskan proses transformasi sebuah isu menjadi faktor ancaman

---

<sup>55</sup> Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde, *op. cit.*, hal. vii

keamanan yang cukup signifikan sehingga mampu 'memaksa' negara untuk melakukan *countermeasure* di luar proses politik yang berlaku<sup>56</sup>.

Elemen penting ketiga (dan yang terakhir) dalam teori perluasan agenda keamanan adalah kompleks keamanan. Kompleks keamanan ini berporos pada penjelasan tentang pembentukan kawasan keamanan (*security regions*), yakni sebuah subsistem relasi keamanan di antara negara-negara yang terjalin dalam pola spesifik yang disebabkan oleh faktor kedekatan geografis (*geographical proximity*) di antara negara-negara tersebut<sup>57</sup>.

Ketiga elemen di atas telah memberikan dasar yang cukup kokoh bagi Buzan untuk mengembangkan teori perluasan agenda keamanannya. Namun, landasan tersebut belum cukup mewakili keinginan Buzan untuk menghasilkan sebuah kerangka analisa keamanan alternatif. Karena untuk mewujudkan hal tersebut, Buzan dituntut untuk mengembangkan komponen-komponen operasional sebagai alat analisa (*analytical tools*) sehingga gagasan perluasan makna terminologi keamanannya tidak hanya berada di 'awang-awang', tetapi lebih dari itu, dapat diterjemahkan pada objek permasalahan yang nyata. Komponen-komponen tersebut diantaranya:

a. Unit analisa keamanan, yaitu tiga aktor dalam analisa keamanan yang memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Keseluruhan perluasan agenda keamanan mempengaruhi – atau dipengaruhi – secara langsung oleh ketiga aktor yang tercantum di bawah ini :

- *Referent objects*, yaitu aktor maupun pihak yang dipandang sebagai 'yang terancam', dan dengan begitu, memiliki klaim yang sah untuk bertahan atau

---

<sup>56</sup> Ole Waever, *op. cit.*, hal. 28

<sup>57</sup> "...Regional Security Complex Theory was developed primarily in relation to the dynamics of the Political and Military Sectors, where, because threats in these sectors travel more easily over short distances than over long ones, distance clearly plays a role in producing Regional Security Complexes.", Barry Buzan dan Ole Waever, *Regions and Powers: The Structure of International Security*, Cambridge University Press, 2003, hal. xvi



dipertahankan<sup>58</sup>.

- *Securitizing actors*, yaitu aktor maupun pihak yang melakukan upaya Sekuritisasi isyu tertentu dengan menyatakan bahwa terdapat pihak-pihak tertentu – *referent objects* – yang berada dalam kondisi terancam<sup>59</sup>.
- *Functional actors*, yaitu aktor maupun pihak yang mampu mempengaruhi dinamika sektor keamanan tertentu tanpa harus memosisikan diri sebagai *referent objects* ataupun *securitizing actors*. Pada umumnya *functional actors* dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan keamanan<sup>60</sup>.

b. Agenda keamanan, yakni lima sektor permasalahan yang meliputi lima aspek kehidupan manusia (politik, militer, sosial, ekonomi, lingkungan) dan memiliki tipe interaksi masing-masing yang bersifat spesifik, sehingga dapat dibedakan satu sama lain<sup>61</sup>. Sesuai dengan lima sektor permasalahan di atas, maka perluasan agenda keamanan juga mengadopsi lima agenda keamanan berbeda, yakni:

- Agenda keamanan politik, problematika pengelolaan stabilitas organisasional negara, sistem pemerintahan dan ideologi yang menjadi basis legitimasinya<sup>62</sup>.
- Agenda keamanan militer, problematika yang bersumber dari dinamika kapabilitas militer nasional yang bersifat ofensif (kapabilitas menyerang) dan defensif (kapabilitas bertahan), serta (problematika) yang bersumber dari persepsi negara terhadap maksud (*intention*) negara lainnya<sup>63</sup>.
- Agenda keamanan ekonomi, problematika yang bersumber dari keterbatasan akses terhadap sumber daya, kapabilitas finansial, dan pasar, yang dibutuhkan untuk mempertahankan level kesejahteraan nasional, dan (dibutuhkan) untuk

---

<sup>58</sup> Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde, *op. cit.*, hal. 36

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.*

mempertahankan kekuasaan negara<sup>64</sup>.

- Agenda keamanan sosial, problematika yang mencakup keberlanjutan pola-pola tradisional dari bahasa, kultur, agama, identitas kebangsaan, serta adat-istiadat tertentu, dalam sebuah *lingkungan* yang kondusif<sup>65</sup>.
- Agenda keamanan lingkungan, problematika yang bersumber dari keberlangsungan dan upaya-upaya untuk mempertahankan biosfer lokal dan global sebagai sistem pendukung penting bagi kehidupan manusia<sup>66</sup>.

c. Konstelasi sekuritisasi, yaitu pemetaan kompleks keamanan (*security complexes*) yang ditujukan untuk menganalisa pola keterkaitan keamanan dari beberapa kompleks keamanan yang berbeda<sup>67</sup>.

Setelah beberapa prasyarat konseptual tersebut terpenuhi, maka barulah kemudian teori perluasan agenda keamanan dapat menyediakan deskripsi menyeluruh mengenai jenis ancaman, objek yang terancam, serta bentuk respon yang harus diberikan terhadap ancaman tersebut.

## 1.5. Argumentasi Utama

Dua poin argumentasi utama akan dibuktikan melalui karya ini. Kedua argumentasi utama tersebut adalah:

a. Bahwa perluasan agenda keamanan merupakan percabangan dari konsepsi keamanan realisme. Hal ini dibuktikan dengan basis ontologis perluasan agenda keamanan yang sama dan bersumber dari paradigma realisme, yakni:

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*

- *State-sentrisme* (diartikan sebagai, fokus analisa terhadap ‘negara’ sebagai unit primer dan aktor rasional dalam politik internasional);
- Anarkisme sistem internasional (diartikan sebagai, struktur sistem internasional yang tidak mengenal adanya kekuasaan politik lain di atas kedaulatan negara); dan,
- ‘Negara’ sebagai pencari kekuasaan (*power-seeking actors*) serta pencari keamanan (*security-seeking actors*)

b. Bahwa perluasan agenda keamanan mampu memenuhi dua kriteria alternatif teori Hubungan Internasional yang diajukan oleh Reinhard Meyers, yaitu:

- Kriteria dimensi eksplanatori, yang merujuk pada kemampuan ‘teori’ Hubungan Internasional untuk menyajikan deskripsi mengenai konteks hubungan internasional kontemporer serta (kemampuan ‘teori’) untuk menyediakan gagasan baru yang mampu mengakomodasi perbedaan-perbedaan dalam hubungan internasional saat ini. Dan,
- Kriteria dimensi emansipatori (*enlightenment*) yang merujuk kepada kapabilitas teori untuk melancarkan kritik terhadap konstruksi sosial konservatif dan sejauh mana ‘teori’ itu mampu mengajukan tata sosial alternatif yang aplikatif.

## 1.6. Outline Penulisan

Hasil analisa terhadap eksistensi perluasan agenda keamanan sebagai sebuah teori alternatif, melalui bingkai teorisasi Meyers dan model ‘teori’ alternatif-nya ini, akan penulis sajikan ke dalam lima Bab. Pada Bab pertama (Bab yang sedang anda baca, ed.), akan ditemui latar belakang observasi dan penulisan (hal-hal menarik dan kontribusi akademis yang membuat karya ini berbeda), perspektif penulisan dan argumentasi utama yang diajukan, serta selayang pandang tiga konsepsi utama yang

akan dikaji, yakni mekanisme teorisasi Hubungan Internasional Reinhard Meyers, konsepsi alternatif teori Hubungan Internasional, dan perluasan agenda keamanan.

Selanjutnya, pembaca akan menemukan jawaban atas pertanyaan pertama (dari dua poin rumusan masalah), dalam Bab kedua. Pada bagian ini akan dijumpai penjelasan mendetil mengenai mekanisme teorisasi Hubungan Internasional dan kesesuaiannya dengan proses kelahiran serta eksistensi perluasan agenda keamanan sebagai teori keamanan alternatif yang berasal dari pokok ontologi realisme.

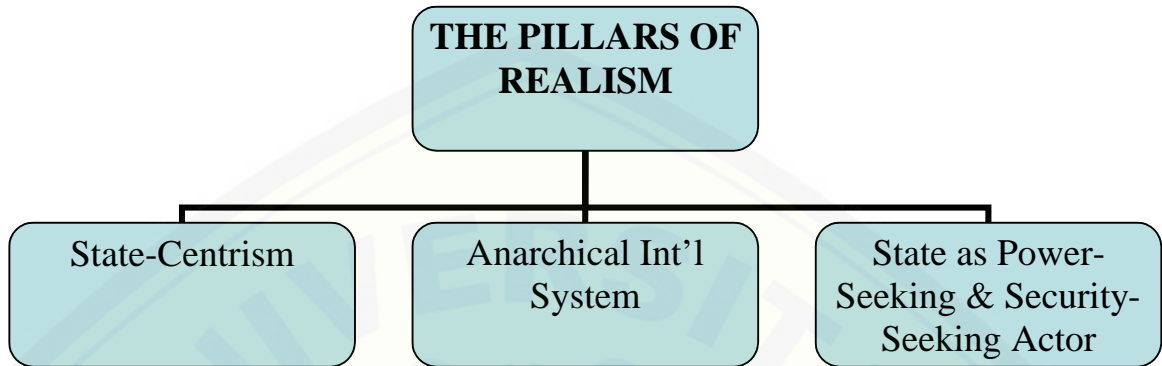
Dalam Bab ketiga, penulis akan memaparkan konsepsi teori Hubungan Internasional dalam perspektif Reinhard Meyers dan menggunakannya sebagai media penganalisa perluasan agenda keamanan dari sisi analisis-teoretis. Komponen eksplanatif dalam perluasan agenda keamanan, adalah hal pertama yang akan penulis jabarkan. Komplek keamanan regional sebagai bagian dari teori perluasan agenda keamanan, akan mendominasi bahasan yang disajikan.

Bab keempat, merupakan Bab yang tak boleh dipisahkan dari Bab ketiga. Karena dalam Bab ini penulis akan mendeskripsikan komponen emansipatif dari perluasan agenda keamanan. Mekanisme sekuritisasi dan konsep *mature anarchy*, sebagai bagian dari perluasan agenda keamanan, akan menjadi dua ‘aktor’ utama dalam Bab keempat.

Jika pembaca menginginkan jawaban yang komprehensif atas poin pertanyaan kedua (dalam dua poin rumusan masalah), yang telah disebutkan dalam Bab pertama, maka Bab keempat adalah bagian yang tak boleh dilewatkan begitu saja. Pada akhirnya, Bab kelima akan merangkum keseluruhan hasil analisa deskriptif-analitik yang penulis lakukan terhadap perluasan agenda keamanan, dari kerangka mekanisme teorisasi Hubungan Internasional Reinhard Meyers.

**CYCLE OF ARGUMENTATION**

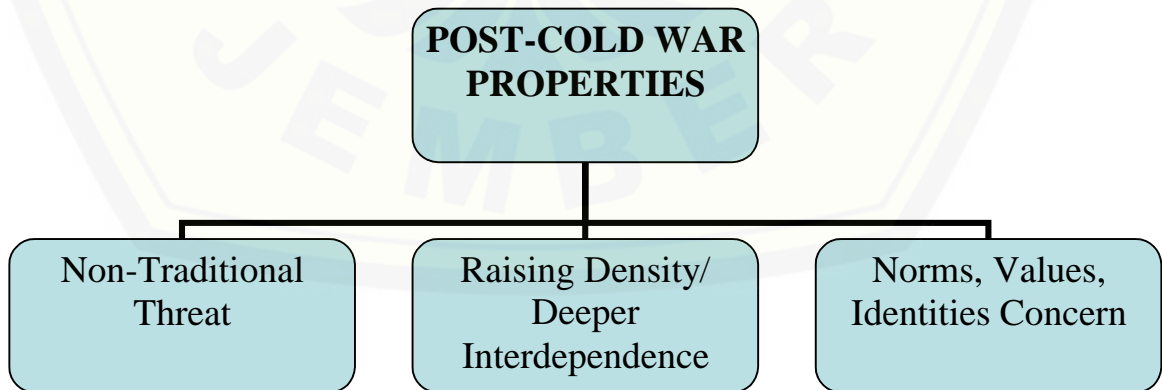
Gambar. 1a



Gambar. 1b



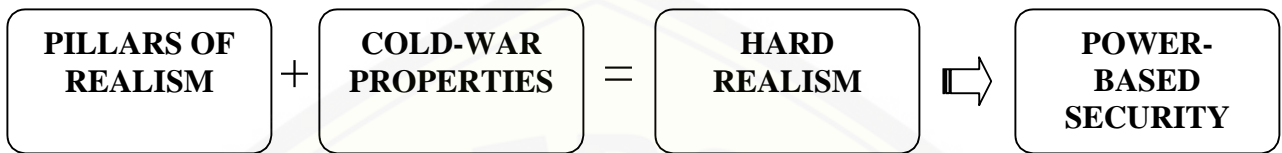
Gambar. 1c



**BAGAN ARGUMENTASI BAB 2**

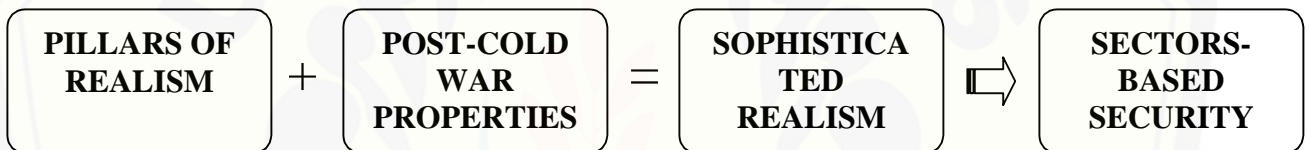
**POWER-BASED SECURITY**

Gambar. 2a

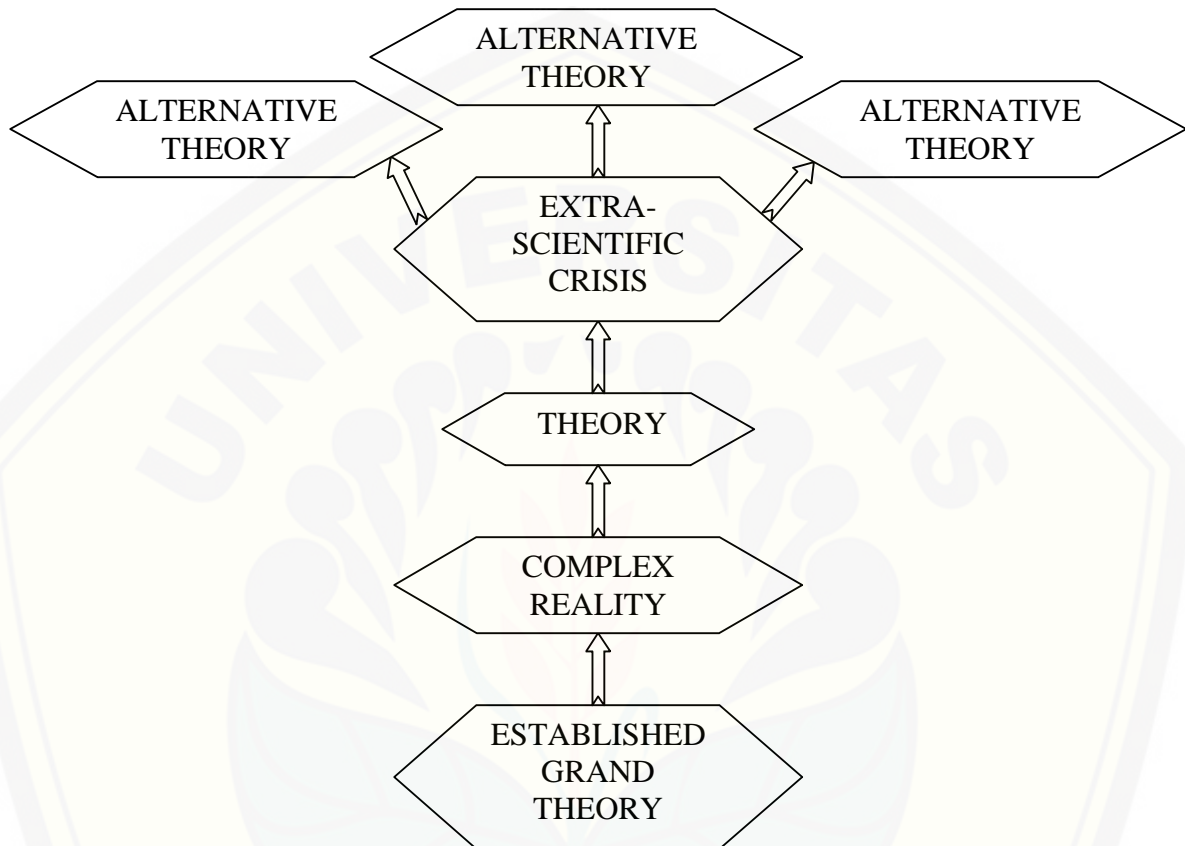


**SECTORS-BASED SECURITY**

Gambar. 2b



**BAGAN BIFURKASI / MULTIFURKASI 'TEORI' REINHARD MEYERS**

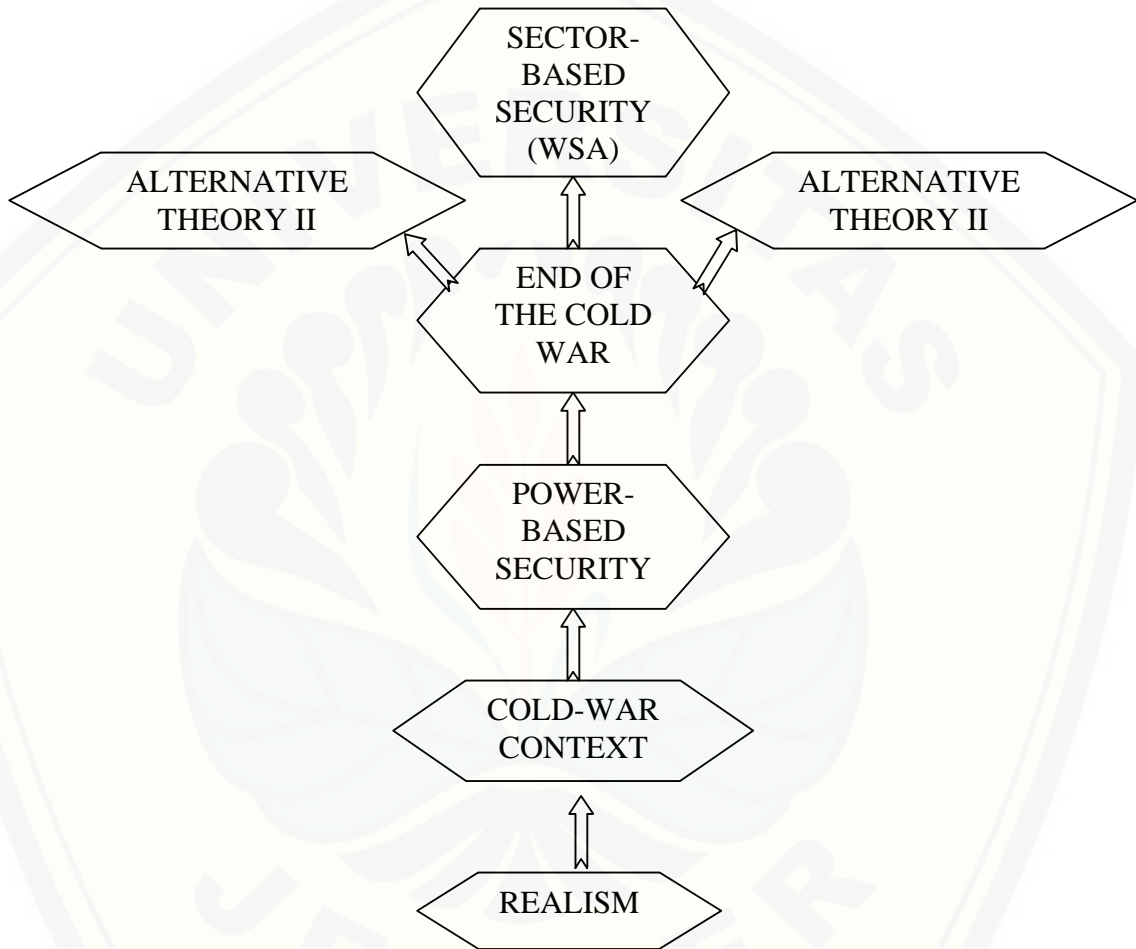


Gambar. 2c

Disadur Dari : Reinhard Meyers, *Contemporary Developments in International Relations Theory*, dapat di akses pada: <http://www.uni-muenster.de/Politikwissenschaft/Doppeldiplom/docs/IRtheoryRM.pdf>.

**PENERAPAN BAGAN BIFURKASI / MULTIFURKASI PADA  
PERLUASAN AGENDA KEAMANAN**

Gambar. 2d



Disadur dengan modifikasi dari : Reinhard Meyers, *Contemporary Developments in International Relations Theory*, dapat di akses pada: <http://www.uni-muenster.de/Politikwissenschaft/Doppeldiplom/docs/IRtheoryRM.pdf>



## BAB II

### PERLUASAN AGENDA KEAMANAN SEBAGAI PERCABANGAN KONSEPSI KEAMANAN REALISME

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bagian Pendahuluan. Penulis mengajukan argumentasi bahwa teori keamanan alternatif yang ditawarkan oleh *Copenhagen school* – yang lebih dikenal sebagai teori ‘perluasan agenda keamanan’ – merupakan percabangan dari konsepsi keamanan realisme<sup>68</sup>. Argumentasi ini berakar pada satu alasan, yaitu eksistensi landasan ontologi realisme yang juga berperan sebagai landasan ontologi perluasan agenda keamanan. Dan dipandang dari perspektif perkembangan teorisasi Ilmu Hubungan Internasional (yang diajukan oleh Reinhard Meyers, kesamaan basis ontologis<sup>69</sup> itu merupakan justifikasi yang cukup untuk menyatakan bahwa sebuah teori / konsepsi alternatif merupakan percabangan dari sebuah teori besar (*grand theory*)<sup>70</sup>.

---

<sup>68</sup> Perspektif realisme yang dimaksud di sini, terutama merujuk kepada realisme klasik (e.g Hans Joachim Morgenthau, Edward Hallett Carr, dll) yang menekankan signifikansi peran negara dibandingkan dengan signifikansi pengaruh sistem internasional, seperti yang diasumsikan oleh realisme struktural (neo-realisme).

“*And since Realism remains a key fulcrum around which debates over international politics continue to turn, questions about its nature and adequacy – and Morgenthau’s formulation of it – have remained central to the study of IR.*”, Michael C. Williams (ed.), *Realism Reconsidered: The Legacy of Hans Morgenthau in International Relations*, Oxford University Press, 2007, hal. 1

“*Having demolished the current utopia with the weapons of Realism, we still need to build a new utopia of our own, which will one day fall to the same weapons. The human will continue to seek escape from the logical consequences of Realism in the vision of an international order which, as soon as it crystallizes itself into concrete political form, becomes tainted with self-interest and hypocrisy, and once more be attacked with the instruments of Realism.*”, Edward Hallett Carr, *The Twenty Years Crisis, 1919-1939: An Introduction to The Study of International Relations*, Macmillan, London, 1939, hal. 118

<sup>69</sup> “*Ontological Criteria, leading to the question: which images, ..., which scientific world-view does a theory generate with respect to the object of a particular discipline?*”, Reinhard Meyers, *Contemporary ...*, hal. 12, diakses dari, <http://www.uni-muenster.de/Politikwissenschaft/Doppeldiplom/docs/IRtheoryRM.pdf>, pada tanggal, 24 November 2008

<sup>70</sup> “*Grand Theory, epistemologically systems of generalizing statements about linguistically constituted phenomena taken for ‘real’ (on the basis of consensus, tradition, or other specifically*

Dalam Bab ini, penulis akan memaparkan dan membuktikan argumentasi tersebut melalui beberapa tahapan. Pertama, penulis akan mengidentifikasi tiga basis ontologi realisme (dalam diagram argumentasi disebut sebagai pilar-pilar realisme), yaitu ‘state-sentrisme’ (*state-centrism*)<sup>71</sup>; Sistem internasional yang anarkis (*anarchical international system*)<sup>72</sup>; dan negara sebagai aktor pencari-kekuasaan dan pencari-keamanan (*state as power-seeking and security-seeking actors*)<sup>73</sup>.

Kedua, penulis akan memaparkan konteks politik internasional selama Perang Dingin berlangsung dan apa pengaruhnya bagi bentuk studi keamanan yang berkembang pada saat itu. Politik internasional era Perang Dingin diekspresikan melalui tiga konsepsi penting, yakni struktur bipolar (*bipolarity*)<sup>74</sup>; konsepsi ancaman senjata nuklir (*nuclear threat*); dan konsepsi studi keamanan yang berbaur dengan studi strategis (*security studies as strategic studies*)<sup>75</sup>. Konsepsi terakhir merupakan hasil pertemuan di antara elemen ontologis realisme dengan konteks politik internasional masa Perang Dingin.

Ketiga, penulis akan menganalisa efek perubahan yang ditimbulkan oleh berakhirnya Perang Dingin terhadap perkembangan studi keamanan. Analisa itu akan disajikan melalui deskripsi tentang tiga karakteristik utama masa Pasca-Perang

---

*established agreements*)”, Reinhard Meyers, *Contemporary...*, hal. 16, diakses dari, <http://www.uni-muenster.de/Politikwissenschaft/Doppeldiplom/docs/IRtheoryRM.pdf>, pada tanggal, 24 November 2008

<sup>71</sup> Fokus analisa terhadap ‘negara’ sebagai unit primer dan aktor rasional dalam politik internasional.

<sup>72</sup> Sistem internasional yang tidak dipimpin sebuah pemerintahan dunia (*absence of world government*), yang berarti tidak mengakui adanya kekuasaan politik lain yang lebih tinggi dari negara.

<sup>73</sup> “*For Realists, ... , the key actors are states, and the main processes at work involve a search for security, ... , ... . States are treated, ... , as monoliths with interests, dominant of which is the maximization of power.*”, Reinhard Meyers, *Contemporary...*, hal.22, diakses dari, <http://www.uni-muenster.de/Politikwissenschaft/Doppeldiplom/docs/IRtheoryRM.pdf>, pada tanggal, 24 November 2008

<sup>74</sup> “*The Cold War, with two superpowers serving to anchor rival alliances of clearly inferior powers, is our model of Bipolarity.*”, John J. Mearsheimer, *Why We Will Soon Miss the Cold War*, *The Atlantic*, Vol. 266, No. 2, Agustus 1990, hal. 46

<sup>75</sup> Barry Buzan, *op. cit.*, hal. 11

Dingin, yakni, munculnya isu keamanan non-tradisional (*non-traditional threat*)<sup>76</sup>; meningkatnya densitas relasional antar-negara, atau proses saling ketergantungan yang mendalam (*raising density / deeper interdependence*)<sup>77</sup>; serta tumbuhnya perhatian dan kepedulian terhadap aspek norma, nilai, dan identitas (*norms, values, identities concern*)<sup>78</sup>. Secara simultan, ketiganya merubah bentuk studi keamanan tradisional (studi keamanan era Perang Dingin) menjadi teori-teori keamanan alternatif<sup>79</sup>, yang salah satunya digagas oleh para penstudi *Copenhagen school*.

Malang bagi para pendukung liberalisme internasional (idealisme / utopian), karena ternyata berakhirnya Perang Dingin tidak serta-merta menghapuskan eksistensi realisme sebagai sebuah paradigma (walaupun tidak dapat dikatakan memperkuat)<sup>80</sup>. Berakhirnya Perang Dingin hanya mengubah tataran epistemologis

---

<sup>76</sup> Sektor ancaman keamanan yang datang dari ranah lain di luar ancaman keamanan militer dan ancaman keamanan politik. Dalam perluasan agenda keamanan *Copenhagen school*, isu-isu non-tradisional mencakup, isu keamanan sosial, isu keamanan ekonomi, dan isu keamanan lingkungan.

<sup>77</sup> Barry Buzan, *op. cit.*, hal. 368

<sup>78</sup> “*The moral revolution in social science alluded to earlier opened up a vista on a number of properties of theory which cannot be subsumed under an ontological or epistemological heading. We realized that theory was not the product of a scientific ivory tower, fulfilling exclusively intra-scientific knowledge-generating and knowledge-structuring functions. Rather - ... - all theory implicitly or explicitly addresses itself to social practice...*”, Reinhard Meyers, *Contemporary...*, hal. 13, diakses dari, <http://www.uni-muenster.de/Politikwissenschaft/Doppeldiplom/docs/IRtheoryRM.pdf>, pada tanggal, 24 November 2008

<sup>79</sup> Terdapat setidaknya 6 pendekatan dalam studi keamanan, diantaranya, pendekatan tradisional (*traditional approach*), pendekatan keamanan manusia (*human security approach*), pendekatan keamanan perspektif jender (*gender security approach*), pendekatan keamanan kritis (*critical security approach*), pendekatan studi perdamaian (*peace studies*), pendekatan sekuritisasi (*securitization approach*). Lihat: Alan Collins, *Contemporary Security Studies: What is Security Studies?*, Oxford Higher Education, PowerPoint Presentation, Oxford University Press, 2007, diakses dari, <http://www.oup.com/uk/orc/bin/9780199284696/freelecturer/ppt/ch01.ppt>, pada tanggal 18 Januari 2008

<sup>80</sup> “*Some Realists have in the 1990s begun to move beyond this debate and seek to re-integrate International Relations and foreign policy-making in their understanding of world politics. Neoclassical Realists, these people are often called, although we shall argue that Neoclassical Realists represent one of two pillars in the new and reconstructed house of Classical Realism. This house is founded on the assumption that Liberalism does not represent the finalite’ of political aspiration (...)*...”, Sten Rynning dan Jens Ringsmose, *Why Are Revisionist States Revisionist? Reviving Classical Realism as an Approach to Understanding International Change*, International Politics

dari studi keamanan tradisional, tanpa membawa perubahan yang berarti pada tataran ontologis-nya<sup>81</sup>. Dengan kata lain, kita boleh mengatakan bahwa relevansi studi keamanan tradisional (studi keamanan yang menyorot problematika militer dan politik sebagai satu-satunya kajian utama) telah berakhir<sup>82</sup>, dan bahwa periode Pasca-Perang Dingin adalah masa kebangkitan bagi isu-isu keamanan non-tradisional<sup>83</sup>. Tetapi, bagaimanapun juga, kita masih harus mengakui bahwa state-sentrisme<sup>84</sup> dan sistem internasional yang anarkis<sup>85</sup> merupakan dua *governing principles* yang krusial (jika tidak bisa dikatakan yang terpenting) dalam perkembangan Ilmu Hubungan Internasional, terutama pada wilayah kajian keamanan<sup>86</sup>.

Pada akhirnya, meneguhkan pernyataan Meyers, penulis menyatakan bahwa setiap perspektif (teori besar) yang berada di bawah naungan Ilmu Hubungan Internasional, sampai detik ini, hidup dan berkembang dalam dunianya masing-masing<sup>87</sup>. Konteks hubungan internasional yang terlihat dari sudut pandang realisme, merupakan ‘hubungan internasional’ yang berbeda dengan konteks yang dianalisa melalui perspektif liberalisme<sup>88</sup>. Inilah mengapa dialektika perspektif akademis yang membentuk Ilmu Hubungan Internasional selalu disebut sebagai ‘perdebatan’

---

Journal, vol.45, 2008, hal. 20, diakses dari, <http://www.palgrave-journals.com/ip/journal/v45/n1/8800217a.html>, pada tanggal 19 Maret 2008

<sup>81</sup> Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde, *op. cit.*, hal. 2-3

<sup>82</sup> Barry Buzan, *op. cit.*, hal. 1-2

<sup>83</sup> Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde, *op. cit.*, hal. 2

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> Barry Buzan, *op. cit.*, hal. 112

<sup>86</sup> Barry Buzan, *op. cit.*, hal. 14

<sup>87</sup> “Theories are not laws, they are continually being revised in light of changing circumstances.”, Reinhard Meyers, *International Relations Theory: A Simple Start*, PowerPoint Presentation, diakses dari, <http://www.uni-muenster.de/.../Doppeldiplom/docs/InternationalRelationstheory.pdf>, pada tanggal 24 November 2008

<sup>88</sup> “The difference of cognitive schemata and of the perception and information processing processes mentioned also implies a difference of individual world views.”, Reinhard Meyers, *The Role of Theory In the Study of International Politics*, Pidato penganugerahan gelar Doktor Kehormatan dari Universitas Novi Sad, diakses dari, [http://www.ns.ac.yu/en/novosti\\_dogadjaji/majers2007/govor.pdf](http://www.ns.ac.yu/en/novosti_dogadjaji/majers2007/govor.pdf), pada tanggal 24 November 2008

(*debates*) bukan ‘pertarungan’ (*battles*), karena pada prinsipnya, teori Hubungan Internasional tak pernah mengenal kata ‘binasa’ (*end of paradigm*)<sup>89</sup>.

## 2.1. Basis Ontologis Realisme (*The Pillars of Realism*)

### 2.1.1. *State-Sentrisme (State-Centrism)*

“*The best defense is a good offense.*”

(Thomas Hobbes, *Leviathan*, ch.13, 1986).

Hubungan internasional dalam perspektif realisme adalah hasil dari interaksi individual negara-negara, di mana masing-masing negara menjalankan perannya sebagai aktor internasional<sup>90</sup>. Bagi realis, negara merupakan satu-satunya aktor utama dalam hubungan internasional<sup>91</sup>. Ini bukan berarti bahwa paradigma realisme tidak mengakui adanya aktor lain dalam hubungan internasional, melainkan, bahwa negara

---

<sup>89</sup> “‘Truth’ can, then, no longer be a property of the ‘world out there’ but has to be one of ‘statements about the world’. Such knowledge means that we cannot test our ideas against reality as all our questions to nature are already phrased in a theory (or language); we test only theories against other theories.”, Friedrich Kratochwil, *The Monologue of ‘Science’*, dalam Gunther Hellmann (ed.), *Are Dialogue and Synthesis Possible in International Relations?*, International Studies Review, vol.5, Blackwell Publishing, 2003, hal.124, diakses dari, <http://www.ingentaconnect.com/content/bpl/misr/2003/00000005/00000001>, pada tanggal 11 Januari 2008

<sup>90</sup> “*The analytic object of International Relations as a scientific discipline are the relations between states.*”, Reinhard Meyers, *Contemporary...*, hal. 36, diakses dari, <http://www.uni-muenster.de/Politikwissenschaft/Doppeldiplom/docs/IRtheoryRM.pdf>, pada tanggal 24 November 2008

“*International relations are the result of individual interactions of states as international actors.*”, Reinhard Meyers, *Contemporary...*, hal.37, diakses dari, <http://www.uni-muenster.de/Politikwissenschaft/Doppeldiplom/docs/IRtheoryRM.pdf>, pada tanggal 24 November 2008

<sup>91</sup> “*The ontological superiority of the state over the system means that it constitutes an independent agential variable in International Politics. Thus as states change, so does the international system.*”, John M. Hobson, *The State and International Relations*, Cambridge University Press, 2000, hal. 18

merupakan kunci eksplanasi konteks hubungan internasional. Eksistensi aktor non-negara hanya memiliki relevansi sebagai agen (alat / media) dari kebijakan negara<sup>92</sup>.

Signifikansi peran negara sebagai unit utama dalam hubungan internasional bersumber dari dua fungsi yang dijalankannya, yaitu, sebagai penjamin keamanan individu yang berada di dalam wilayah teritorialnya, dan fungsinya sebagai penjamin tata politik di wilayah domestik<sup>93</sup>. Sedangkan, pada level sistem internasional, signifikansi peran negara disokong oleh ketiadaan (*absence*) pemerintahan dunia (*world government*)<sup>94</sup>. Dengan kata lain, negara merupakan unit pemilik kekuasaan politik tertinggi, tidak ada kewenangan lain yang bersifat *superior* terhadap kewenangan negara.

Untuk menjalankan fungsinya sebagai penjamin keamanan individu, negara tentunya membutuhkan media pertahanan dari serangan entitas politik serupa (negara lain). Dengan alasan inilah, negara memiliki kewenangan penuh atas media represif (militer)<sup>95</sup>. Negara memiliki kekuasaan untuk menggunakan media tersebut demi

---

<sup>92</sup> “States are the only important actors of international politics. ... . Thus, it’s primary research interests are the behaviour and motives of international actors – or, more precisely, of those legitimized foreign policy decision makers representing their state vis-à-vis other states.”, Reinhard Meyers, *Contemporary...*, hal.36, diakses dari, <http://www.uni-muenster.de/Politikwissenschaft/Doppeldiplom/docs/IRtheoryRM.pdf>, pada tanggal 24 November 2008

<sup>93</sup> “Thus, domestic politics have to serve the basic interest of securing the territorial and political integrity of an actor.”, Reinhard Meyers, *Contemporary...*, hal.37, diakses dari, <http://www.uni-muenster.de/Politikwissenschaft/Doppeldiplom/docs/IRtheoryRM.pdf>, pada tanggal 24 November 2008

“Political Realism presents the theoretical construct of a rational foreign policy which experience can never completely achieve.”, Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, 5<sup>th</sup> edition, Alfred A. Knopf, New York, 1978.

<sup>94</sup> “Due to the lack of an effective, legitimate higher authority superimposed upon the international actors, the international system is a self-help system.”, Reinhard Meyers, *Contemporary...*, hal.37, diakses dari, <http://www.uni-muenster.de/Politikwissenschaft/Doppeldiplom/docs/IRtheoryRM.pdf>, pada tanggal 24 November 2008

<sup>95</sup> “International relations are a zero-sum-game; improvements in the position of one actor cause corresponding deteriorations in the position of another or all other actors. The decisional mode of this game is conflict; military force serves implicitly or explicitly as a means of conflict regulation and conflict resolution.”, Reinhard Meyers, *Contemporary...*, hal. 37, diakses dari, <http://www.uni->

mempertahankan keutuhan wilayah teritorial dan individu yang berada di dalam batas kekuasaannya<sup>96</sup>.

Sayangnya, legitimasi kepemilikan dan penggunaan kapabilitas militer selalu membawa dua probabilitas aksi, yaitu aksi defensif dan aksi ofensif. Dengan demikian, selalu terdapat kemungkinan bagi negara untuk memproyeksikan kapabilitas militernya terhadap negara lain, walaupun negara tersebut bukan merupakan ancaman bagi negara pertama<sup>97</sup>. Pendek kata, negara selalu memiliki kemungkinan untuk menerapkan kebijakan agresif melalui proyeksi kapabilitas militernya<sup>98</sup>. Bahkan, justifikasi atas legitimasi kepemilikan dan penggunaan kapabilitas militer negara juga berdiri di atas klaim probabilitas aksi ofensif yang dapat dilakukan oleh negara lainnya<sup>99</sup>.

Untuk menjamin keamanan nasional, negara harus selalu mempersiapkan skenario terburuk (*worst-case scenario*), karena ‘perang’ merupakan konsekwensi

---

[muenster.de/Politikwissenschaft/Doppeldiplom/docs/IRtheoryRM.pdf](http://www.uni-muenster.de/Politikwissenschaft/Doppeldiplom/docs/IRtheoryRM.pdf), pada tanggal 24 November 2008

<sup>96</sup> “*Thus, domestic politics have to serve the basic interest of securing the territorial and political integrity of an actor.*”, Reinhard Meyers, *Contemporary...*, hal. 37, diakses dari, <http://www.uni-muenster.de/Politikwissenschaft/Doppeldiplom/docs/IRtheoryRM.pdf>, pada tanggal 24 November 2008

<sup>97</sup> “*By virtue of their gaining and exercising power, states can be confronted with irrational tension generating conflicts and wars – a notion marvelously explained by Morgenthau in his doctoral Thesis (Die Internationale Rechtse Flege Ihr Wesen und Ihre Grenzen) defended in 1929.*”, Ibrahim Can Sezgin, *Realism Reader*, hal.12, diakses dari, <http://www.juergen-bellers.de/dokumente/realism.pdf>, 24 November 2008

<sup>98</sup> “*...states worry about whether power in the hands of other states will be used to pose threats, and that all states use power to counter threats (...).*”, Sean M. Lynn-Jones, *Does Offense-Defense Theory Have A Future?*, Pidato yang disampaikan dalam Research Group in International Security, McGill University, Oktober 2000, hal. 13-14, diakses dari, [http://www.gersi.umontreal.ca/uploads/gersi\\_publications.filename/Lynn-Jones.pdf](http://www.gersi.umontreal.ca/uploads/gersi_publications.filename/Lynn-Jones.pdf), pada tanggal 1 April 2008

<sup>99</sup> “*All Realists agree that military security is the state’s prime responsibility and that relative military capacity ultimately depends on a state’s productive base. ... . All agree that defending the state from military threats takes first priority,*... “, Stephen G. Brooks, *Dueling Realisms*, International Organization, Vol.51 No.3, MIT Press, Summer 1997, hal. 446, diakses dari, [http://www.dartmouth.edu/~govt/docs/brooks\\_97io.pdf](http://www.dartmouth.edu/~govt/docs/brooks_97io.pdf), pada tanggal 1 April 2008

yang tak terhindarkan dalam sistem internasional yang anarkis<sup>100</sup>. Muncul pertanyaan, bagaimanakah karakteristik sistem internasional dalam perspektif realisme? Sehingga ‘perang’ merupakan hal yang tak terhindarkan di dalamnya? Dan, tidak adakah celah perdamaian dan kerjasama dalam sistem internasional menurut perspektif realisme?

## 2.1.2. Sistem Internasional yang Anarkis (*Anarchical International System*)

*“In the absence of government, there is no way for any man to secure himself, so reasonable, as anticipation.”*

(Thomas Hobbes, *Leviathan*, ch.13, 1986).

Absennya pemerintahan dunia (*world government*) merupakan lensa eksplanasi perspektif realisme tentang sistem internasional. Tidak ada kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan negara, karena tidak ada satupun negara yang berkenan untuk ‘mengakhiri’ independensi-nya demi membentuk sebuah pemerintahan dunia<sup>101</sup>. Hal inilah yang kemudian dipahami sebagai anarkisme sistem internasional, yaitu konstelasi negara-negara pada level internasional yang tidak mengenal hirarki.

Dari sisi kewenangan dan independensi, negara-negara merupakan unit yang sejajar (*equal units*)<sup>102</sup>. Hirarki hanya dapat ditemukan dalam konteks *power*, karena

---

<sup>100</sup> “... , war had always been a central feature of the international system, a frequently used and legitimate tool of statecraft, the last recourse for settling disputes, the ultimate basis for the power balancing that sustained the system and the members sovereign independence. ... . It was difficult to imagine international politics without war...”, Patrick M. Morgan, *Deterrence Now*, Cambridge University Press, 2003, hal. 5

<sup>101</sup> “For Realists, international anarchy fosters competition and conflict among states and inhibits their willingness to cooperate even when they share common interests.”, Joseph M. Grieco, *Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism*, International Organization, Vol.42 No.3, MIT Press, Summer 1988, hal. 485, diakses dari, <http://www.people.fas.harvard.edu/~plam/irnotes07/Grieco1988.pdf>, pada tanggal 1 Februari 2008

<sup>102</sup> “...each state is a separate, autonomous, and formally equal political unit that must count ultimately on its own resources to realizes its interests.”, Jack Donnelly, *Realism and International Relations*, Cambridge University Press, 2000, hal. 17



distribusi kekuasaan (*distribution of power*) dalam sistem internasional bersifat tidak merata (*uneven distribution*)<sup>103</sup>. Tidak adanya pemerintahan dunia yang mampu menjamin keamanan negara, mengindikasikan tidak adanya mekanisme hukum yang mampu memberikan sanksi terhadap negara-negara agresor. Dengan demikian, masing-masing negara harus membangun kapabilitasnya untuk ‘menolong’ diri sendiri dari berbagai ancaman yang sewaktu-waktu dapat dilancarkan oleh negara agresor, karena sistem internasional juga merupakan *self-help system*<sup>104</sup>.

Masih adakah kemungkinan terbentuknya kerjasama dan perdamaian dalam sistem internasional yang anarkis dan menuntut negara untuk menolong diri mereka sendiri (*self-help*)? realisme tidak menolak adanya kemungkinan kerjasama antar-negara, namun realisme menolak adanya kemungkinan terbentuknya perdamaian Kantian (*perpetual peace*)<sup>105</sup>. Tentunya, kerjasama antar-negara didasarkan pada kalkulasi strategis kepentingan nasional (*national interest*)<sup>106</sup>. Negara akan memutuskan untuk menjalin kerjasama dengan negara lainnya ketika kerjasama tersebut menguntungkan pihak mereka, dan sebaliknya.

Terkait dengan ‘perdamaian’, realisme memang menolak adanya perdamaian Kantian, namun ini bukan berarti bahwa konteks hubungan internasional selalu penuh

---

<sup>103</sup> Jack Donnelly, *op. cit.*, hal. 17

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> Kemungkinan kerjasama antar-negara dalam perspektif realisme diantaranya muncul sebagai implikasi langsung dari perkembangan teknologi, baik dalam bentuk teknologi persenjataan yang meningkatkan biaya aksi ofensif maupun berupa teknologi komunikasi yang meningkatkan kapasitas interaksi antar-negara (pembahasan lebih lanjut pada: Interdependensi serta Densitas Relasional). Kemungkinan kerjasama juga muncul dari tekanan sistem ekonomi internasional terhadap stabilitas perekonomian nasional. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah, bahwasanya terbentuknya kerjasama internasional dalam perspektif realisme masih menekankan signifikansi faktor material (*material factors*) sebagai landasan pembentuknya. Lihat: Stephen G. Brooks, *Dueling Realisms ...*, hal. 456, diakses dari, [http://www.dartmouth.edu/~govt/docs/brooks\\_97io.pdf](http://www.dartmouth.edu/~govt/docs/brooks_97io.pdf), pada tanggal 1 April 2008

dengan peperangan<sup>107</sup>. Sebaliknya, realisme memiliki konsepsi ‘perdamaian’-nya sendiri, sebuah konteks yang dipahami sebagai stabilitas sistem internasional<sup>108</sup>. Konteks ini memang tidak dapat disamakan dengan perdamaian Kantian (perdamaian positif) karena peperangan dan konflik masih merupakan ‘elemen lazim’ dalam stabilitas sistem internasional. ‘Perdamaian’ ala realis merupakan perdamaian negatif yang diindikasikan dengan rendahnya intensitas perang antar-negara.

‘Stabilitas’ merupakan ‘hal terbaik’ yang mampu diharapkan dari sistem internasional yang anarkis, karena perdamaian Kantian hanya mungkin terwujud dengan dua skenario radikal, yaitu, terwujudnya pemerintahan dunia – yang sulit untuk diwujudkan mengingat keengganan negara-negara untuk menyerahkan kewenangan mereka pada sebuah badan supranasional (*supranational entity*) – atau perubahan orientasi kepentingan negara, dari kepentingan nasional (*national interest*) dan keinginan untuk bertahan (*will to survive*), menuju pencapaian kepentingan global (*global interest*) – yang sulit untuk diwujudkan mengingat nihilnya kepercayaan absolut (*absolute trust*) dalam relasi antar-negara<sup>109</sup>.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, perang dan konflik adalah dua konsekwensi yang tak terhindarkan dari anarkisme sistem internasional, sehingga apa yang bisa dilakukan hanyalah mengurangi intensitas atau meminimalisir dampaknya.

---

<sup>107</sup> “*International relations is not a constant state of war, but is a state of relentless security competition.*”, Stephen G. Brooks, *Dueling Realisms...*, hal. 447, diakses dari, [http://www.dartmouth.edu/~govt/docs/brooks\\_97io.pdf](http://www.dartmouth.edu/~govt/docs/brooks_97io.pdf), pada tanggal 1 April 2008

<sup>108</sup> “...*beyond the territory of nation-state lay the international sphere where the highest ethical aim was peaceful co-existence and progress was not possible beyond cycles marked by shifting balances of power. ... . . . , this crude distinction that marked out the international as a strategic sphere of interaction, of power politics and self-help.*”, David Chandler, *After the Interregnum: Sovereignty and International Relations in Flux*, Paper yang disajikan di hadapan Centre for Defence Studies, Kings College, London, April 2004, hal. 2, diakses dari, <http://www.wmin.ac.uk/ssh/pdf/TheInterregnumPDF.pdf>, pada tanggal 3 Maret 2008

<sup>109</sup> “*Realists understand that states seek absolute gains and worry about compliance. However, Realists find that states are positional, not atomistic, in character, and therefore Realists argue that, in addition to concerns about cheating, states in cooperative arrangements also worry that their partners might gain more from cooperation than they do.*”, Joseph M. Grieco, *Anarchy...*, hal. 487, diakses dari, <http://www.people.fas.harvard.edu/~plam/irnotes07/Grieco1988.pdf>, pada tanggal 1 Februari 2008

Menghapuskan peperangan atau konflik antar-negara merupakan hal yang sangat sulit – jika tidak dapat dikatakan mustahil – untuk dilakukan.

### 2.1.3. Negara Sebagai Aktor Pencari *Power* dan Keamanan (*State as Power-seeking and Security-seeking Actor*)

Pilar ketiga ini merupakan konsekuensi langsung dari pilar pertama (*state-sentrisme*) dan pilar kedua (anarkisme sistem internasional). Ketika sebuah negara dihadapkan dengan ancaman keamanan yang berkelanjutan dari negara lain, sementara ia (negara) juga berada dalam balutan sistem yang minus ‘pemimpin’ (*world government*), yang mampu memberinya jaminan perlindungan, maka akan menjadi sangat wajar jika negara menjadi aktor pencari kekuasaan (*power-seeking*) dan pencari keamanan (*security-seeking*)<sup>110</sup>.

Faktanya, ‘keamanan’ memang selalu menempati posisi utama dalam skala prioritas kebijakan nasional sebuah negara<sup>111</sup>. Dan *power* (dalam berbagai bentuknya) selalu menjadi motivasi utama di balik berbagai kebijakan yang diambil oleh negara<sup>112</sup>. Keamanan merupakan sebuah kondisi ‘kepastian’ (*certainty*) dan ‘perlindungan’ (*protection*) yang diberikan oleh negara kepada warganya. Jaminan tersebut dapat dirujuk kembali sebagai ‘harga’ yang harus dibayarkan oleh negara kepada individu, atas sebagian independensi individu yang diberikannya kepada negara pada tahap awal pembentukan negara<sup>113</sup>.

---

<sup>110</sup> “..., *states in anarchy are preoccupied with power and security, are predisposed towards conflict and competition, and often fail to cooperate even in the face of common interests.*”, Joseph M. Grieco, *Anarchy...*, hal. 488, diakses dari, <http://www.people.fas.harvard.edu/~plam/irnotes07/Grieco1988.pdf>, pada tanggal 1 Februari 2008

<sup>111</sup> Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde, *op. cit.*, hal. 49

<sup>112</sup> Hans J. Morgenthau, *op. cit.*, hal. 9

<sup>113</sup> “*Governments cannot create communities for the simple reason that government is not primarily the authority of law nor the authority of force, but the authority of the community itself. Laws are obeyed because the community accepts them as corresponding, on the whole, to its conception of*

‘Keamanan’ merupakan fungsi utama yang harus dipenuhi negara. Jika pada suatu waktu negara tidak lagi mampu menjalankan fungsi tersebut secara keseluruhan, maka fondasi pembentuknya telah runtuh, justifikasi bagi eksistensinya tidak dapat lagi dipertahankan. Tanpa kemampuan untuk mewujudkan ‘keamanan’, negara tidak memiliki legitimasi untuk tetap eksis<sup>114</sup>.

Sementara itu, *power* merupakan elemen penting lain yang harus dimiliki dan dipertahankan oleh negara dalam upayanya untuk bertahan di tengah anarkisme sistem internasional. Secara garis besar, *power* dipahami sebagai kemampuan untuk mempengaruhi arah kebijakan negara lain, sehingga kebijakan tersebut akan sesuai atau mendukung kepentingan nasional negara pertama<sup>115</sup>. Mengapa *power* dapat menjamin survivabilitas negara di tengah anarkisme sistem internasional?

*Power*, dalam berbagai bentuknya (militer, politik, ekonomi, dan kultur / budaya) paling tidak, memungkinkan negara untuk melakukan tiga pola tindakan. Pertama, pola deterrens<sup>116</sup>. Pola tindakan ini terutama berlaku untuk kepemilikan kapabilitas militer. Ketika sebuah negara memiliki kapabilitas militer yang tangguh dan relatif *superior*, maka performa kapabilitas tersebut secara langsung akan mempengaruhi niatan (*intention*) negara lain untuk melakukan tindakan ofensif terhadapnya (negara dengan kapabilitas militer tangguh). Paling tidak, negara agresor akan mempertimbangkan kembali rencana aksi ofensifnya. Kapabilitas militer yang tangguh akan membuat negara lain kembali mengkalkulasikan sumber daya yang

---

*justice.*”, Ibrahim Can Sezgin, *Realism Reader ...*, hal. 11, diakses dari, <http://www.juergens-bellers.de/dokumente/realism.pdf>, pada tanggal 24 November 2008

<sup>114</sup> Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde, *op. cit.*, hal. 49-50

<sup>115</sup> “*In the classic sense, power is the ability to get someone to do something that they otherwise would not do (Morgenthau, 1978; Keohane & Nye, 2001). ... . The traditional understanding of power views it as a means to an end...*”, Sean Kay, *Globalization, Power, and Security*, Security Dialogue, Vol.35 No.1, Sage Publications, 2004, hal. 14, diakses dari, <http://www.comw.org/pda/fulltext/0403kay.pdf>, pada tanggal 17 Januari 2008

<sup>116</sup> Patrick M. Morgan, *op. cit.*, hal. 1

harus ia libatkan (*cost*) serta membandingkannya dengan kemenangan (*benefit*) yang masih berada dalam skala kemungkinan (*probability / uncertain benefit*).

Kedua, pola tindakan opresif. Pola tindakan ini merupakan refleksi definitif dari konsep *power* itu sendiri. sebuah negara yang memiliki kapabilitas *power* sangat besar akan dengan mudah mempengaruhi kebijakan pemerintah negara lainnya<sup>117</sup>. Pola tindakan ini seringkali terlihat dalam relasi ekonomi bilateral, di mana negara pemberi hutang (debitor) akan menerapkan prasyarat-prasyarat khusus kepada negara penerima hutang (kreditor). Prasyarat tersebut seringkali berbentuk intervensi terhadap pola kebijakan nasional negara kreditor, seperti prasyarat pembukaan jalur perdagangan yang lebih luas (liberalisasi dagang), penghapusan pajak impor (*import tax*), dan sebagainya.

Pola tindakan ketiga akan berlaku di tataran internasional dan cenderung diproyeksikan oleh negara-negara *major power*, dengan kepemilikan *power* di berbagai lini (militer, ekonomi, politik, kultural). Pola tindakan ini adalah upaya intervensi terhadap konstelasi politik internasional<sup>118</sup>. Negara-negara *major power* tidak hanya mampu untuk mempengaruhi satu atau beberapa negara lainnya dalam relasi bilateral maupun multilateral. Lebih dari itu, negara *major power* mampu membentuk situasi tertentu dalam konteks politik internasional, sehingga kondisi yang terbentuk akan kondusif terhadap kepentingan nasional negara-negara terkait. Salah satu contoh klasik pola tindakan ini adalah, penggunaan hak veto (*veto right*) di kalangan negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB (*permanent members*

---

<sup>117</sup> "...states may pursue a policy of prestige. ... . Its objective is to impress other nations with the power one's own nation actually possesses, or with the power it believes, or wants other nations to believe, it possesses.", Ibrahim Can Sezgin, *Realism Reader ...* , hal. 14, diakses dari, <http://www.juergen-bellers.de/dokumente/realism.pdf>, pada tanggal 24 November 2008

<sup>118</sup> "States remained autonomous in setting foreign policy goals; they retained the loyalty of government officials active in 'transgovernmental network'; and they recast the terms of their relationships with such seemingly powerful transnational actors as high-technology multinational corporations. ... . International institutions appeared to be unable to reshape state interests.", Joseph M. Grieco, *Anarchy...* , hal. 490-491, diakses dari, <http://www.people.fas.harvard.edu/~plam/irnotes07/Grieco1988.pdf>, pada tanggal 1 Februari 2008

*of Security Council*) yang seringkali merefleksikan kepentingan nasional mereka di ranah hubungan internasional.

Dengan demikian, signifikansi ‘keamanan’ bagi legitimasi eksistensi negara, dan signifikansi ‘*power*’ bagi survivabilitas negara dalam ranah hubungan internasional, merupakan alasan utama terkait pentingnya perwujudan kedua konsep tersebut bagi negara. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan, mengapa negara – terlepas dari apapun kondisi domestiknya – akan selalu menjadi aktor pencari kekuasaan dan keamanan di dalam anarkisme sistem internasional, menurut perspektif realisme.

## **2.2. Karakteristik Hubungan Internasional Masa Perang Dingin** (*Properties of The Cold War*)

### **2.2.1. Bipolaritas** (*Bipolarity*)

Bipolar merupakan salah satu pola distribusi kekuatan (*distribution of power*) di antara negara-negara dalam sistem internasional yang anarkis. Pola distribusi kekuatan bipolar bertumpu pada dua negara besar yang menjadi kutub utama kekuatan (*poles*), dan berfungsi sebagai stabilisator bagi kesenjangan distribusi kekuatan dalam sistem internasional<sup>119</sup>.

Tentunya, kedua kutub kekuatan tersebut membawahi sejumlah negara lemah dan negara dengan kekuatan menengah (*low and middle-power states*), yang bersedia untuk men-subordinasi-kan ‘diri’nya (kepada salah satu kutub / *major-power states*)

---

<sup>119</sup> “... *emphasis on a single endogenous factor as affecting the likelihood of conflict; the balance of military capabilities. Aggression is seen as less likely when states balance the capabilities of potential aggressors.*”, Stephen G. Brooks, *Dueling Realisms ...*, hal. 455-456, diakses dari, [http://www.dartmouth.edu/~govt/docs/brooks\\_97io.pdf](http://www.dartmouth.edu/~govt/docs/brooks_97io.pdf), pada tanggal 1 April 2008

demi mendapatkan payung perlindungan dan jaminan keamanan dari ancaman kutub lainnya<sup>120</sup>.

Dinamika politik internasional dalam pola bipolar direfleksikan melalui perubahan komposisi keanggotaan 'aliansi' masing-masing kutub yang bersifat sangat cair<sup>121</sup>. Hubungan aliansi yang terbangun di dalamnya (kutub kekuatan) benar-benar bersifat sementara. Ketika salah satu anggota aliansi kutub A memindahkan keanggotaannya kepada aliansi kutub B, maka tak lama kemudian, kutub A akan berupaya menarik salah satu anggota kutub B, atau salah satu negara netral (negara-negara yang belum tercakup dalam kutub manapun) untuk masuk ke dalam kubunya.

Intinya, masing-masing kutub akan berupaya keras untuk mengalahkan dominasi kutub lainnya, yang kemudian akan direspon dengan tindakan yang sama (oleh kubu lainnya). Sehingga, keseimbangan kekuatan (*balance of power*) selalu muncul sebagai implikasi tidak langsung dari persaingan kedua kubu<sup>122</sup>. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah kecenderungan negara-negara subordinat (negara anggota sebuah kubu kekuatan, bukan *major-power state* yang memimpin kubu tersebut) dalam memilih kubu kekuatan yang akan jadi sandarannya. Negara-negara subordinat akan cenderung 'menyeimbang'kan distribusi kekuatan di antara dua

---

<sup>120</sup> John J. Mearsheimer, *op. cit.*, hal. 46

<sup>121</sup> "... intentions are impossible to divine with 100 percent certainty, and the possibility always exists that a state's intentions can be benign one day and malign the next.", Stephen G. Brooks, *Dueling Realisms ...*, hal. 448, diakses dari, [http://www.dartmouth.edu/~govt/docs/brooks\\_97io.pdf](http://www.dartmouth.edu/~govt/docs/brooks_97io.pdf), pada tanggal 1 April 2008

<sup>122</sup> "... international political system has peculiar functional requirements that can be described apart from the domestic or individual system (survival via self-help). The tendency of this analytical system to comprise recurrent balances is how systemic forces work to maintain themselves – how in essence, anarchy does not give way to hierarchy (...)", Stacie E. Goddard dan Daniel H. Nexon, *Paradigm Lost? Reassessing Theory of International Politics*, European Journal of International Relations, Vol.11 No. 1, Sage Publications, 2005, hal. 24, diakses dari, <http://www.explore.georgetown.edu/publications/13005>, pada tanggal 12 Januari 2008

kubu, daripada langsung memihak salah satu kubu yang dipandang lebih kuat (*balancing not bandwagoning*)<sup>123</sup>.

Dalam konteks Perang Dingin, bipolaritas terlihat dengan cukup jelas pada persaingan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Keduanya merepresentasikan kutub-kutub kekuatan yang tidak hanya berbeda, namun juga berlawanan. Keduanya memiliki level kapabilitas militer dan politik yang cukup besar untuk dapat disebut sebagai *major power state*. Akuisisi senjata nuklir, merupakan titik puncak teror (*balance of terror*) yang mampu menyebarkan ketakutan akan terjadinya Perang Thermo-Nuklir (*Thermo-Nuclear War*) di antara kedua kubu kekuatan. Lebih jauh, Amerika Serikat dan Uni Soviet juga terlibat dalam sebuah persaingan ekspansi pengaruh ideologis terhadap negara-negara di kawasan benua lainnya.

Kehadiran kultur bipolar pada masa Perang Dingin memberikan manfaat tersendiri<sup>124</sup>. Stabilitas yang menjadi konsekuensi tidak langsung dari persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet telah meredam tensi konflik yang terjadi di antara negara-negara lainnya. Kalaupun masih terdapat beberapa peristiwa konflik bersenjata, maka konflik tersebut merupakan representasi dari ketegangan yang memuncak di antara Amerika Serikat dan Uni Soviet (*war by proxy*). Bahkan, John Lewis Gaddis mengutarakan konteks stabilitas sistem internasional di masa Perang Dingin sebagai masa perdamaian yang panjang (*the long peace*).

Istilah yang digunakan oleh Gaddis untuk menyebut konteks stabilitas sistem internasional masa Perang Dingin menyiratkan sedikit makna positif yang mereduksi makna negatif dominasi kedua negara terhadap negara-negara lainnya. Paling tidak, probabilitas terjadinya konflik antar-negara akan menurun, karena aksi agresif sekecil apapun dapat memicu dimulainya Perang Nuklir.

---

<sup>123</sup> "... states are more likely to achieve a balance of power rather than increase their power and therefore there are states which are in power and states which are not in power, ...", Ibrahim Can Sezgin, *Realism Reader ...*, hal. 15, diakses dari, <http://www.juergen-bellers.de/dokumente/realism.pdf>, pada tanggal 24 November 2008

<sup>124</sup> John J. Mearsheimer, *op. cit.*, hal. 46



## 2.2.2. Ancaman Nuklir (*Nuclear Threats*)

Salah satu landasan pembentuk kutub kekuatan di masa bipolar adalah kepemilikan senjata nuklir oleh negara besar (*major power states*) yang menjadi penjamin keamanan negara-negara dalam kubunya<sup>125</sup>. Efek merusak yang dihasilkan oleh senjata nuklir memicu timbulnya fenomena ketakutan tersendiri yang mampu mempengaruhi kalkulasi strategis negara-negara agresor (negara dengan pola tindakan ofensif dan ekspansionis) sebagai sumber instabilitas politik internasional.

Senjata nuklir merupakan senjata dengan efek destruktif terbesar yang pernah ditemukan<sup>126</sup>. Ledakan senjata nuklir dihasilkan dari reaksi fusi yang berjalan secara terus-menerus. Bahan tambang bernama Uranium merupakan material utama yang dibutuhkan dalam pembuatan senjata nuklir. Melalui proses pengayaan (*Uranium enriching process*), sebongkah Uranium yang pada awalnya merupakan material yang tak berbahaya dapat berubah menjadi Senjata Pemusnah Massal (*Weapon of Mass Destruction / WMD*) dengan efek katastrofik yang tak terhindarkan.

Tidak seperti senjata konvensional, senjata nuklir juga memiliki dua implikasi berbahaya. Ledakan senjata nuklir memiliki kapabilitas yang bahkan lebih mematikan dari bom konvensional manapun. Sementara itu, efek radiasi nuklir (pasca-ledakan) mampu menyebabkan transformasi genetik pada makhluk hidup di sekitar wilayah ledakan, dan baru dapat dinetralisir setelah beberapa dekade. Lebih jauh, radiasi nuklir dapat mencemari elemen udara, tanah, dan air tanah di sekitar wilayah ledakan,

---

<sup>125</sup> John J. Mearsheimer, *op. cit.*, hal. 48

<sup>126</sup> Setidaknya, terdapat tiga klasifikasi ledakan (*blast*) yang muncul dari penggunaan senjata nuklir, yaitu, Ledakan Nuklir (*Nuclear Blast*), ledakan utama dan pertama yang muncul pada saat senjata nuklir digunakan serta mengenai target ledakan (*ground zero*); Ledakan Radiasi Panas (*Thermal Radiation Blast*), ledakan udara panas yang menyebar setelah ledakan nuklir, umumnya menjangkau wilayah yang lebih luas dari *ground zero*; dan Ledakan Api (*Fire Blast*), muncul sebagai konsekuensi dari gesekan udara panas nuklir dengan udara di sekitarnya, sehingga menyebabkan bencana kebakaran yang sangat luas. Lihat : Lynn Eden, *Whole World On Fire: Organizations, Knowledge, and Nuclear Weapons Devastation*, Cornell University Press, Ithaca, 2004, hal. 1-3

sehingga (selain korban langsung) masih terdapat kemungkinan jatuhnya korban tak langsung sebagai akibat dari radiasi nuklir.

Ditemukannya senjata nuklir, merupakan hal negatif yang patut disyukuri. Efek destruktif yang masif dan berkelanjutan, serta skala kehancuran yang sangat luas menyebabkan senjata nuklir menjadi salah satu faktor pemicu perubahan pola peperangan antar-negara<sup>127</sup>. Bagi negara yang memiliki senjata nuklir, efek deterens akan bekerja dengan cukup efektif untuk mempermudah jalan mereka dalam mewujudkan kepentingan nasional. Dan efek deterens inilah yang sebenarnya bermain sebagai landasan stabilitas sistem internasional pada masa Perang Dingin.

### **2.2.3. Pembauran Studi Keamanan Dengan Studi Strategis (*Security Studies as Strategic Studies*)**

*State-sentrisme*, anarkisme sistem internasional, dan peran negara sebagai pencari-kekuatan dan keamanan (ontologi realisme), dipertemukan dengan konteks Perang Dingin yang sangat kondusif bagi terbentuknya sistem internasional yang militeristik. Ancaman terbesar dan terkonkrit yang ada pada masa Perang Dingin adalah ancaman perang nuklir. Stabilitas sistem internasional pada masa itu sangat tergantung kepada kalkulasi strategis keseimbangan kekuatan aliansi dan jumlah keanggotaan di dalamnya. Perhatian dan fokus kebijakan sebagian besar negara di dunia terserap habis untuk menjaga perimbangan kekuatan. Pun demikian, fokus kebijakan luar negeri kedua negara *superpower* dituangkan dalam bentuk persaingan ekspansi ideologis dan rekrutmen negara-negara subordinat.

Negara, merupakan entitas terkuat yang dapat melindungi individu pada masa Perang Dingin, karena negara adalah satu-satunya entitas yang mampu dan dimungkinkan untuk memiliki kapabilitas represif, yaitu armada militer, dan karena

---

<sup>127</sup> John J. Mearsheimer, *op. cit.*, hal. 48

ancaman terkonkrit yang muncul pada waktu itu adalah ancaman yang bersifat militeristik. Kapabilitas negara dan jenis ancaman yang muncul, memperkuat aroma militeristik di dalam tubuh studi keamanan. Sedangkan, anarkisme sistem internasional menjadi klaim utama bagi negara untuk menolak adanya interdependensi keamanan antar-negara dan adanya probabilitas kerjasama di antara mereka.

Pada titik inilah, studi keamanan tradisional (studi keamanan masa Perang Dingin) ter-reduksi menjadi studi strategis. Apa perbedaan di antara studi keamanan dan studi strategis? Dalam konteks apa keduanya saling berkaitan? Dan apa konsekuensi peleburan batas antara studi keamanan dan studi strategis dalam Ilmu Hubungan Internasional?

Secara definitif, studi keamanan merupakan studi tentang upaya stabilisasi relasi antar-unit yang bersifat konfliktual atau saling mengancam, di mana upaya stabilisasi tersebut seringkali harus melibatkan mobilisasi oleh negara<sup>128</sup>. Di sisi lain, studi strategis merupakan kajian tentang upaya-upaya militeristik dalam mewujudkan dan menjaga stabilitas sistem internasional<sup>129</sup>.

Studi keamanan tentunya memiliki definisi yang lebih luas daripada studi strategis, karena relasi yang bersifat konfliktual dan saling mengancam tidak hanya dapat terjadi dalam konteks relasi antar-negara, melainkan dalam relasi negara-individu, negara dengan negara, sekelompok negara dengan kelompok negara lainnya (antar-kawasan), atau negara dengan rezim internasional<sup>130</sup>. Sedangkan studi strategis hanya mencakup upaya stabilisasi relasi konfliktual dan saling mengancam antar-negara, karena domain kapabilitas militeristik merupakan wilayah kajian yang secara (hampir) eksklusif dimiliki oleh negara<sup>131</sup>.

---

<sup>128</sup> Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde, *op. cit.*, hal. 4

<sup>129</sup> Barry Buzan, *op. cit.*, hal. 11

<sup>130</sup> *Ibid.*

<sup>131</sup> *Ibid.*

Peleburan studi keamanan dengan studi strategis pada masa Perang Dingin secara langsung telah mempengaruhi obyek kajian studi keamanan itu sendiri, dan membatasi perdebatannya hanya dalam lingkup strategi militer. Studi keamanan bersifat sangat praktis, dan menjalankan peran preskriptif bagi pembentukan kebijakan luar negeri negara-negara, terutama di bidang *power politics*. Isyu-isyu non-militer (seperti krisis ekonomi dan degradasi lingkungan) sama sekali tidak mendapat tempat di dalam studi keamanan masa Perang Dingin.

Dari perspektif ini, studi keamanan merupakan 'pihak yang dirugikan' karena reduksi tersebut berbuah stagnasi yang cukup menyedihkan dalam ruang-ruang isyu dan kajian keamanan<sup>132</sup>. Sebaliknya, dari sudut pandang yang sedikit berbeda, reduksi studi keamanan ke dalam ranah kajian strategis selama Perang Dingin berlangsung, merupakan hal yang wajar untuk terjadi.

Eksplanasinya terletak pada konsep 'keamanan' (*the nature of security*) itu sendiri. 'Keamanan' akan terwujud jika 'ancaman' telah berhasil diakhiri (paling tidak, di-minimalisir), maka eksistensi 'ancaman' adalah sama pentingnya dengan harapan akan terwujudnya 'keamanan'. Dengan kata lain, ancaman yang dipandang paling konkrit akan mendominasi kajian keamanan pada saat itu.

Pada masa Perang Dingin, ancaman militeristik merupakan hal yang nyata. Tak ada satupun negara yang melepaskan perhatiannya dari dinamika intensitas konflik Blok Barat dan Blok Timur. Walaupun efek deterens turut bermain, namun rendahnya kerjasama di antara kedua kubu yang bertikai membuat probabilitas serangan nuklir masih terbuka lebar. Dengan demikian, wajar jika konsentrasi kajian keamanan terserap pada ranah militeristik, bukan karena leburnya garis perbedaan antara studi keamanan dan studi strategis, melainkan lebih karena konteks Perang Dingin memang mendukung eksistensi ancaman militeristik di atas ancaman keamanan dari sektor lainnya (sosietal, ekonomi, dll).

---

<sup>132</sup> *Ibid.*

## 2.3. Karakteristik Hubungan Internasional Pasca-Perang Dingin (*Post-Cold War Properties*)

Berakhirnya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet mengindikasikan krisis ekstra-saintifik (*extra-scientific crisis*) dalam perkembangan studi keamanan perspektif realisme. Munculnya ancaman non-tradisional, meningkatnya densitas dan interdependensi relasional antar-negara, dan munculnya kepedulian serta fokus terhadap norma-norma, nilai, dan dimensi identitas dalam politik internasional, telah menyuguhkan realitas ancaman yang berbeda, dan dengan demikian, kembali memperluas ruang lingkup kajian keamanan, untuk beranjak dari fokus militeristik-nya di masa Perang Dingin.

Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah, bahwasanya beranjaknya fokus kajian keamanan masa Perang Dingin menuju fokus kajian keamanan pasca-Perang Dingin tidak mengindikasikan irelevansi basis ontologi realisme (*state-sentrisme*, anarkisme sistem internasional, dan negara sebagai aktor pencari-kekuasaan dan pencari-keamanan).

Porsi peranan terbesar (entah sebagai objek rujukan, aktor pen-sekuritisasi, atau aktor fungsional) tetap dimainkan oleh negara (*state-sentrisme*). Pemerintahan dunia masih terbukti belum dapat diwujudkan (anarkisme sistem internasional), dan *self-help system* masih berlanjut walaupun dengan implikasi yang sedikit berbeda – jika sebelumnya *self-help system* benar-benar dimaknai sebagai individualisme negara, maka pada pasca-Perang Dingin dilema aksi kolektif (*collective action dilemma*) dapat sedikit teratasi<sup>133</sup>.

Pada akhirnya, konteks hubungan internasional pasca-Perang Dingin tidak mengindikasikan tata internasional baru sebagaimana yang diyakini oleh arus pemikiran pergeseran paradigma (*paradigm shift*), melainkan hanya menghadirkan

---

<sup>133</sup> *Ibid.*

kembali sektor-sektor problematika usang yang dulu sempat terkucilkan dengan adanya krisis besar di salah satu sektor permasalahan yang sempat menjadi dominan.

### 2.3.1. Ancaman Non-Tradisional (*Non-Traditional Threat*)

Bukti keusangan sektor-sektor permasalahan yang menjadi fokus kajian keamanan kontemporer akan kita peroleh melalui analisa terhadap salah satu karakteristik hubungan internasional pasca-Perang Dingin yang paling menonjol, yaitu, munculnya ancaman non-tradisional. Apakah ancaman non-tradisional benar-benar merupakan ‘produk’ pasca-Perang Dingin? Dan apakah eksistensi ancaman-ancaman tersebut menyebabkan *state*-sentrisme serta anarkisme sistem internasional kehilangan relevansinya dalam kajian keamanan kontemporer? Itulah pertanyaan yang akan diidentifikasi pada bagian ini.

Ancaman non-tradisional pertama berasal dari sektor lingkungan. Konsumsi bahan bakar karbon (*carbon fuels*), tumpukan sampah penghasil Metana, dan sederetan substansi kimia lain yang dihasilkan dari aktifitas keseharian manusia, telah menyebabkan timbulnya lubang pada lapisan Ozon, yang pada gilirannya membuat sinar Ultraviolet tak lagi terbandung menuju Bumi<sup>134</sup>.

Selain itu, panas matahari yang seharusnya kembali ke angkasa - setelah bertugas menghangatkan permukaan Bumi - tak mampu menembus ‘kubah kaca Emisi Karbon’ yang melingkupi Bumi<sup>135</sup>. Akhirnya, suhu permukaan Bumi

---

<sup>134</sup> “*Mankind’s activities have increased carbon dioxide (CO<sub>2</sub>) in the atmosphere. This increase has the potential to warm the earth’s climate by the ‘greenhouse effect’ in which CO<sub>2</sub> absorbs infrared radiation and then re-radiates it back to the surface of the planet. Other gases also act as greenhouse gases and may warm the climate even further. Computational models that include these factors predict that the climate will warm significantly over the next century*”, Steinar Andresen, *The Development of the Climate Regime: Positions, Evaluation and Lessons*, Januari 1998, hal. 1, diakses dari, <http://www.geic.or.jp/interlinkages/docs/Andresen.PDF>, pada tanggal 12 Januari 2008

<sup>135</sup> Sebenarnya, eksistensi gas rumah kaca di lapisan atmosfer bumi merupakan hal yang alamiah, karena kehidupan para makhluk bumi – pada tataran tertentu – memang tergantung kepada sejumlah gas rumah kaca di atmosfer yang menjaga iklim bumi agar tetap hangat. Hanya jumlah gas rumah kaca

mengalami peningkatan beberapa derajat Celsius, lapisan es di kutub mulai mencair, dan anomali iklim datang menghampiri. Di sisi lain, degradasi lingkungan bukanlah satu-satunya ancaman keamanan yang dirasakan keberadaannya, kepadatan penduduk bumi (*overpopulation*), krisis Keanekaragaman Hayati (*crisis of biodiversity*), dan beberapa varian krisis lingkungan lainnya mulai menampakkan 'taringnya'<sup>136</sup>.

Ancaman-ancaman tersebut tidak datang tanpa adanya 'pemberitahuan' terlebih dulu. Organisasi Meteorologi Dunia (*World Meteorological Organisation/WMO*) - sebuah badan riset meteorologi yang berada di bawah otoritas PBB – mengadakan pertemuan berskala global pertama yang memfokuskan bahasannya kepada mitigasi perubahan iklim. Pertemuan yang diadakan di Jenewa pada tahun 1979 itu disebut sebagai Konferensi Iklim Dunia (*World Climate Conference*)<sup>137</sup>. Konferensi tersebut menunjukkan adanya prediksi dan kesadaran negara-negara akan hadirnya ancaman keamanan baru yang berasal dari dimensi ekologis. Walaupun kemudian isu keamanan lingkungan tenggelam dalam popularitas isu ancaman perang nuklir pada masa Perang Dingin.

Ancaman non-tradisional kedua muncul dari sektor ekonomi. Seperti halnya isu keamanan lingkungan, ancaman ekonomi bukan merupakan hal baru yang muncul sebagai produk pasca-Perang Dingin. Pada dekade 1970an terdapat kekhawatiran yang merebak akan melemahnya konteks perekonomian Amerika Serikat dan kaitannya dengan peran sebagai hegemon (*hegemonic decline*) yang dijalankan Amerika Serikat pada level politik internasional<sup>138</sup>.

---

dalam skala besar yang akan menyebabkan peningkatan suhu muka bumi. Lihat: Patrick Mazza dan Rhys Roth, *Global Warming Is Here: The Scientific Evidence*, The Atmosphere Alliance Special Report, Maret 1999.

<sup>136</sup> Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde, *op. cit.*, hal. 74-75

<sup>137</sup> "Also in 1979, the World Meteorological Organization (WMO) summoned the first World Climate Conference in Geneva. (...) The declaration from the conference recognized a 'clear possibility that ...anthropogenic increases in carbon dioxide may result in significant and possibly major long-term changes of the global-scale climate'." , Steinar Andresen, *The Development of The Climate Regime ...*, diakses dari, <http://www.geic.or.jp/interlinkages/docs/Andresen.PDF>, pada tanggal 12 Januari 2008

<sup>138</sup> Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde, *op. cit.*, hal. 97

Ancaman penurunan kapabilitas Amerika Serikat itu berakar dari isu krisis energi di tataran global dan ketergantungan Amerika terhadap impor minyak yang sangat tinggi, tekanan nilai mata uang lain terhadap Dolar, dan defisit neraca perdagangan yang dialami oleh Amerika Serikat secara berkelanjutan<sup>139</sup>. Lagi-lagi, isu keamanan ekonomi kemudian berada dalam bayang-bayang fokus stabilitas perimbangan kekuatan di masa Perang Dingin.

Ancaman non-tradisional terakhir muncul dari sektor sosial. Problematika sosial sebenarnya juga bukan fenomena baru yang muncul pada dekade 1990an, melainkan sebuah permasalahan usang yang dapat dirujuk asal-muasalnya sampai pada era Kolonisasi. Tidak seperti kedua ancaman non-tradisional sebelumnya yang dimulai dengan sebuah kekhawatiran global, ancaman keamanan sosial merupakan isu yang berada pada tataran domestik, namun kemudian merebak dan bertransformasi menjadi gerakan global menyusul berakhirnya Perang Dingin.

Gerakan-gerakan etnis kebangsaan (seperti, gerakan Tamil di Srilanka, Bahais di Iran, serta gerakan etnis Kurdi di Turki, Irak, dan Iran, dll) sebenarnya telah muncul dalam bentuk perlawanan-perlawanan kecil ketika Kolonialisasi dimulai. Entah sebagai bentuk perlawanan penduduk asli terhadap penjajah asing, maupun sebagai bentuk ketidaksepakatan atas penarikan garis batas teritorial negara yang tidak mempertimbangkan wilayah kekuasaan tradisional yang dimiliki oleh etnis-etnis tersebut<sup>140</sup>.

Berakhirnya Perang Dingin berarti melonggarnya kontrol negara-negara *superpower* terhadap wilayah pengaruhnya (*spheres of influence*) yang secara langsung akan memberikan ruang gerak bagi gerakan-gerakan independensi baru dengan tuntutan kepemilikan wilayah kekuasaan sendiri. Momentum keruntuhan Tembok Berlin telah dipergunakan oleh sebagian gerakan kebangsaan untuk mencoba

---

<sup>139</sup> *Ibid.*

<sup>140</sup> Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde, *op. cit.*, hal. 119



meraih kedaulatannya sekaligus mengalihkan perhatian dunia dari politik strategis antar-negara yang menjadi fokus perhatian masa Perang Dingin<sup>141</sup>.

Ketiga ancaman non-tradisional ini merepresentasikan tiga problematika usang yang sebenarnya telah muncul sebelum atau semasa Perang Dingin berlangsung. Sayangnya, fokus militeristik dan teror perang nuklir yang begitu terasa nyata telah menutup eksistensi ketiganya dari perhatian dunia dan kebijakan negara-negara. Sehingga, berakhirnya Perang Dingin dengan sendirinya menggeser fokus perhatian dunia dari dinamika intensitas konflik antar-*superpower* dan mengalihkannya pada eksistensi ketiga ancaman non-tradisional tersebut<sup>142</sup>.

### **2.3.2. Peningkatan Densitas Relasional dan Interdependensi Antar-Negara** (*Raising Density / Deeper Interdependence*)

Jika pada masa Perang Dingin konsepsi *self-help system* dipahami sebagai individualisme negara, dan kerjasama hanya mungkin untuk diwujudkan dalam bentuk aliansi temporer. Maka, setelah Perang Dingin berakhir dilema aksi kolektif mulai dapat dikurangi dalam relasi antar-negara. Perkembangan ini terutama dipicu oleh longgarnya ikatan aliansi di dalam keanggotaan masing-masing Blok yang bertikai. Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet terpecah-belah secara total, sementara NATO – sebagai representasi aliansi Blok Barat – telah kehilangan sebagian besar relevansi dan legitimasi fungsional-nya, seiring dengan runtuhnya Pakta Warsawa.

Fokus pertumbuhan ekonomi yang menjadi salah satu prioritas utama kebijakan nasional negara-negara pada masa pasca-Perang Dingin juga turut memperkuat kecenderungan kerjasama antar-negara. Manfaat kerjasama ekonomi

---

<sup>141</sup> *Ibid.*

<sup>142</sup> *Ibid.*

melalui liberalisasi dagang, serta spesialisasi komoditas perdagangan masing-masing negara yang semakin rigid, membuat kerjasama ekonomi tak lagi bisa dihindari oleh negara. Resiko kerentanan perekonomian domestik memang masih membayangi langkah negara untuk membuka diri terhadap perdagangan internasional, namun resiko tersebut tak lagi dirasa sepadan dengan kerugian yang akan mereka dapatkan jika mereka menjalankan kebijakan isolasionis<sup>143</sup>.

Moda transportasi dan teknologi yang mengalami perkembangan cukup pesat, menjadi faktor pemicu berikutnya yang memperkuat pembentukan jejaring interdependensi antar-negara. Munculnya media teknologi canggih juga mendorong kelahiran varian bisnis alternatif yang tak hanya memperdagangkan komoditi barang, melainkan juga jasa dan keuangan. Dengan demikian, arus relasi perdagangan telah membentang di berbagai lini, mulai dari lini manufaktur, sumber daya manusia, sampai lini finansial.

Peningkatan densitas relasional antar-negara ini semakin memperkuat intrusi ancaman non-tradisional ke dalam wilayah teritorial negara. Interdependensi perdagangan membuka celah kerentanan baru di sektor militer, ekonomi, politik, dan sosial. Pun demikian dengan terbangunnya relasi transnasional yang diindikasikan dengan banyaknya pergerakan sosial (*new social movements*) di berbagai negara. Penemuan ruang-ruang komunikasi baru di dunia maya memungkinkan penduduk di suatu negara untuk mengkonsolidasikan gerakannya dengan penduduk di negara lain, yang pada gilirannya akan menjadi benih pergerakan global menyangkut isu-isu tertentu.

Intinya, densitas relasional dan interdependensi antar-negara akan menyebabkan penguatan pengaruh sebuah peristiwa yang terjadi pada satu bagian dunia, terhadap bagian dunia lainnya<sup>144</sup>. Bentang alam dan jarak geografis tidak lagi

---

<sup>143</sup> Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde, *op. cit.*, hal. 95

<sup>144</sup> Barry Buzan, *op. cit.*, hal. 151

relevan sebagai hambatan komunikasi antar-negara. Namun, demikian, fenomena ini tidak membawa perubahan yang mendasar bagi relevansi ontologi realisme dalam konteks hubungan internasional. Negara masih merupakan aktor primer dalam dinamika internasional. Pemerintahan dunia juga masih belum bisa terwujud hanya dengan tumbuhnya gerakan-gerakan transnasional. Bahkan, sebaliknya, negara-negara mulai memperlihatkan pola adaptasi yang berkelanjutan sebagai respon terhadap perubahan konteks hubungan internasional<sup>145</sup>.

### **2.3.3. Kepedulian Terhadap Dimensi Norma, Nilai, dan Identitas** (*Norms, Values, Identities Concern*)

Berakhirnya Perang Dingin juga membawa babak baru dalam posisi dimensi norma, nilai, dan identitas di dalam politik internasional. Konflik militer antar-negara yang telah tidak lagi menguntungkan – karena konsekuensi destruktif yang muncul dari eksistensi senjata nuklir – serta berakhirnya kalkulasi perimbangan kekuatan sebagai refleksi dari sistem bipolar, memungkinkan berbagai isu di luar ranah militeristik untuk muncul kembali dan mengalihkan perhatian negara-negara dari fokus kebijakan strategis-militeristik.

Pergeseran fokus kebijakan negara-negara dalam politik internasional ini, terutama dapat dirasakan di wilayah isu keamanan politik, isu keamanan lingkungan, dan isu keamanan sosial. Secara umum, 'norma' dipahami sebagai sistem nilai yang terbentuk melalui konsensus aktor internasional dan dipelihara dengan praktek yang berkelanjutan, sehingga mencapai tahap institusionalisasi (pelembagaan) pada level internasional – baik ter-kodifikasi maupun tidak<sup>146</sup>.

---

<sup>145</sup> *Ibid.*

<sup>146</sup> "... collective expectations about proper behavior for a given identity, which in turn influence the behavior and domestic structure of states. ... . To endorse a norm not only expresses a belief, but also creates impetus for behavior consistent with the belief. ... , norms have an explicit intersubjective

Norma kedaulatan (*sovereignty*) dan penentuan nasib sendiri (*rights of self-determination*) di ranah keamanan politik, misalnya, sebenarnya lebih merupakan produk pasca-Kolonialisasi daripada produk pasca-Perang Dingin<sup>147</sup>. Kedua norma tersebut pada intinya merefleksikan kesetaraan negara-negara yang telah diakui (secara *de facto* dan *de jure*) eksistensi-nya pada level internasional, sehingga – terlepas dari perbedaan kepemilikan *power* di antara negara-negara – masing-masing negara memiliki hak untuk melaksanakan proses pembuatan kebijakan tanpa adanya intervensi dari negara lain, dan (memiliki hak) untuk mengakhiri berbagai konflik serta krisis di dalam wilayah teritorialnya tanpa adanya bantuan (kecuali negara tersebut meminta) dari aktor internasional lainnya.

Sementara 'nilai', secara umum dipahami sebagai bentuk awal dari norma yang diyakini oleh seluruh aktor internasional, yang belum berada di dalam kerangka konsensus tertentu, dan belum ter-institusionalisasi<sup>148</sup>. Sehingga pada prakteknya, realisasi nilai lebih bersifat cair dan divergen sesuai dengan pemahaman aktor internasional tersebut.

Pada akhirnya, 'identitas' dipahami sebagai sebuah konsep pemaknaan diri, di mana individu memandang posisi dirinya di dalam konteks kemasyarakatan<sup>149</sup>. Di sisi lain, masing-masing komunitas akan membentuk sebuah identitas kolektif (*collective identity*), yang pada gilirannya akan menjadi muara rujukan identifikasi diri (*self-identification*) individu terhadap kelompok masyarakat di mana ia berada. Identifikasi

---

*quality because they are collective expectations.*”, Thomas Risse, Stephen C. Ropp dan Kathryn Sikkink, *The Power of Human Rights: International Norms and Domestic Change*, Cambridge University Press, 1999, hal. 7

<sup>147</sup> “*With the collapse of colonial rule, most of the abstract lines running along given longitudes and latitudes, dividing the colonial spheres of influence, were converted into international boundaries based on the principle of uti possidetis juris. This meant the acceptance and recognition of the previous colonial administrative borders existing at the time of independence of these countries.*”, Enver Hasani, *Self-Determination, Territorial Integrity, and International Stability*, National Defence Academy, Austria, 2001, hal. 24, diakses dari, [http://www.bmlv.gv.at/pdf\\_pool/publikationen/hasa03.pdf](http://www.bmlv.gv.at/pdf_pool/publikationen/hasa03.pdf), pada tanggal 15 Januari 2008

<sup>148</sup> Thomas Risse, Stephen C. Ropp dan Kathryn Sikkink, *op. cit.*, hal. 7

<sup>149</sup> *Ibid.*

tersebut akan membawa konsekuensi 'peran' yang berasal dari ekspektasi masyarakat terhadap individu tersebut, semakin tinggi kapabilitas individu untuk memenuhi tuntutan peranan sosial (konformitas), maka kehadiran individu tersebut semakin dapat diterima<sup>150</sup>.

Dalam konteks hubungan internasional pasca-Perang Dingin, fokus terhadap identitas lebih terarah kepada munculnya tuntutan kemerdekaan, ataupun gerakan perlawanan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok etnis-kebangsaan. Tuntutan ini terutama muncul dari kelompok yang merasa dirugikan dengan adanya pembentukan negara di mana mereka tercakup di dalamnya. Tuntutan ini juga muncul sebagai buah dari tekanan dan kebijakan opresif yang dilakukan oleh rezim pemerintahan tertentu, di sebagian negara, dalam rangka proses konsolidasi dan pembentukan kohesifitas negara.

Fokus terhadap 'norma', 'nilai', dan 'identitas' inilah yang menjadi awal pembentukan landasan emansipatoris dalam Hubungan Internasional pasca-Perang Dingin. Namun, demikian, munculnya kepedulian terhadap dimensi 'norma', 'nilai', dan 'identitas' tidak menghapuskan relevansi negara sebagai unit penjamin keamanan individu. Bahkan, kehadiran dimensi 'norma', 'nilai' dan 'identitas' dalam pertimbangan kebijakan negara akan menyempurnakan perwujudan keamanan individu (*individual security*).

Dengan argumentasi yang sama, relevansi anarkisme sistem internasional juga tidak serta-merta bersifat kontradiktif terhadap perwujudan dimensi 'norma', 'nilai' dan 'identitas'. Sebaliknya, anarkisme sistem internasional merupakan karakter istimewa yang kondusif terhadap perbedaan jalur ideologis (*organizing ideologies*) masing-masing negara. Dengan kata lain, kesejajaran kewenangan dan kekuasaan politik setiap negara yang berdiri di atas landasan kedaulatan, akan selalu dijunjung

---

<sup>150</sup> Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde, *op. cit.*, hal. 119

tinggi sehingga tidak ada satu pihakpun yang memiliki legitimasi untuk mengintervensi ranah domestik negara lainnya<sup>151</sup>.

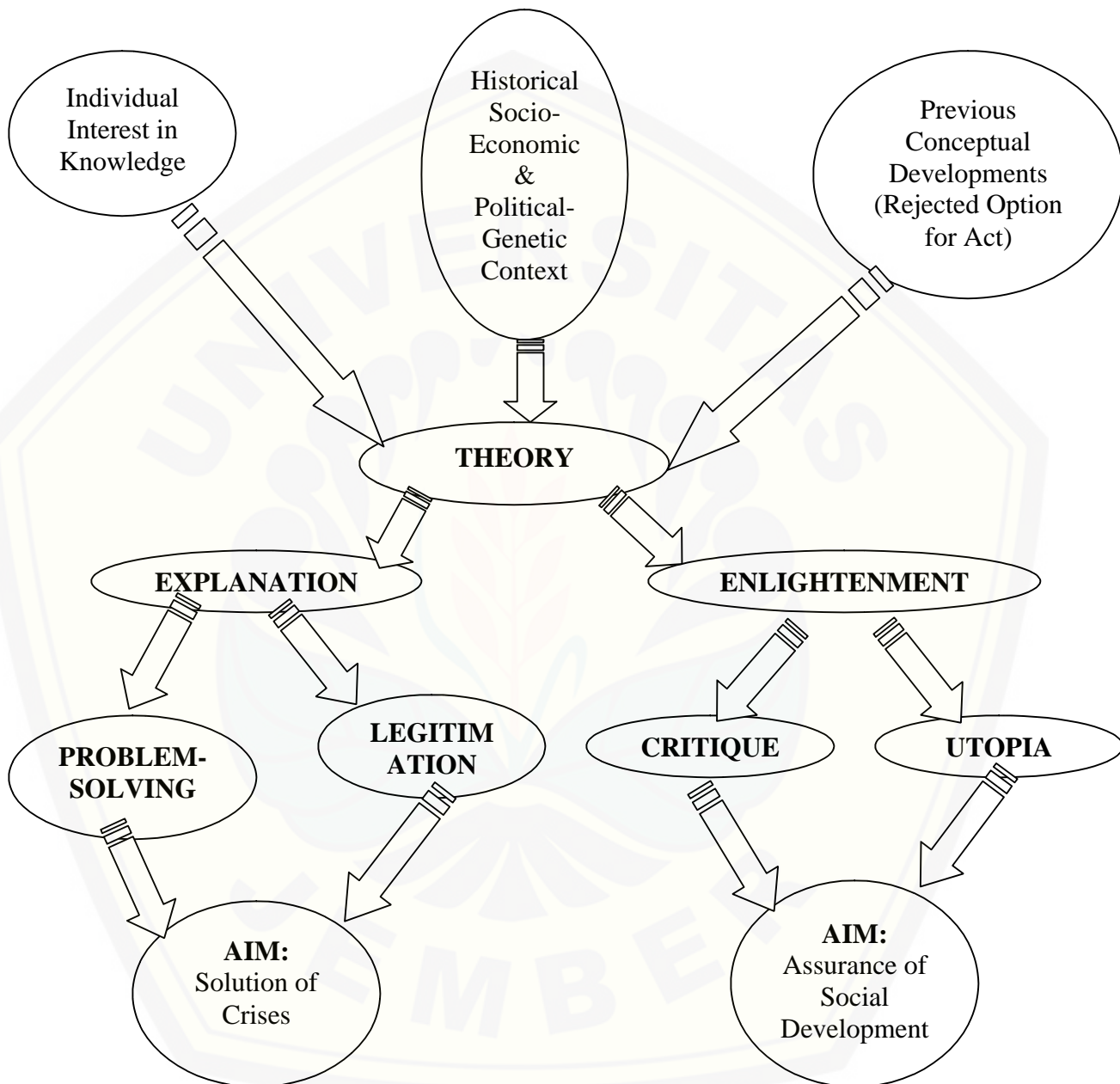


---

<sup>151</sup> Barry Buzan, *op. cit.*, hal. 149

**BAGAN KONSEPSI 'TEORI' DARI REINHARD MEYERS**

Gambar. 3a



Disadur Dari : Reinhard Meyers, Contemporary Developments in International Relations Theory.

**PERLUASAN AGENDA KEAMANAN SEBAGAI 'TEORI'  
ALTERNATIF MEYERS**

Gambar. 3b



Disadur dengan modifikasi dari : Reinhard Meyers, Contemporary Developments in International Relations Theory.



### BAB III

#### **DIMENSI EKSPLANATORI DALAM PERLUASAN AGENDA KEAMANAN: BASIS KEAMANAN SEKTORAL & KOMPLEK KEAMANAN REGIONAL**

Seperti yang telah dijelaskan dalam *Outline* Penulisan, Bab Tiga dan Bab Empat merupakan dua bagian berbeda yang tak terpisahkan dalam tulisan ini. Keduanya berisi deskripsi analitik tentang perluasan agenda keamanan sebagai salah satu ‘teori alternatif’ dalam studi keamanan yang – menurut penulis – cukup pantas disebut sebagai realisasi konsepsi ‘teori’ ala Reinhard Meyers. Walaupun sampai saat ini, penulis belum menemukan bukti konkrit yang mengimplikasikan persinggungan latar belakang perkembangan pemikiran akademis Barry Buzan (sebagai pionir pembentukan teori keamanan alternatif *Copenhagen school*) dengan Reinhard Meyers<sup>152</sup>.

Berbeda dengan Bab sebelumnya yang memotret perluasan agenda keamanan sebagai bentuk evolusi pemikiran keamanan dalam tradisi realisme, Bab Ketiga dan Keempat akan membedah perluasan agenda keamanan dalam porsinya sebagai ‘teori’. Dalam Bab ini akan diungkapkan hasil analisa teoritis perluasan agenda keamanan dari sisi eksplanatori, sementara dalam Bab Keempat penulis akan mencoba menakar aspek emansipatori dari perluasan agenda keamanan.

Meyers menyatakan bahwa teori Hubungan Internasional akan lahir sebagai perpaduan dari tiga elemen, yakni, konsepsi terdahulu yang telah tertolak (*previous conceptual developments’ rejected options for act*); konteks historis sosio-politik dan ekonomi (*historical socio-economic and political genetic context*); serta, elemen

---

<sup>152</sup> Satu-satunya bukti keterkaitan karir akademis Reinhard Meyers dengan *Copenhagen school*, yang dapat penulis temukan adalah Modul Sistematis Pengajaran Teori Hubungan Internasional yang ditulis oleh Reinhard Meyers dan Jaap de Wilde. Dalam modul tersebut Meyers dan de Wilde tertulis sebagai Pengajar Teori Hubungan Internasional di Universitas Munster, Jerman, sejak 13 November 2006 sampai 16 Januari 2007.

ketertarikan individual penstudi (*individual interest in knowledge*)<sup>153</sup>. Ketika ketiga elemen tersebut di-agregasi-kan dengan baik, maka muncullah ‘teori’ yang sesuai dengan konsepsi alternatif Meyers. Yaitu, ‘teori’ yang tidak hanya memiliki komponen eksplanasi (*explanation*) namun juga komponen pencerahan (*enlightment*).

Dalam proses pengagasan perluasan agenda keamanan, konsepsi terdahulu yang telah tertolak adalah konsepsi keamanan berbasis *power* (*power based security*) yang sangat relevan dengan konteks hubungan internasional masa Perang Dingin, namun mengalami degradasi signifikansi seiring dengan melemahnya isu ancaman militeristik dalam hubungan internasional pasca-Perang Dingin.

Sementara itu, konteks historis sosio-politik dan ekonomi yang telah mempengaruhi kemunculan teori perluasan agenda keamanan adalah konteks hubungan internasional masa Perang Dingin dan transisinya menuju hubungan internasional pasca-Perang Dingin (hingga saat ini) yang tidak hanya dapat dipandang dari sisi berakhirnya rivalitas bipolar, melainkan juga – dapat dipandang – dari sisi eksistensi isu ancaman non-tradisional yang kembali mengemuka.

Dan elemen terakhir, yakni elemen ketertarikan individual penstudi, dapat ditemui dalam beberapa karya yang menjadi *hallmark* penstudi keamanan *Copenhagen school*, diantaranya, *Peace, Power, and Security: Contending Concepts in The Study of International Relations* (Sage Publications: 1984), *People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in The Post-Cold War Era* (Lynne Rienner: 1991), *Security: A New Framework for Analysis* (Lynne Rienner: 1998), dan *Regions and Powers: The Structure of International Security* (Cambridge University Press: 2003).

---

<sup>153</sup> Lihat Gambar. 3a (*Meyer’s Theoretical Construction*) dan Gambar. 3b (*Meyer’s Theoretical Construction on Widening Security Agenda*).

Secara garis besar, Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde, dan penstudi keamanan *Copenhagen school* lainnya membentuk teori perluasan agenda keamanan dengan berlandaskan kepada beberapa tujuan, yaitu:

- Pencarian sintesa bagi perdebatan di antara konsepsi keamanan realisme (*power-based security / traditional security studies*) dengan konsepsi keamanan liberal (idealisme) (*peace-based security / peace studies*)<sup>154</sup>.
- Pengenalan level analisa regional sebagai kerangka eksplanasi yang potensial dalam studi keamanan pasca-Perang Dingin<sup>155</sup>.
- Afiriasi terhadap efek interdependensi dan densitas relasional yang menguat dalam relasi antar-negara pasca-Perang Dingin<sup>156</sup>.
- Afiriasi terhadap penguatan peran aktor non-negara dalam hubungan internasional pasca-Perang Dingin<sup>157</sup>.

---

<sup>154</sup> Barry Buzan, *op. cit.*, hal.109

Pencarian sintesa realisme-idealisme, atau *power-based* dan *peace-based security*, dituliskan berulang-ulang oleh Barry Buzan dan penulis *Copenhagen school* lainnya, dalam setiap karya mereka yang membahas perluasan agenda keamanan. Tujuan pembentukan perluasan agenda keamanan sebagai 'sintesis' sedikit bertentangan dengan sudut pandang Meyers tentang perkembangan teorisasi Ilmu Hubungan Internasional, karena Meyers tidak memandang adanya kemungkinan sintesis di antara paradigma-paradigma yang berbeda dalam Ilmu Hubungan Internasional. Namun, perbedaan perspektif antara Meyers dan *Copenhagen school* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap argumentasi yang diajukan dalam karya ini, karena pada intinya penulis hanya ingin menerapkan kerangka teorisasi Meyers untuk melihat dimensi teoritis perluasan agenda keamanan. Sedangkan bahasan tentang kemungkinan sintesa paradigma-paradigma Hubungan Internasional menempati wilayah perdebatan lain di kalangan penstudi Hubungan Internasional (*Debate on Synthesis and Cross-Paradigmatic Dialogue*).

Untuk pembahasan lebih lanjut tentang Perdebatan Sintesis dan Dialog Lintas-Paradigma, lihat : Gunther Hellmann (ed.), *Are Dialogue and Synthesis Possible in International Relations?*, International Studies Review, Vol.5, Blackwell Publishing, 2003; Gunther Auth, *A New International Relations: More Social than Science*, Global Politics Network, 2002; Yosef Lapid, *Quo Vadis International Relations? Further Reflections on the Next Stage of International Theory*, Millenium - Journal of International Studies, vol.18 no.1, 1989; Xavier Guillaume, *Reflexivity and Subjectivity: A Dialogical Perspective for and on International Relations Theory*, Forum Qualitative Social Research, Vol.3 No.3, September 2002; Dan Smith, *The Field of Study in International Relations*, European Journal of International Relations, vol.2 no.2, Sage Publications, 1996.

<sup>155</sup> Barry Buzan dan Ole Waever, *op. cit.*, hal. 3

<sup>156</sup> Barry Buzan, *op. cit.*, hal. 187.

- Afirmasi terhadap tiga sektor permasalahan *low politics* yang berpengaruh terhadap keberlanjutan eksistensi negara, dengan segala konsekuensi turunannya (i.e. afirmasi terhadap objek rujukan keamanan selain negara, afirmasi terhadap mekanisme penanganan ancaman dengan selain *hard means*, dll)<sup>158</sup>.
- Pengajuan mekanisme alternatif bagi pengelolaan anarkisme sistem internasional<sup>159</sup>.

Beberapa poin motivasi individual para penstudi keamanan *Copenhagen school* tersebut menggambarkan antusiasme mereka untuk menyodorkan eksplanasi tentang kompleksitas keamanan internasional pasca-Perang Dingin, sekaligus merefleksikan upaya keras yang mereka lakukan untuk turut menapaki langkah emansipatoris dalam perkembangan studi keamanan tanpa harus terjebak pada lingkup perdebatan solusi-solusi imajiner bagi problematika keamanan non-tradisional yang mewarnai hubungan internasional saat ini.

Dengan kata lain, teori keamanan alternatif *Copenhagen school* mengakui - bahkan menawarkan solusi bagi - keberadaan isyu keamanan non-tradisional tanpa harus mengesampingkan keberadaan isyu keamanan tradisional dan aktor yang dominan - dan masih relevan - di dalamnya<sup>160</sup>. Dilihat dari konteks ontologi realisme, apa yang dilakukan oleh *Copenhagen school* bukanlah penggantian atau peleburan realisme dengan paradigma lainnya, melainkan penggunaan sudut pandang alternatif untuk menelisik sisi lain dari ontologi realisme.

Jika periode Perang Dingin telah mendorong sebagian besar kaum realis untuk melakukan analisa dari pijakan pesimistis, maka berakhirnya Perang Dingin telah mendorong para penstudi *Copenhagen school* untuk mencoba pijakan lain dalam

---

<sup>157</sup> Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde, *op. cit.*, hal. 198

<sup>158</sup> *Ibid.*

<sup>159</sup> Barry Buzan, *op. cit.*, hal. 109

<sup>160</sup> Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde, *op. cit.*, hal. 212

realisme, yang lebih bersifat optimistik. Toh, pada akhirnya, Morgenthau tak pernah menyatakan 'dimensi moral' sebagai elemen yang tidak signifikan dalam hubungan internasional<sup>161</sup>.

Dengan demikian, aspek ketiga yang dibutuhkan dalam proses pembentukan teori Hubungan Internasional (menurut konsepsi alternatif Meyer), yakni aspek motivasi individual penstudi, telah dapat diidentifikasi secara cukup jelas. Lalu, bagaimanakah artikulasi elemen eksplanatori dari perluasan agenda keamanan? Apa arti lima sektor keamanan pada sisi *problem-solving* dan pembentukan keamanan regional pada sisi legitimasi (lihat diagram pemikiran)? Sejauh mana pendekatan sektoral *Copenhagen school* mampu mengurai benang kusut isu-isu keamanan non-tradisional? Dan fungsi legitimasi seperti apa yang ditawarkan oleh konsepsi pembentukan keamanan regional?.

Sebelum jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut disajikan, maka penting untuk dicatat bahwa 'krisis' yang dimaksud dalam analisa ini ('krisis' yang di-solusikan melalui perluasan agenda keamanan) adalah, eksistensi ancaman non-tradisional di tengah sistem internasional yang anarkis, dengan struktur internasional pasca-Perang Dingin yang tidak dapat teridentifikasi secara gamblang (unipolar, multipolar, dll).

### **3.1. Pendekatan Sektoral Terhadap Isyu Keamanan Non-Tradisional Sebagai *Problem-Solving***

Apa yang dimaksud dengan pendekatan sektoral? Dan mengapa penstudi (se)harus(nya) menggunakannya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat beralasan untuk muncul ke permukaan, karena selama ini studi keamanan hampir selalu berada pada dua titik ekstrem, yaitu pembatasan wilayah kajian keamanan pada problematika

---

<sup>161</sup> Hans J. Morgenthau, *op. cit.*, hal. 11

keamanan politik dan militer (titik keamanan tradisional), serta titik transformasi kritis melalui pengajuan objek rujukan individu dalam studi keamanan. Berkurangnya relevansi isu keamanan tradisional membuat posisi pertama sulit untuk dipertahankan, dan kaburnya batasan wilayah isu keamanan non-tradisional yang tercakup dalam konsepsi keamanan kritis akhirnya menghasilkan solusi penanganan ancaman yang sulit untuk diterapkan<sup>162</sup>.

Pendekatan sektoral menawarkan sudut pandang lain yang dapat mereduksi kelemahan kedua pendekatan sebelumnya. Pendekatan sektoral mampu mengakomodir kehadiran isu keamanan non-tradisional tanpa harus kehilangan batas analisa yang jelas<sup>163</sup>. Pendekatan ini merupakan posisi analitik yang memandang isu keamanan non-tradisional dalam kerangka lima aspek kehidupan manusia, yakni, politik, militer, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kelima aspek tersebut memiliki dinamika ancaman, titik kerentanan, dan unit analisa-nya masing-masing (objek rujukan, aktor pen-sekritisasi, serta aktor fungsional), bahkan memiliki mekanisme penanganan yang berbeda-beda<sup>164</sup>.

Sebuah perbedaan konseptual yang memungkinkan pendekatan sektoral bebas dari dilema *security watering-down effect* (efek kaburnya batas analisa dalam perspektif keamanan yang disebabkan oleh akomodasi isu keamanan non-tradisional) adalah, pembatasan objek rujukan keamanan. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa perspektif keamanan kritis menyebutkan 'individu' sebagai objek rujukan keamanan-nya. Keterlibatan 'individu' sebagai objek rujukan menyebabkan perspektif keamanan kritis kehilangan dimensi parsimoni teoritis-nya, karena konsepsi keamanan individu merupakan hal yang sangat luas dan beragam.

Sementara itu, 'komunitas', yang merupakan objek rujukan (dengan level analisa) terkecil dalam pendekatan sektoral membawa konsekuensi prasyarat

---

<sup>162</sup> Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde, *op. cit.*, hal. 207

<sup>163</sup> *Ibid.*

<sup>164</sup> *Ibid.*

intersubyektifitas sebagai landasan pengakuan bahwa isu tertentu memang dipandang sebagai ancaman dan dengan demikian tercakup dalam wilayah kajian keamanan<sup>165</sup>. Sebuah langkah yang tidak mungkin dilakukan dalam perspektif keamanan kritis, karena penstudi wajib mempertimbangkan konsepsi keamanan yang diyakini oleh masing-masing individu.

Secara garis besar, Barry Buzan et al., menyebutkan tiga alasan penggunaan pendekatan sektoral dalam kerangka teori perluasan agenda keamanan. Pertama, pendekatan sektoral memungkinkan perluasan agenda keamanan untuk mempertahankan kaitannya dengan studi keamanan tradisional<sup>166</sup>. Alasan ini terlihat dengan jelas dalam akomodasi subyek kajian keamanan tradisional ke dalam bentuk dua sektor keamanan, yakni sektor keamanan militer dan sektor keamanan politik<sup>167</sup>.

Alasan kedua terletak pada argumentasi yang menyatakan bahwa, pendekatan sektoral mengungkapkan proses pelabelan 'keamanan' kepada isu-isu non-tradisional. Pendekatan sektoral memungkinkan dilakukannya proses pembelajaran analitik dan sistematis terhadap eksistensi diskursus keamanan. Bahwa dilema kekuasaan (*power struggle*) – juga - dapat terjadi dalam wilayah ekonomi, sosial, dan lingkungan, adalah fenomena yang akan terungkap melalui penerapan pendekatan sektoral dalam konsepsi keamanan kontemporer<sup>168</sup>.

Alasan terakhir bagi adopsi pendekatan sektoral bersumber dari perbedaan kualitas keamanan (*different qualities of security*) yang terkandung dalam masing-masing agenda<sup>169</sup>. Pendekatan sektoral membuka celah pemahaman bagi penstudi terhadap kompleksitas aktor, objek rujukan, kontradiksi, dan dinamika keamanan pada setiap agenda.

---

<sup>165</sup> *Ibid.*

<sup>166</sup> Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde, *op. cit.*, hal. 196

<sup>167</sup> *Ibid.*

<sup>168</sup> *Ibid.*

<sup>169</sup> *Ibid.*

Pada prinsipnya, pendekatan sektoral berfungsi sebagai media analitik penstudi terhadap sejumlah problematika internasional yang menjadi subyek perluasan agenda keamanan melalui disagregasi isu ke dalam lima topik kajian berdasarkan perbedaan pola dan karakteristik relasional yang terkandung dalam masing-masing isu.

Buzan menuliskan perbedaan pola dan karakteristik relasional pada kelima agenda keamanan itu dengan lebih detil. Sektor militer terpusat pada relasi yang bersifat koersif dan melibatkan penggunaan kekuatan konkrit; sektor politik berbicara tentang kaitan antara kewenangan, posisi pemerintahan, dan pengakuan politik; sektor ekonomi membahas relasi dagang, produksi, dan keuangan; sektor sosial berada pada wilayah permasalahan identitas kolektif; dan, sektor lingkungan membaca implikasi aktifitas kehidupan manusia terhadap keseimbangan Biosfer<sup>170</sup>.

Untuk mengetahui perbedaan kompleksitas komponen keamanan dalam masing-masing sektor secara lebih spesifik, di bawah ini disajikan pembahasan detil dari kelima sektor keamanan.

### **3.1.1. Sektor Keamanan Militer**

Ancaman penggunaan kekuatan militer merupakan jenis ancaman paling nyata yang dapat dirasakan oleh pemerintah maupun penduduk suatu negara. Tingkat kerusakan yang ditimbulkan dari sebuah serangan militer bersifat masif dan menyeluruh. Tidak hanya meliputi korban jiwa, namun lebih dari itu, juga mencakup hasil-hasil peradaban dan kebudayaan manusia yang telah dicapai selama bertahun-tahun, bahkan mungkin berabad-abad.

Secara umum, tidak ada entitas politik lain yang dapat – secara sah dan legitim – memiliki media kekuatan militer selain negara. Dengan kata lain, serangan

---

<sup>170</sup> Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde, *op. cit.*, hal. 7



militer hanya mungkin dilancarkan oleh suatu negara terhadap negara lainnya (*state as the source of threat*). Pun demikian, agenda keamanan militer tidak hanya terbatas pada proyeksi kapabilitas militer nasional yang bersifat eksternal (*outward orientation*). Penjagaan stabilitas domestik yang melibatkan penerapan media koersif pada prinsipnya juga tercakup dalam ruang lingkup agenda keamanan militer (*inward orientation*)<sup>171</sup>.

Berdasarkan dua arah proyeksi kapabilitas koersif negara yang tercakup dalam agenda keamanan militer ini. Maka, terdapat dua dinamika keamanan militer, yaitu dinamika militer eksternal dan dinamika militer internal. Dinamika militer eksternal meliputi perlombaan persenjataan (*arms race*), pengembangan Senjata Pemusnah Massal (*Weapons of Mass Destruction / WMD*), serta intensitas konflik terbuka antar-negara. Pada prinsipnya, dinamika ini akan mulai berkecambah setelah tahapan sekuritisasi dilalui<sup>172</sup>. Dengan kata lain, dinamika militer eksternal adalah hasil dari pembentukan persepsi negatif (*enmity*) negara A tentang satu atau beberapa negara lainnya, sehingga persepsi tersebut mempengaruhi dan menghasilkan pola kebijakan militeristik negara A terhadap negara objek (negara yang dipandang sebagai musuh).

Di sisi lain, dinamika keamanan internal mencakup seluruh upaya negara untuk mempertahankan stabilitas domestik, keberaturan tata kehidupan masyarakat sipil, dan keberlanjutan stabilitas pemerintahan dari berbagai ancaman sub-negara, seperti aksi kejahatan, kelompok separatis, milisi, mafia, serta berbagai kelompok sub-negara lainnya yang merongrong stabilitas internal<sup>173</sup>.

Ancaman penggunaan kekuatan militer menuntut berlakunya fungsi utama sebuah negara – yaitu fungsi proteksi. Proteksi, merupakan tugas pokok negara yang sekaligus menjadi salah satu landasan kelahirannya. Individu berkemauan untuk menyerahkan sebagian 'kebebasannya' pada institusi negara, dengan harapan –

---

<sup>171</sup> *Ibid.*

<sup>172</sup> *Ibid.*

<sup>173</sup> Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde, *op. cit.*, hal. 50

terutama - dapat terhindarkan dari ancaman serangan militer<sup>174</sup>. Dengan kata lain, eksistensi negara mendapatkan sebagian legitimasinya dari kemungkinan terjadinya serangan militer itu (*state as the source of stability*).

Dari kelima sektor keamanan yang tercakup dalam perluasan agenda keamanan, sekuritisasi agenda keamanan militer merupakan proses yang paling terlembaga (*institutionalized*) serta didukung oleh konteks historis yang kokoh<sup>175</sup>. Karakteristik tersebut pada gilirannya menyebabkan agenda keamanan militer memiliki objek rujukan dan aktor pen-sekuritisasi yang sangat jelas<sup>176</sup>.

Umumnya, objek rujukan keamanan militer adalah 'negara', dengan 'pemerintah' sebagai aktor pen-sekuritisasi utama. Namun, seiring dengan munculnya kelompok-kelompok sub-negara yang juga memiliki akses terhadap kapabilitas militer (seperti, gerakan separatis) maka ideologi gerakan, identitas kebangsaan, dan seperangkat prinsip yang menjadi landasan aksi kelompok-kelompok tersebut juga dapat dikategorikan sebagai objek rujukan keamanan militer, dengan kelompok sub-negara terkait sebagai aktor pen-sekuritisasi di dalamnya<sup>177</sup>.

Bahkan, dalam beberapa dekade terakhir, prinsip-prinsip abstrak seperti, hak asasi manusia (*human rights*), asas non-interferensi (*non-interference*), dan hak penentuan nasib sendiri (*self-determination*), juga dapat diposisikan sebagai objek rujukan pada level internasional<sup>178</sup>. Hal ini terlihat dari peranan PBB dalam menanggulangi pelanggaran salah satu prinsip-prinsip tersebut, yang tak jarang melibatkan penggunaan kapabilitas koersif, seperti misi Intervensi Kemanusiaan (*humanitarian intervention*). Pada konteks tersebut, PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya (yang memiliki akses terhadap kapabilitas koersif) menjadi aktor pen-sekuritisasi.

---

<sup>174</sup> Barry Buzan, *op. cit.*, hal. 117

<sup>175</sup> Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde, *op. cit.*, hal. 49

<sup>176</sup> *Ibid.*

<sup>177</sup> *Ibid.*

<sup>178</sup> Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde, *op. cit.*, hal. 55

Wilayah peran aktor fungsional juga mendapatkan 'pemain baru' dengan intensitas peran industri militer yang semakin tinggi. Walaupun peran aktor-aktor fungsional lama, seperti Departemen Pertahanan dan lembaga-lembaga militer (Angkatan Darat, Laut, dan Udara), masih tetap bercokol dengan kuat dalam mempengaruhi pembentukan kebijakan militeristik negara<sup>179</sup>.

Selanjutnya, periode pasca-Perang Dingin ditandai dengan pergeseran polaritas profil isu militer global menuju level regional. Berakhirnya persaingan ekspansi wilayah pengaruh ideologis (*sphere of influence*) menyebabkan kedua negara *superpower* 'angkat kaki' dari sebagian besar wilayah subordinat-nya. Hal tersebut pada gilirannya mengungkapkan profil keamanan regional yang semula tersembunyi di balik ketegangan konflik kedua *superpower*. Secara konseptual, terjadi difusi kapabilitas militeristik di kalangan negara-negara berkekuatan menengah (*middle-power states*), walaupun secara teknis, Amerika Serikat merupakan penguasa teknologi persenjataan yang terdepan<sup>180</sup>.

Penjelasan di atas telah memberikan deskripsi mendetil tentang solusi-konservatif dan solusi-rekonstruktif yang terkandung dalam sektor keamanan militer. Sektor ini menghadirkan peran negara sebagai objek rujukan dan aktor sekuritisasi primer; negara sebagai penyedia stabilitas keamanan; institusi militer formal sebagai aktor fungsional; serta dimensi keamanan eksternal, sebagai poin solusi-konservatif. Sementara itu, di sisi solusi-rekonstruktif, dinamika keamanan internal; kehadiran objek rujukan, aktor sekuritisasi, dan aktor fungsional baru (kelompok *sub-state*, prinsip-prinsip abstrak, *Military Industrial Complex*); serta pergeseran dinamika militer global menuju level regional, menjadi hal-hal baru yang ditawarkan.

Kesimpulannya, sektor keamanan militer merupakan konsep yang diadopsi dari wilayah keamanan tradisional mengingat relevansi isu yang dikandungnya

---

<sup>179</sup> *Ibid.*

<sup>180</sup> Penjelasan lebih lanjut dapat ditemui dalam bagian selanjutnya, Pembentukan Keamanan Regional.

masih cukup kental dalam konteks hubungan internasional pasca-Perang Dingin. Aspek-aspek khusus yang mengalami perubahan dalam isu keamanan militer pasca-Perang Dingin diantaranya adalah, aspek unit analisa keamanan (pertambahan aktor pen-sekuritisasi, objek rujukan, dan aktor fungsional non-negara), aspek dinamika isu (pergeseran dari dinamika global menuju dinamika regional), serta aspek karakteristik ancaman (tidak hanya bersifat eksternal, melainkan juga internal, dan perkembangan teknologi persenjataan baru yang membuat faktor proksimitas geografis menjadi tidak relevan). Dengan demikian, terbukti bahwa berkurangnya relevansi keamanan tradisional tidak membawa dampak terhapusnya relevansi problematika keamanan militer dalam hubungan internasional.

### 3.1.2. Sektor Keamanan Politik

Agenda keamanan politik ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan stabilitas organisasional negara<sup>181</sup>. Jelas hal ini disebabkan oleh karakteristik ancaman politis yang umumnya dilancarkan untuk mengganggu stabilitas organisasional, menekan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan tertentu, mengorganisir sebuah gerakan seksesional, sampai pada upaya-upaya meruntuhkan rezim yang sedang berkuasa.

Karakteristik lainnya dari ancaman politik adalah ketidak-pastian bentuk dan kadar ancamannya<sup>182</sup>. Sulit – bagi negara – untuk menentukan batasan di mana sebuah ancaman politik (misal, perbedaan ideologi politik yang dianut oleh kelompok sub-negara) dapat dikategorikan sebagai ancaman nasional. Kerumitan ini bersumber dari ragam ideologi politik yang dapat – sewaktu-waktu – menjadi ancaman bagi

---

<sup>181</sup> Barry Buzan, *op. cit.*, hh. 118-119

<sup>182</sup> *Ibid.*

landasan ideologis negara maupun menjadi ancaman bagi identitas kebangsaan yang menyatukan seluruh komponen masyarakat.

Keberagaman ideologi merupakan keniscayaan dalam iklim demokrasi. Tentunya negara tidak dapat menghukum seseorang hanya karena ia meyakini ideologi yang berbeda dengan ideologi yang menjadi landasan organisasional pemerintah. Namun demikian, sekecil apapun persentase perbedaan ideologis yang berada di tengah-tengah masyarakat, tetap saja – perbedaan itu – mengandung potensi ancaman politik terhadap stabilitas organisasional pemerintah dan kohesifitas negara.

Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa kohesifitas negara dan stabilitas organisasional-nya akan menjadi lebih aman jika keberagaman ideologis – dalam negara tersebut – tidak memiliki spektrum yang sangat luas<sup>183</sup>. Hal inilah yang kemudian memicu timbulnya kebijakan-kebijakan yang dimaksudkan untuk menjadi semacam upaya 'Homogenisasi Ideologis', oleh beberapa negara. Seperti yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat – dengan Anti-Komunisme – dan Uni Soviet – dengan Anti-Imperialisme.

Akan tetapi, negara bukanlah satu-satunya objek rujukan yang dapat disekuritisasi dalam agenda keamanan politik. Terdapat bentuk-bentuk non-negara lainnya yang juga mungkin dihadirkan sebagai objek rujukan. Bentuk-bentuk non-negara tersebut diantaranya:

- Bentuk organisasi supra-nasional (seperti, Uni Eropa).
- Kelompok-kelompok sosial non-negara yang menuntut independensi dan telah ter-institusionalisasi dengan baik (walaupun tidak diakui secara formal oleh masyarakat internasional).

---

<sup>183</sup> *Ibid.*

- Pergerakan transnasional yang dapat memobilisasi dukungan penuh dari para pengikutnya untuk mencapai tujuan politik tertentu<sup>184</sup>.

Selanjutnya, Buzan mengklasifikasikan ancaman politik ke dalam beberapa kategori yang ditentukan menurut tipe dan motif ancaman. Klasifikasi ancaman politik tersebut adalah sebagaimana berikut:

- *Tipe ancaman politik ideologis*. Ancaman politik ideologis biasanya terarah pada upaya delegitimasi landasan ideologis yang menjadi penggerak aspek organisasional pemerintah<sup>185</sup>. Pada level minimum, intervensi politik dari kelompok-kelompok yang berbeda secara ideologis dengan rezim pemerintah, akan menghasilkan pola kebijakan yang sedikit melenceng dari landasan ideologis rezim itu sendiri.
- *Tipe ancaman politik kebangsaan*. Ancaman politik dalam kategori ini meliputi gerakan-gerakan yang mempertajam perbedaan etno-kultural masyarakat<sup>186</sup>. Tujuan yang ingin dicapai – melalui gerakan-gerakan itu – juga beragam, mulai dari keinginan untuk menambah problematika kebangsaan bagi rezim penguasa, memantik aksi seksesionalis, sampai kepada terobosan awal yang akan memperlancar aneksasi negara lain terhadap wilayah negara target.
- *Ancaman politik dengan motif kesengajaan*. Ini adalah ancaman politik yang dengan sengaja dilancarkan pihak tertentu untuk mengganggu stabilitas organisasional negara target<sup>187</sup>. Contoh paling jelas adalah, intervensi

---

<sup>184</sup> Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde, *op. cit.*, hal. 145

<sup>185</sup> Barry Buzan, *op. cit.*, hal.119

<sup>186</sup> *Ibid.*

<sup>187</sup> *Ibid.*

pemerintah AS untuk menggulingkan rezim-rezim radikal di Kuba, Chile, Nikaragua, dan Guatemala.

- *Ancaman politik struktural*. Ancaman politik ini bersumber dari konteks kelemahan organisasional pemerintah, sehingga dengan sendirinya stabilitas rezim tersebut rentan terhadap faktor-faktor pemicu yang dapat menjadi akar keruntuhan rezim pemerintah<sup>188</sup>.

Lebih jauh, solusi-konservatif dari agenda keamanan politik adalah 'negara' yang masih dihadirkan sebagai objek rujukan primer, dan masih adanya penekanan terhadap keberlangsungan stabilitas negara. Di sisi lain, solusi-rekonstruktif dalam agenda keamanan politik adalah, ketidakpastian ancaman (bentuk, dan kualitas), serta keberagaman objek rujukan yang ada di dalamnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sektor keamanan politik adalah sektor keamanan lainnya yang kental dengan nuansa keamanan tradisional (selain sektor keamanan militer). Sektor keamanan politik berkaitan erat dengan kohesifitas unit keamanan sebagai faktor penentu tingkat kerentanan unit tersebut dari berbagai ancaman yang merongrong legitimasinya, baik ancaman yang datang dari luar unit (eksternal) maupun ancaman yang berasal dari dalam tubuh unit itu sendiri (internal).

### 3.1.3. Sektor Keamanan Ekonomi

Jika agenda keamanan politik menjadi sulit untuk dijelaskan karena aspek keberagaman ideologis yang – acapkali – berperan sebagai sumber ancamannya. Maka agenda keamanan ekonomi menawarkan kompleksitas lainnya yang tak kalah rumit. Konteks keamanan ekonomi sulit untuk dipetakan keberadaannya, karena di dalam perekonomian internasional saat ini – yang menerapkan sistem ekonomi pasar

---

<sup>188</sup> *Ibid.*

– 'ketidak-amanan ekonomi' merupakan hal yang inheren, atau bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu faktor penggerak dinamika perekonomian internasional<sup>189</sup>. Dengan kata lain, roda perekonomian internasional selalu digerakkan melalui mekanisme reproduksi ancaman di mana ketidakamanan ekonomi merupakan konsekuensi logis yang harus dibayarkan para pelaku ekonomi pasar ketika mereka mengambil langkah yang tidak efisien<sup>190</sup>.

Sektor keamanan ekonomi merupakan sebuah paradoks, Jika agenda keamanan ekonomi direpresentasikan melalui intervensi pemerintah terhadap berjalannya mekanisme pasar, maka akan muncul pretensi bahwa pemerintah – dapat dipastikan – melakukan intervensi perekonomian seluas dan sekuat mungkin (demi menjamin stabilitas perekonomian nasional), sehingga mekanisme pasar tidak lagi dapat berjalan dengan semestinya. Lebih dari itu, sistem perekonomian autarki akan membuat negara itu terdepak – ke luar – dengan sendirinya dari lingkaran sistem perdagangan dunia dan kehilangan kesempatan untuk memperoleh banyak manfaat positif darinya<sup>191</sup>.

Sebaliknya, jika agenda keamanan ekonomi diartikan sebagai kebijakan-kebijakan perekonomian nasional yang lebih kondusif terhadap sistem ekonomi pasar, dengan pembukaan hubungan komersial seluas-luasnya (baik dengan pelaku negara maupun non-negara) di tataran internasional. Maka, seperti seorang tentara yang pergi ke medan perang dengan bertelanjang dada, negara itu sedang mengekspos sisi kerentanannya (*vulnerability*) untuk menjadi sasaran empuk bagi ribuan ancaman yang datang dari dinamika perekonomian global.

Konsekuensi langsung dari karakteristik isu keamanan ekonomi tersebut adalah, sulitnya upaya sekuritisasi di dalam agenda keamanan ekonomi, terhadap

---

<sup>189</sup> *Ibid.*

<sup>190</sup> *Ibid.*

<sup>191</sup> Barry Buzan, *op. cit.*, hal. 124



objek rujukan dari berbagai level<sup>192</sup>. Jika objek rujukan keamanan ekonomi adalah perekonomian nasional, maka seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, (apabila upaya sekuritisasi itu sukses) negara akan beresiko kehilangan kesempatan dan manfaat dari efisiensi perekonomian internasional.

Di sisi lain, jika objek rujukan yang di-sekuritisasi adalah prinsip abstrak pada tataran sistemik seperti LIEO (*Liberal International Economic Order*), maka upaya sekuritisasi tersebut akan menemui hambatan dari sisi fakta pendukung (*facilitating conditions*). Sulit untuk mengatakan bahwa tata perekonomian internasional, pada saat ini, sedang berada dalam kondisi terancam, mengingat tata perekonomian sosialis – sebagai satu-satunya pesaing potensial – telah mengalami keruntuhan seiring dengan jatuhnya Uni Soviet di akhir dekade 1980an.

Selanjutnya, terdapat perkembangan menarik dalam respon negara-negara terhadap pesatnya perkembangan perekonomian global yang tidak hanya mengarah pada liberalisasi pasar melainkan juga de-regulasi finansial. Perkembangan tersebut dimulai setelah intensitas pembentukan blok perdagangan NAFTA (*North American Free Trade Area*) dan UE mencapai klimaks-nya pada akhir dekade 1980an.

Sejumlah blok perdagangan regional lainnya bermunculan bagaikan cendawan di musim hujan. Sebut saja AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) di Asia Tenggara, APEC (*Asia-Pacific Economic Cooperation*) yang menghubungkan Australasia dengan Amerika Utara, MERCOSUR (*Southern Cone Common Market*) yang mencakup wilayah Selatan Amerika Latin, ECOWAS (*Economic Community of West African States*) di Afrika Barat, SAARC (*South Asian Association for Regional Cooperation*) di Asia Selatan, serta SADC (*South African Development Community*) di Afrika Selatan.

---

<sup>192</sup> Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde, *op. cit.*, hal. 99

Kelahiran blok-blok perdagangan regional tersebut pada intinya muncul sebagai respon terhadap intensitas perekonomian global<sup>193</sup>. Namun, secara spesifik terdapat beberapa poin yang diharapkan muncul dari pembentukan blok-blok perdagangan regional yang terkait dengan konteks keamanan ekonomi negara-negara anggotanya secara keseluruhan. Poin-poin tersebut diantaranya:

- Blok regional dapat berfungsi sebagai jaring pengaman ketika sistem perekonomian global mengalami krisis<sup>194</sup>.
- Blok regional mampu menyediakan landasan operasional dan negosiasi yang lebih kokoh bagi negara-negara anggotanya dalam iklim kompetitif yang dominan pada sistem perekonomian global<sup>195</sup>.
- Blok regional mampu berfungsi sebagai media pengelolaan problematika ekonomi yang kerap membayangi negara-negara dalam konteks perekonomian liberal di skala internasional<sup>196</sup>.
- Blok regional berfungsi sebagai pelindung dan penjamin keberlangsungan pola perekonomian tertentu yang dipengaruhi oleh nilai-nilai ekonomi-politik sebuah kawasan (seperti, iklim perekonomian Uni Eropa yang dipengaruhi nilai-nilai Keynesian)<sup>197</sup>.

Lalu, hal-hal apa saja yang dapat dikategorikan sebagai masalah keamanan ekonomi? mengingat eksistensi ancaman (*existential threat*) dan konsekuensi sistem perekonomian liberal merupakan dua hal yang sulit untuk dibedakan? Buzan et al. menuliskan beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai problematika keamanan ekonomi. Beberapa hal tersebut diantaranya:

---

<sup>193</sup> Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde, *op. cit.*, hal. 113

<sup>194</sup> *Ibid.*

<sup>195</sup> *Ibid.*

<sup>196</sup> *Ibid.*

<sup>197</sup> *Ibid.*

- Kemampuan negara untuk mempertahankan kapabilitas produksi militeristik yang mandiri di tengah situasi pasar global<sup>198</sup>.

Hal ini terkait dengan reduksi liberalisasi dagang terhadap kapabilitas mobilisasi militer nasional. Pembukaan hubungan ekonomi suatu negara dengan negara lainnya akan memulai sebuah rantai ketergantungan di antara keduanya. Sistem perekonomian internasional sendiri merupakan kumpulan dari jejaring hubungan ekonomi bilateral dan multilateral, yang juga saling kait-mengait, bahkan melibatkan aktor-aktor non-negara serta beberapa organisasi internasional.

Di sisi lain, teknologi militer nasional telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bahkan, terdapat upaya untuk mengembangkan teknologi militer yang dapat menggantikan penggunaan personil manusia di medan perang, sehingga perang tidak lagi dijalankan oleh personil militer melainkan oleh alat-alat robotik. Fase perkembangan teknologi militer mulai bersentuhan dengan teknologi sipil<sup>199</sup>.

Teknologi sipil merupakan komoditas dagang yang bebas diperjual-belikan dan dimiliki oleh siapapun. Konvergensi teknologi sipil dengan bidang militer tidak serta-merta membuat komoditas tersebut terbatas peredarannya. Negara tidak dapat melakukan restriksi terhadap komoditas tersebut, terlepas dari apapun peranannya dalam aspek pertahanan dan keamanan nasional. Dengan demikian, kapabilitas teknologi militer bukan lagi hak eksklusif negara. Siapapun dapat memiliki kapasitas dan probabilitas untuk mengembangkan teknologi militeristik dengan klaim kepemilikan teknologi sipil.

- Kemungkinan eksploitasi aspek ketergantungan ekonomi sebagai alat untuk mencapai tujuan politik<sup>200</sup>. Poin ini terutama mengarah kepada keamanan

---

<sup>198</sup> Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde, *op. cit.*, hal. 98

<sup>199</sup> Barry Buzan, *op. cit.*, hal. 127

<sup>200</sup> Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde, *op. cit.*, hal. 98

suplai komoditi strategis seperti minyak, yang – jika dihentikan – akan meruntuhkan landasan aktifitas perekonomian nasional<sup>201</sup>.

- Kekhawatiran akan konsekuensi yang lahir dari sistem pasar global, bahwa perekonomian liberal tidak berujung pada meratanya distribusi pendapatan dan peningkatan kesejahteraan, melainkan malah berakhir pada peningkatan kemiskinan dan kesenjangan distribusi pendapatan di antara negara-negara maju dan negara-negara tertinggal<sup>202</sup>.
- Kekhawatiran akan sisi negatif kapitalisme yang ditandai dengan maraknya perdagangan ilegal, yang pada gilirannya akan meningkatkan aksi kriminalitas<sup>203</sup>. Serta kekhawatiran akan meningkatnya tekanan bagi lingkungan global yang bersumber dari persebaran proses industrialisasi dan peningkatan konsumsi massal<sup>204</sup>.
- Kekhawatiran akan runtuhnya tata perekonomian internasional yang disebabkan oleh melemahnya konteks kepemimpinan politik, peningkatan kebijakan proteksionis, dan instabilitas struktural dalam sistem keuangan global<sup>205</sup>.

Poin ini berhubungan dengan reduksi kapabilitas independensi negara-negara *major power* sebagai konsekuensi dari berkembangnya interdependensi ekonomi<sup>206</sup>. Dalam konteks perekonomian internasional yang diwarnai densitas tingkat tinggi - seperti halnya faktor-faktor internal - faktor-faktor eksternal juga dapat mempengaruhi performa perekonomian nasional<sup>207</sup>. Kondisi perekonomian domestik yang baik tidak dapat memberi jaminan bahwa stabilitas perekonomian nasional tidak

---

<sup>201</sup> Barry Buzan, *op. cit.*, 128

<sup>202</sup> Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde, *op. cit.*, hal. 98

<sup>203</sup> *Ibid.*

<sup>204</sup> *Ibid.*

<sup>205</sup> *Ibid.*

<sup>206</sup> Barry Buzan, *op. cit.*, hal. 127

<sup>207</sup> *Ibid.*

akan terganggu oleh goncangan krisis global. Arus perpindahan faktor produksi yang sudah sedemikian bebas, ditambah dengan aliran modal yang tidak lagi berbentuk riil, membuat negara hampir tidak dapat berbuat apa-apa.

Kenyataan tersebut memungkinkan pergeseran posisi '*major powers*' di antara negara-negara di dunia untuk selalu terjadi. Tidak ada satu negara pun yang dapat mempertahankan posisinya untuk jangka waktu yang sangat lama<sup>208</sup>. Bahkan ketika sebuah negara relatif dapat mempertahankan pertumbuhan perekonomiannya, pergeseran posisi tersebut masih tidak dapat terelakkan. Pertumbuhan negara-negara '*middle powers*' dengan sumber daya ekonomi yang berlimpah dan performa perekonomian nasional yang terus menanjak – seperti, Brazil, India, dan China -, lambat-laun akan mengancam eksistensi '*major powers*' dan bukan tak mungkin, akan menggantikan posisinya.

Dengan demikian, sisi solusi-konservatif dalam agenda keamanan ekonomi adalah sebagaimana berikut :

- Negara sebagai objek rujukan
- Peran negara dalam pembentukan blok regional
- Penekanan terhadap keberlangsungan kapabilitas militer negara dalam kaitannya dengan konteks perdagangan bebas
- Utilitas sanksi ekonomi sebagai alat politik (*political means*)

Dan, sisi solusi-rekonstruktif diantaranya :

- Prinsip-prinsip abstrak sebagai objek rujukan
- Munculnya ancaman-ancaman baru sebagai eksese kapitalisme (kejahatan transnasional, degradasi lingkungan, krisis ekonomi, dst)

---

<sup>208</sup> *Ibid.*

- Keberadaan negara-negara kekuatan menengah (*middle-power state*) sebagai pesaing negara-negara *major-power*

Kontradiksi antara konteks perekonomian nasional dengan sistem perekonomian global, serta beragam objek rujukan yang terletak di berbagai level analisa, menawarkan kompleksitas tersendiri yang hanya dapat ditemui dalam agenda keamanan ekonomi. Selama tata perekonomian internasional tetap berjalan di atas jalur kapitalisme murni, tanpa adanya sistem jaminan sosial yang berskala global, maka selama itu pula kontradiksi antara ketahanan perekonomian nasional dengan intrusi implikasi negatif dari sistem perekonomian global akan tetap terposisikan sebagai dilema terberat dalam agenda keamanan ekonomi.

#### 3.1.4. Sektor Keamanan Sosietal

Keamanan sosietal adalah tentang keberlanjutan identitas religi, kultural, dan etnis, dengan berbagai ekspresinya (seperti aksen bahasa tradisional dan adat-istiadat), di dalam sebuah kondisi tertentu yang memungkinkan identitas primordial tersebut untuk tetap berevolusi<sup>209</sup>. Sebuah konteks ideal yang sulit untuk diwujudkan, terutama setelah kita tahu bahwa 'keberagaman' – baik keberagaman ideologi, religi, maupun identitas kultural – merupakan salah satu faktor yang dapat menjadi sumber ancaman bagi negara di ranah politik.

Terdapat dua 'penyalahgunaan' terminologi 'sosietal' yang harus dihindari oleh penstudi dalam analisa terhadap sektor keamanan sosietal. Penyalahgunaan pertama terletak pada perbedaan term 'sosietal' (*societal*) dan term 'sosial' (*social*). Sektor keamanan sosietal (*societal security*) tidak dapat disamakan dengan konsep keamanan sosial (*social security*), karena keamanan sosial lebih tertuju kepada

---

<sup>209</sup> Barry Buzan, *op. cit.*, hal. 123

individu dan stabilitas perekonomian mereka (contoh, sistem Jaring Pengaman Sosial), sedangkan sektor keamanan sosial terkait dengan 'identitas' dan 'kolektifitas',<sup>210</sup>.

Penyalahgunaan kedua terletak pada pertukaran makna antara term 'sosietal' (*societal*) dan term 'masyarakat' (*society*). Umumnya, kita menggunakan term 'masyarakat' untuk merujuk pada penduduk yang tinggal di suatu negara (contoh, masyarakat Indonesia) tanpa melihat spesifikasi komposisi identitas kolektif yang menyusunnya (Jawa, Madura, Aceh, dll). Terminologi 'sosietal' dalam sektor keamanan ini tidak merujuk pada konsepsi penduduk suatu negara secara keseluruhan, melainkan kepada komunitas individual, baik dalam ruang lingkup sebuah negara (seperti Jepang, yang hanya terdiri dari satu etnis) maupun sub-negara<sup>211</sup>.

Buzan sendiri mengakui bahwa sektor ancaman sosial tidak serta-merta dapat dipisahkan dari beroperasinya sektor ancaman politik dan sektor ancaman militer<sup>212</sup>. Ancaman sosial dapat muncul sebagai akibat dari invasi militer ataupun langkah penekanan sistemik yang dilakukan oleh rezim pemerintah, yang sebenarnya ditujukan untuk meminimalisir munculnya ancaman politik.

Sebuah gerakan seksesionalis yang mengusung aspirasi etnis minoritas, dapat berujung tidak hanya pada upaya pemberangusan gerakan politiknya, namun lebih dari itu, pada tekanan-tekanan terhadap identitas kultural yang melekat di dalamnya, entah secara koersif, persuasif, ataupun sistemik. Penciptaan situasi yang kondusif bagi proses evolusi pola-pola tradisional dan adat-istiadat berada sepenuhnya di tangan pemerintah masing-masing negara. Maka ancaman di dalam agenda keamanan sosial pun, sebagian besar bersifat internal<sup>213</sup>.

---

<sup>210</sup> Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde, *op. cit.*, hal. 120

<sup>211</sup> *Ibid.*

<sup>212</sup> Barry Buzan, *op. cit.*, hal. 122

<sup>213</sup> *Ibid.*

Proses pembentukan karakter kebangsaan (*nation-building*) maupun upaya pencarian identitas budaya nasional (*national culture*), acapkali disertai dengan homogenisasi budaya dan adat-istiadat lokal<sup>214</sup>. Di sisi lain, intrusi arus budaya asing ke dalam wilayah suatu negara dapat menekan eksistensi budaya-budaya lokal (*local cultures*) yang – sebenarnya – berperan besar bagi pembentukan negara di tataran ideasional<sup>215</sup>.

Objek rujukan dalam sektor keamanan sosial dapat berupa kelompok atau komunitas apapun yang mengusung identitas-identitas tertentu dan diiringi oleh tingkatan loyalitas tertentu (i. e. suku, klan, bangsa, kelompok minoritas, peradaban, agama, dan ras), sehingga komunitas tersebut dapat menyatakan bahwa konteks 'ke-kita-an' mereka sedang mendapatkan ancaman<sup>216</sup>.

Sedangkan, aktor pen-sekuritisasi dalam isu keamanan sosial dapat berupa pemerintah, kepala suku, dan berbagai bentuk pemerintahan yang memimpin kelompok tersebut, ataupun anggota kelompok itu sendiri. Di sisi lain, peran aktor fungsional seringkali dimainkan oleh media, yang melalui berita-beritanya dapat membentuk definisi situasional tertentu terhadap konflik yang terjadi di antara dua (beberapa) kelompok yang bertikai. Media mampu mengkonstruksi 'fakta' dalam terminologi 'kita' dan 'mereka', yang secara langsung dapat membentuk opini publik tentang keberlangsungan identitas kultural yang patut didukung dan yang tidak patut didukung<sup>217</sup>.

Dengan demikian, ancaman terhadap 'identitas' dapat dirumuskan sebagai seluruh bentuk ancaman terhadap konstruksi identifikasi 'ke-kita-an' (*we-ness*) yang secara langsung memperkuat ataupun me-reproduksi konsepsi 'ke-kita-an' lainnya

---

<sup>214</sup> *Ibid.*

<sup>215</sup> *Ibid.*

<sup>216</sup> Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde, *op. cit.*, hal. 123

<sup>217</sup> Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde, *op. cit.*, hal. 124



(*us*)<sup>218</sup>. Sebagai contoh, apabila identitas 'Rusia' dikonsepsikan sebagai bangsa 'Euro-Asianis' maka konsepsi 'Rusia' sebagai 'Eropa murni' akan terpinggirkan.

Terdapat empat isu besar yang mewarnai kasus-kasus sektor keamanan sosial, yaitu:

- Migrasi. Isyu ancaman sosial terjadi ketika komunitas X didominasi oleh kedatangan komunitas Y; dalam kasus ini, komunitas X tidak akan mungkin hidup dalam kondisi yang sama seperti kehidupan pra-kedatangan komunitas Y; identitas komunitas X akan terancam melalui pergeseran kuantitas populasi X dengan kuantitas populasi Y (contoh, migrasi etnis Cina menuju Tibet, dan migrasi etnis Rusia ke wilayah Estonia)<sup>219</sup>.
- Kompetisi horizontal. Dalam konteks ini, isyu ancaman sosial terjadi melalui transmisi pengaruh kultural dan linguistik. Komunitas X memang masih mendiami wilayah yang sama, namun identitas komunitas X terkikis oleh transmisi kultural dan linguistik dari komunitas Y yang mendiami wilayah sekitarnya (contoh, ketakutan etnis Quebec akan kultur Kanada yang memakai Bahasa Inggris (*Anglophone*))<sup>220</sup>.
- Persaingan vertikal. Ancaman sosial pada isyu ketiga ini, sebagian besar, terjadi karena dipicu oleh proyek integrasi kultural atau gerakan seksionis. Komunitas X akan kehilangan identitasnya karena di-subordinasi-kan kepada identitas kultural komunitas Y (contoh, integrasi identitas Yugoslavia ke dalam komunitas Eropa pasca-bergabungnya Yugoslavia ke dalam Uni Eropa), atau, komunitas X akan kehilangan identitasnya karena adanya perpecahan internal yang membuat sebagian dari mereka mengidentifikasi diri sebagai komunitas Z, dan sebagian lainnya mengidentifikasi diri sebagai

---

<sup>218</sup> *Ibid.*

<sup>219</sup> *Ibid.*

<sup>220</sup> *Ibid.*

komunitas A (contoh, perpecahan etnis Quebec, Catalonia, maupun Kurdistan). Penting untuk dicatat, bahwa persaingan vertikal dapat menarik identitas kolektif tertentu untuk melebur ke dalam komunitas yang lebih besar (dengan identitas yang lebih luas) ataupun ke dalam komunitas yang lebih kecil (dengan identitas yang lebih sempit)<sup>221</sup>.

- De-populasi. Ancaman keempat muncul ketika unit pembawa kultur komunitas dan pewaris identitas kolektif mengalami pemusnahan secara fisik. Baik melalui perang, kelaparan, bencana alam, maupun kebijakan pemusnahan etnis<sup>222</sup>.

Dari eksplanasi di atas, dapat diketahui bahwa solusi-konservatif agenda keamanan sosial terletak pada peran negara sebagai sumber stabilitas keamanan sosial, serta korelasi antara sektor keamanan sosial dengan sektor keamanan militer dan politik. Sementara itu, di lain pihak, titik solusi-rekonstruktif agenda keamanan sosial terletak pada, ancaman internal sebagai ancaman utama; kelompok-kelompok *sub-state* sebagai objek rujukan dan aktor sekuritisasi utama; media sebagai aktor fungsional; dan, pentingnya dimensi 'identitas' di dalamnya.

### 3.1.5. Sektor Keamanan Lingkungan

Terdapat setidaknya tiga karakteristik khusus yang menyebabkan agenda keamanan lingkungan sulit untuk dipolitisasi. Pertama, ancaman lingkungan merupakan ancaman yang bersifat acak dan lebih dipandang sebagai bagian dari kondisi alamiah kehidupan<sup>223</sup>. Sampai saat ini hanya terdapat sedikit kesepakatan

---

<sup>221</sup> *Ibid.*

<sup>222</sup> *Ibid.*

<sup>223</sup> Barry Buzan, *op. cit.*, hal. 131

dalam penentuan jenis disrupsi lingkungan dan kadar keterlibatan tindakan manusia di dalamnya.

Sebagai contoh, dalam fenomena Gempa Bumi sebagian pendapat akan memandangnya sebagai implikasi pergeseran Lempeng Benua yang terletak di dasar laut, namun selalu terdapat kemungkinan bahwa pergeseran tersebut dipicu oleh kekuatan ledakan Uji Coba Nuklir bawah laut yang dilakukan oleh manusia. Dua skenario berbeda itu akan membawa pembentukan diskursus keamanan yang berbeda pula. Jika sebuah bencana muncul sebagai fenomena alam, maka tindakan maksimal yang dapat dilakukan adalah upaya prediktif dan skenario penanganan dampak bencana (*disaster management*). Akan tetapi, jika terdapat keterlibatan manusia di dalamnya, maka terdapat upaya pencegahan yang bisa dilakukan, sehingga bencana itu tidak harus terjadi.

Kedua, ancaman lingkungan merupakan ancaman akumulatif, yaitu rentetan akhir dari disrupsi-disrupsi lokal yang membawa implikasi global<sup>224</sup>. Fenomena seperti Perubahan Iklim (*climate change*), naiknya garis permukaan laut (*sea-level rise*), peningkatan suhu bumi (*global warming*), dan berlubangnya lapisan Ozon (*depletion of Ozone-layer*) merupakan fenomena yang implikasinya dapat dirasakan di seluruh penjuru Bumi, walaupun dengan intensitas yang berbeda-beda - kekhawatiran akan naiknya garis permukaan laut tentunya akan terasa lebih mengancam penduduk negara-negara AOSIS (*Association of Small Island States*), seperti Fiji dan Vanuatu, daripada penduduk Amerika Serikat. Namun, tidak seluruh penduduk Bumi menyumbangkan Emisi Karbon (sebagai salah satu pemicu terjadinya Pemanasan Global) dalam jumlah yang sama. Konsumsi bahan bakar warga negara Amerika Serikat dapat dipastikan lebih tinggi daripada konsumsi bahan bakar warga negara Angola.

---

<sup>224</sup> Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde, *op. cit.*, hh. 83-84

Karakteristik ketiga, muncul sebagai implikasi dari kompleksitas poin pertama dan kedua. Yaitu, konstelasi unit analisa keamanan yang sangat beragam dalam agenda keamanan lingkungan. Pada prinsipnya, ancaman lingkungan merupakan konsekuensi dari perkembangan tahap kehidupan dan peradaban manusia yang dikarakterisasikan oleh perkembangan teknologi dan pencapaian target ekonomi, di mana keduanya bersifat kontradiktif dengan keberlangsungan dan keseimbangan Biosfer. Dengan kata lain, keseimbangan Biosfer akan terjaga – atau paling tidak, bertahan dalam waktu yang lebih lama – ketika manusia memperlambat laju perkembangan peradabannya – atau menghentikannya sama sekali, dan hidup dengan bergantung kepada alam<sup>225</sup>.

Sisi eksploitatif dari perkembangan kehidupan manusia terhadap alam memang tak dapat dihentikan. Bahkan, ketika perkembangan teknologi dan ekonomi tetap berada pada titik kecepatan yang sama seperti saat ini, perkembangan populasi manusia masih menyisakan satu faktor pemicu degradasi lingkungan<sup>226</sup>. Beragamnya kepentingan unit keamanan (negara, perusahaan, organisasi internasional, komunitas lokal, dll) terhadap alam, membuat konstelasi politik lingkungan (*environmental politics*) sulit untuk dipahami<sup>227</sup>.

Unit analisa keamanan dalam isu lingkungan masih terdiri dari tiga aktor utama, yaitu objek rujukan, aktor pen-sekuritisasi / de-sekuritisasi, dan aktor fungsional. Perbedaannya adalah, jalinan yang terbentuk dari ketiga aktor utama tersebut bersifat strategis dan kasuistik – tergantung kepada isu yang sedang diperdebatkan, sehingga tidak ada aktor yang sepenuhnya dapat disebut sebagai aktor pen-sekuritisasi / de-sekuritisasi, dan seterusnya<sup>228</sup>.

---

<sup>225</sup> *Ibid.*

<sup>226</sup> *Ibid.*

<sup>227</sup> *Ibid.*

<sup>228</sup> Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde, *op. cit.*, hal. 78

Objek rujukan isyu keamanan lingkungan terbagi dalam dua jenis yaitu, alam dan seisinya sebagai objek rujukan, serta peradaban manusia sebagai objek rujukan<sup>229</sup>. Keduanya terlibat dalam perdebatan sengit yang turut menentukan arah kebijakan penyelamatan lingkungan yang akan dihasilkan. Para pendukung objek rujukan pertama, mengajukan argumentasi bahwasanya manusia harus mulai menyadari dominasi dan hegemoninya terhadap alam, dan merubah pola hidup yang eksploitatif secara keseluruhan. Dengan kata lain, kelompok pendukung objek rujukan pertama memandang anomali alam dan fenomena bencana sebagai akumulasi ketidakadilan sikap manusia terhadap alam. Manusia tidak akan mampu bertahan hidup dan membangun peradabannya tanpa kompromi dari alam, sehingga dengan demikian, apabila peradaban manusia telah mencapai puncak eksploitasi alam yang tak dapat ditolerir, manusia harus menghentikan laju peradabannya demi mengembalikan keseimbangan alam<sup>230</sup>.

Sementara itu, objek rujukan kedua dilandaskan pada prinsip manusia sebagai makhluk yang memiliki kapabilitas untuk mengelola alam. Dengan demikian, sisi eksploitatif kehidupan manusia terhadap alam memang harus dikurangi tanpa menghentikan laju peradaban yang telah berjalan sekian lama. Manusia tidak perlu kembali pada pola kehidupan pra-sejarah hanya demi menyelamatkan kelestarian alam, karena dengan daya pikirnya manusia mampu menciptakan teknologi yang mampu mempermudah kehidupannya sekaligus ramah terhadap lingkungan<sup>231</sup>. Selain itu, karena alam memang diciptakan untuk sebesar-besar kemaslahatan umat manusia, maka wajar jika manusia menggunakan sumber daya yang dikandungnya (alam) demi mempertahankan kehidupan mereka.

Objek rujukan pertama umumnya disuarakan oleh kelompok pecinta lingkungan sebagai aktor pen-sekuritisasi utama (*lead actors*) isyu keamanan

---

<sup>229</sup> *Ibid.*

<sup>230</sup> *Ibid.*

<sup>231</sup> *Ibid*

lingkungan<sup>232</sup>. Sementara itu, objek rujukan kedua umumnya disuarakan oleh negara, perusahaan / koalisi perusahaan yang menerapkan kebijakan industri ramah lingkungan, dan lembaga-lembaga internasional yang memiliki kepedulian khusus terhadap pelestarian alam<sup>233</sup>.

Isyu keamanan lingkungan yang tercakup dalam objek rujukan pertama bersifat lebih beragam dan komprehensif jika dibandingkan dengan isyu serupa yang terkandung dalam objek rujukan kedua. Kepedulian terhadap Keanekaragaman Hayati (*crisis of biodiversity*) dan pelestarian hewan langka (*endangered species*) tercakup dalam objek rujukan pertama. Di sisi lain, objek rujukan kedua lebih mengkhawatirkan sisi-sisi disrupsi lingkungan yang berimplikasi secara langsung terhadap kehidupan manusia sehari-hari, seperti krisis energi (*energy crisis*), Pemanasan Global (*global warming*), dan perubahan iklim global (*global climate change*)<sup>234</sup>.

Buzan mengkompilasikan isyu-isyu keamanan lingkungan dalam 6 tema besar, di mana masing-masing tema membawahi beberapa isyu spesifik. Penting untuk diingat bahwa ke-enam tema besar isyu keamanan lingkungan di bawah ini banyak bersinggungan dengan wilayah sektor keamanan lainnya. Hal yang membedakannya hanyalah perspektif keamanan lingkungan (kaitan antara aktifitas kehidupan manusia secara keseluruhan dengan keseimbangan Biosfer) yang digunakan sebagai titik pijakan analisa isyu-isyu tersebut<sup>235</sup>. Ke-enam tema besar isyu keamanan lingkungan tersebut adalah sebagaimana berikut:

---

<sup>232</sup> Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde, *op. cit.*, hal. 77

<sup>233</sup> *Ibid.*

<sup>234</sup> *Ibid.*

<sup>235</sup> *Ibid.*

- Disrupsi Ekosistem. Meliputi isyu perubahan iklim; punahnya keanekaragaman hayati; Deforestasi; Penggurunan, dan bentuk erosi lainnya; rusaknya lapisan Ozon; dan berbagai polusi<sup>236</sup>.
- Energi. Meliputi isyu penipisan kuantitas SDA; polusi dari konsumsi bahan bakar; manajemen bencana, yang terkait dengan pemberdayaan energi (sampah Radioaktif, kebocoran tangki minyak Kapal Tanker, limbah industri kimia, dll); krisis energi; dan kesenjangan distribusi bahan bakar<sup>237</sup>.
- Populasi. Meliputi isyu pertumbuhan populasi dan tingkat konsumsi yang melebihi kapasitas Bumi; Epidemik dan rendahnya kualitas kesehatan; masalah Buta Huruf; Migrasi yang tidak terkontrol; dan Urbanisasi yang tidak terkelola<sup>238</sup>.
- Pangan. Meliputi isyu kemiskinan; kelaparan; Overkonsumsi; penyakit yang mengiringi kelaparan dan overkonsumsi; berkurangnya lahan subur; berkurangnya sumber air bersih; kualitas kesehatan yang rendah; Epidemik; dan kesenjangan distribusi pendapatan<sup>239</sup>.
- Ekonomi. Meliputi isyu keberlanjutan pola produksi yang destruktif; Instabilitas sosial sebagai eksekutif pertumbuhan ekonomi; dan Kesenjangan struktural<sup>240</sup>.
- Konflik Sipil. Meliputi isyu perang dan konflik yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan<sup>241</sup>.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, aktor pen-sekuritisasi / de-sekuritisasi dalam sektor keamanan lingkungan bersifat kasuistik dan strategis.

---

<sup>236</sup> *Ibid.*

<sup>237</sup> *Ibid.*

<sup>238</sup> Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde, *op. cit.*, hal. 75

<sup>239</sup> *Ibid.*

<sup>240</sup> *Ibid.*

<sup>241</sup> *Ibid.*

Negara-negara Skandinavia akan berperan sebagai aktor pen-sekritisasi (*lead actors*) dalam isyu Hujan Asam (*acid rains*), namun menjadi aktor de-sekritisasi (*veto actors*) dalam isyu pelestarian hewan langka (*endangered species*) karena terdapat tradisi berburu Singa Laut (*Seal hunt*) tahunan yang tak dapat mereka tinggalkan. Hal serupa berlaku bagi Jepang yang melakukan aksi sekritisasi dalam isyu Pemanasan Global, polusi sampah Radioaktif dan limbah kimia (terkait dengan trauma Tragedi Minamata), namun berperan sebagai aktor veto dalam isyu perburuan Paus (*Whaling*).

Lebih lanjut, observasi terhadap degradasi lingkungan merupakan upaya yang sulit untuk dilakukan. Mengingat tindakan itu membutuhkan media berteknologi tinggi serta sumber daya manusia yang memiliki keahlian spesifik. Negara yang dapat melakukan upaya pelacakan pun dapat dihitung dengan jari, sehingga sebagian besar negara masih tidak dapat menemukan logika praksis bagi agenda keamanan lingkungan di dalam kerangka keamanan nasional<sup>242</sup>.

Peletakan agenda keamanan lingkungan dalam pendekatan keamanan kolektif (*collective security*) sepertinya memiliki prospek yang cerah, namun bukan tanpa masalah<sup>243</sup>. Perdebatan tentang siapa yang menjadi penyebab krisis lingkungan dan siapa yang menjadi korbannya, masih terus berlangsung. Negara mana sajakah yang menjadi penyumbang Emisi Karbon terbesar dan negara mana yang akhirnya berkewajiban untuk menyerap Emisi Karbon tersebut; siapa yang dirugikan dengan fenomena mencairnya lapisan Es Kutub, dan siapa pula yang diuntungkan; serta pihak-pihak manakah yang seharusnya memiliki kewajiban untuk memperlambat laju industrialisasi di negaranya; kesemuanya masih menjadi isyu strategis yang memantik negosiasi sengit dalam forum-forum internasional.

---

<sup>242</sup> Barry Buzan, *op. cit.*, hal. 132

<sup>243</sup> Barry Buzan, *op. cit.*, hal. 133.



Bagi Buzan, hal itu mencerminkan satu kesimpulan. Yaitu bahwasanya kalkulasi untung-rugi masih menjadi pertimbangan utama dalam penentuan respon negara terhadap ancaman lingkungan. Pembentukan identitas kolektif di kalangan negara-negara masih nihil adanya<sup>244</sup>.

Poin-poin solusi-rekonstruktif yang dihadirkan oleh agenda keamanan lingkungan, diantaranya :

- Ancaman yang bersifat acak dan akumulatif
- Keberagaman unit-unit keamanan
- 'Alam' dan 'peradaban' manusia yang dihadirkan sebagai objek rujukan

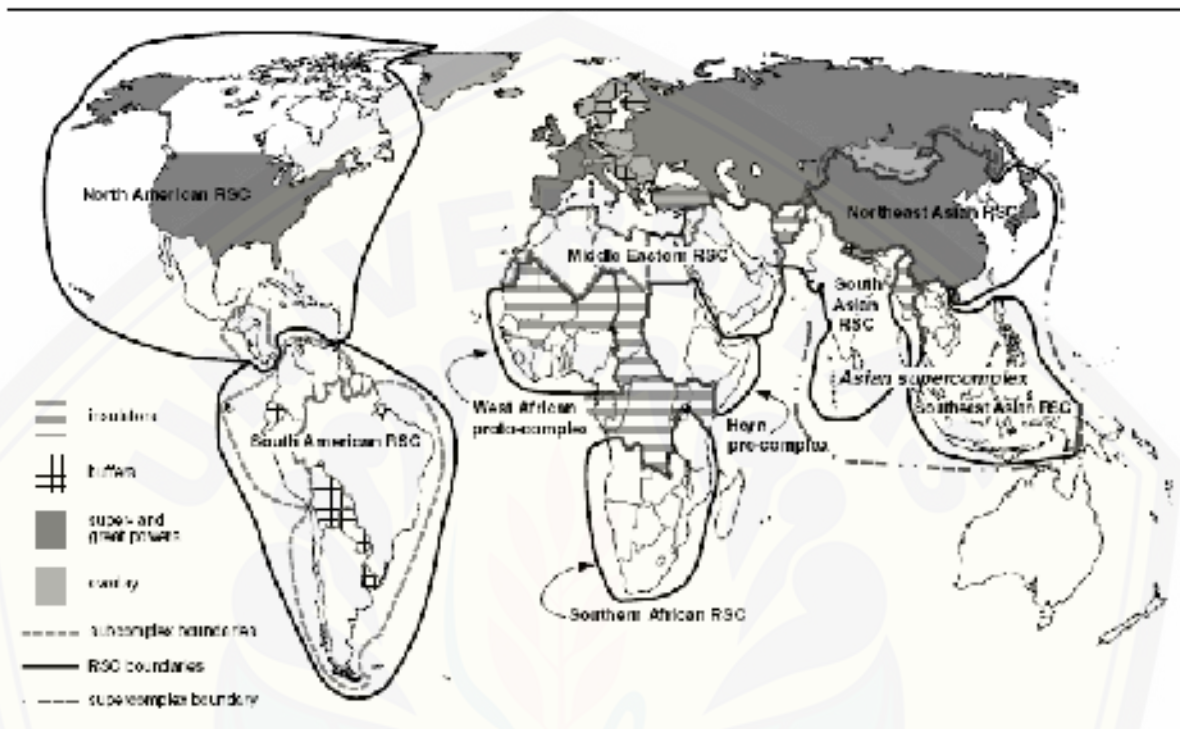
Sementara itu, poin-poin solusi-konservatif yang terkandung dalam sektor keamanan sosial adalah, kalkulasi strategis kepentingan nasional negara-negara yang turut menentukan dinamika diskursus keamanan lingkungan.

---

<sup>244</sup> *Ibid.*

**POLA PEMBAGIAN KAWASAN KEAMANAN MASA PERANG DINGIN**

(Gambar. 3c)



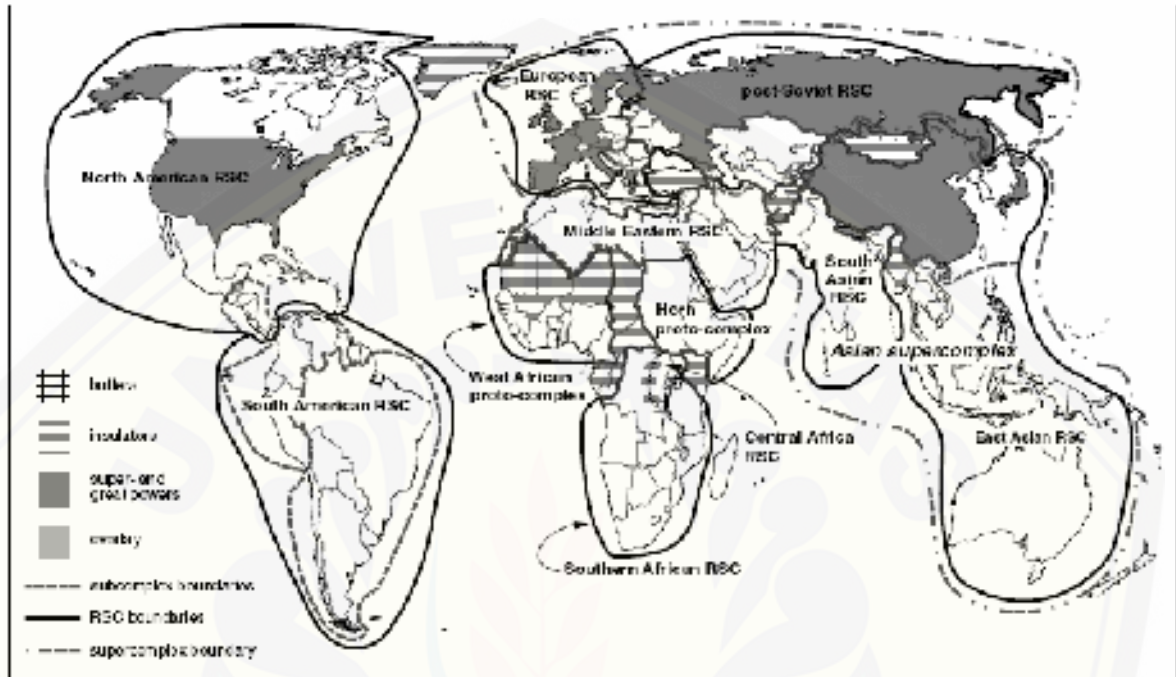
Disadur Dari: Regions and Powers: The Structure of International Security, Barry Buzan dan Ole Waever, Cambridge University Press, 2003.

Keterangan :

- ≡ = Kawasan Insulator
- | = Kawasan Penyokong (Buffer)
- = Kawasan negara-negara kuat (Great Powers)
- = Wilayah Overlay
- = Perbatasan Sub-Komplek
- = Perbatasan Komplek Keamanan Regional
- · · · · = Perbatasan Super-Komplek

**POLA PEMBAGIAN KAWASAN KEAMANAN PASCA-PERANG DINGIN**

Gambar. 3d



Disadur Dari: Regions and Powers: The Structure of International Security, Barry Buzan dan Ole Waever, Cambridge University Press, 2003.

Keterangan :

- ≡ = Kawasan Insulator
- | = Kawasan Penyokong (Buffer)
- = Kawasan negara-negara kuat (Great Powers)
- = Wilayah Overlay
- = Perbatasan Sub-Komplek
- = Perbatasan Komplek Keamanan Regional
- - - - = Perbatasan Super-Komplek

### 3. 2 Pembentukan Keamanan Regional Sebagai Dimensi Legitimasi

Pendekatan sektoral terhadap isu-isu keamanan non-tradisional telah berhasil menyajikan sebuah pemetaan lengkap mengenai tipologi ancaman non-tradisional yang kembali muncul ke permukaan menyusul penurunan relevansi keamanan militeristik ala Perang Dingin. Lebih jauh, pendekatan sektoral memungkinkan para penstudi keamanan untuk menapaki wilayah kajian non-tradisional tanpa harus kehilangan aspek sistematika analitis dan parsimoni teoritis.

Akan tetapi, kompleksitas problematika keamanan pasca-Perang Dingin tak hanya ditemui dalam jalinan isu keamanan non-tradisional. Berakhirnya periode bipolar yang menjadi karakteristik dominan hubungan internasional masa Perang Dingin menuntut kehadiran kerangka eksplanasi baru bagi sistem internasional pasca-Perang Dingin yang masih bersifat tidak menentu<sup>245</sup>.

Beberapa penstudi Hubungan Internasional menempelkan 'label' unipolar kepada struktur *power* internasional pasca-Perang Dingin. Mereka berangkat dari asumsi yang meyakini bahwa setelah Uni Soviet mengalami keruntuhan, Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara *superpower* yang mendominasi konteks hubungan internasional dalam segala dimensinya (militer, politik, ekonomi, bahkan kultural).

Sementara itu, sebagian penstudi lainnya menyebut struktur multipolar sebagai karakteristik sistem internasional pasca-Perang Dingin. Mereka mengajukan tesis *Hegemonic Decline* sebagai klaim penolakan terhadap tesis Unipolaritas Amerika Serikat, dan berpendapat bahwa Amerika Serikat kini tidak sendiri. Beberapa negara muncul sebagai pesaing baru bagi Amerika Serikat, sebut saja

---

<sup>245</sup> Barry Buzan dan Ole Waever, *op. cit.*, hal. 3

Bandingkan pola kawasan keamanan pada masa Perang Dingin (Peta. 1) dengan pola kawasan keamanan pasca-Perang Dingin (Peta. 2).

Jepang, Cina, dan India, belum lagi jika ditambah dengan Uni Eropa yang semakin kokoh membayangi langkah Amerika Serikat dalam aspek pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, para penstudi yang meyakini arus pemikiran globalisasi berpendapat bahwa tata internasional pasca-Perang Dingin tidak dapat digolongkan ke dalam struktur unipolar maupun multipolar. Sebaliknya, karakteristik tata internasional telah berkembang sedemikian jauh dan keluar dari pola-pola struktural apapun. Tidak ada kategori lain yang sesuai dengan tata internasional baru, selain kategori 'ketidakberaturan' (*new world disorder*).

*Copenhagen school* menawarkan opsi yang sama sekali berbeda dengan ketiga jalur pemikiran di atas<sup>246</sup>. Barry Buzan dan penstudi *Copenhagen school* lainnya berpendapat bahwa struktur *power* internasional pasca-Perang Dingin hanya dapat dijelaskan melalui eksplanasi yang bertumpu pada level analisa regional<sup>247</sup>. Eksplanasi level analisa regional berakar pada klaim yang menyebutkan bahwa dinamika keamanan regional mulai mendapatkan otonominya setelah era Kolonisasi berakhir, dan otonomi tersebut semakin diperkuat dengan berakhirnya Perang Dingin yang telah berperan sebagai perangkap virtual bagi dinamika keamanan regional selama beberapa dekade<sup>248</sup>.

Tanpa adanya persaingan ketat yang berlangsung di antara dua negara *superpower*, dinamika keamanan lokal di berbagai kawasan mendapatkan kebebasan penuh untuk bergerak. Fenomena tersebut didukung dengan adanya keengganan negara-negara *major power* untuk melakukan intervensi terhadap konteks keamanan kawasan di luar wilayah mereka sendiri<sup>249</sup>.

Pada gilirannya, kombinasi kedua fenomena tersebut membuka ruang-ruang manuver baru bagi negara-negara inti kawasan dalam menentukan fluktuasi hubungan

---

<sup>246</sup> *Ibid.*

<sup>247</sup> *Ibid.*

Bandingkan pola Peta. 1 dan Peta. 2.

<sup>248</sup> *Ibid.*

<sup>249</sup> *Ibid.*

antar-negara di tataran sub-sistem. Inilah gambaran struktur sistem internasional pasca-Perang Dingin yang diyakini oleh para penstudi keamanan *Copenhagen school*. Selanjutnya, gambaran tersebut mereka tuangkan dalam bentuk kompleks keamanan (*security complex*) yang menjadi kerangka analisa empiris bagi teori perluasan agenda keamanan.

Dalam konteks kajian keamanan, melalui kompleks keamanan, Buzan dan kawan-kawan secara gamblang ingin menitikberatkan peran level analisa regional yang sebelumnya seringkali termarjinalkan<sup>250</sup>. Ia menegaskan hal itu dengan menyatakan bahwa porsi minimal yang selama ini ditujukan kepada level analisa regional menjadi akar permasalahan terbesar dalam berbagai perspektif studi keamanan, sehingga kemudian muncullah pendekatan-pendekatan dengan lingkup eksplanasi yang masif dan terkesan utopis – seperti pendekatan *global security*<sup>251</sup> –, maupun pendekatan yang memiliki lingkup eksplanasi sangat spesifik dengan implikasi yang tak terbatas – seperti pendekatan *human security*<sup>252</sup>.

Di sisi lain, dengan teori yang sama, Buzan dan kawan-kawan mengajak pembaca-nya untuk memahami fluktuasi upaya sekuritisasi dalam tiap-tiap sektor keamanan yang berbeda. Upaya sekuritisasi tersebut dapat mengalami eskalasi pada level analisa yang lebih tinggi, dengan cakupan kompleks keamanan yang lebih besar daripada sumber isyu itu sendiri (*globalizing dynamics*) – seperti umumnya isyu-isyu sektor keamanan lingkungan – atau, di sisi lain, mengalami penyempitan level analisa (*localizing dynamics*), dengan skala kompleks keamanan yang lebih terbatas daripada sumber isyu keamanannya<sup>253</sup>.

Pada prinsipnya, kompleks keamanan akan membingkai dinamika diskursus ancaman yang berfluktuasi di antara tiga level analisa, yakni level analisa lokal

---

<sup>250</sup> Barry Buzan, *op. cit.*, hal. 186.

<sup>251</sup> Barry Buzan dan Ole Waever, *op. cit.*, hal. 43

<sup>252</sup> *Ibid.*

<sup>253</sup> *Ibid.*

(negara atau unit), regional, serta level analisa global. Akan tetapi, fluktuasi dalam analisa terhadap dinamika keamanan tersebut tetap berpegang kepada level analisa regional sebagai sumbu utamanya, sehingga fluktuasi tersebut akan bergerak di antara sumbu dinamika lokal-dinamika regional-dinamika global (*localizing dynamics-regionalizing dynamics-globalizing dynamics*)<sup>254</sup>.

Secara umum, kompleks keamanan dapat diterapkan kepada sektor-sektor keamanan tradisional (sektor keamanan militer dan politik) maupun kepada sektor-sektor keamanan non-tradisional (sektor keamanan ekonomi, sosial, dan lingkungan)<sup>255</sup>. Hal ini mengindikasikan bahwa bentuk kompleks keamanan, yang dilandaskan kepada level analisa regional, juga dapat ditemui dalam dimensi non-tradisional yang hanya memiliki sedikit komponen geografis (seperti sektor keamanan lingkungan) atau bahkan yang tidak memiliki komponen geografis (seperti sektor keamanan ekonomi)<sup>256</sup>.

Untuk mencakup kedua dimensi yang berbeda tersebut (dimensi tradisional dan non-tradisional), terdapat dua definisi 'kompleks keamanan' yang berbeda pula. Dalam konteks keamanan tradisional, 'kompleks keamanan' didefinisikan sebagai,

*"Sekelompok negara yang memiliki persepsi keamanan yang bersifat mutual dan interdependen, sehingga konteks keamanan nasional sebuah negara tidak dapat dipisahkan dari konteks keamanan nasional negara-negara lainnya"*<sup>257</sup>.

Sedangkan dalam konteks keamanan non-tradisional, 'kompleks keamanan' memiliki pengertian sebagaimana berikut,

*"Sekelompok unit yang melakukan sekuritisasi atau de-sekuritisasi berdasarkan klaim yang mutual dan interdependen, sehingga problematika*

---

<sup>254</sup> *Ibid.*

<sup>255</sup> *Ibid.*

<sup>256</sup> *Ibid.*

<sup>257</sup> Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde, *op. cit.*, hal. 198

*keamanan sebuah unit tidak dapat dipisahkan dari problematika keamanan unit lainnya”<sup>258</sup>.*

Selanjutnya, dalam konteks keamanan tradisional, eksistensi sebuah kompleks keamanan ditandai dengan adanya intensitas interdependensi keamanan yang lebih tinggi di antara negara-negara anggota kompleks keamanan, relatif terhadap negara-negara di luar kompleks tersebut<sup>259</sup>. Lebih jauh, sebuah kompleks keamanan tradisional dicirikan dengan karakteristik sebagaimana berikut:

- Sebuah kompleks keamanan terdiri dari dua atau lebih negara
- Negara-negara yang tergabung di dalam sebuah kompleks keamanan harus memiliki koherensi wilayah geografis (*geographical proximity*) (prasyarat ini muncul dari karakteristik ancaman yang memiliki kemungkinan lebih besar untuk datang dari negara yang terdekat).
- Relasi yang terjalin di antara negara-negara anggota sebuah kompleks keamanan harus mencerminkan adanya ketergantungan konteks keamanan yang signifikan (ketergantungan keamanan tersebut dapat bersifat positif ataupun negatif).
- Pola ketergantungan konteks keamanan di antara negara-negara anggota kompleks keamanan harus bersifat tahan lama dan terjalin secara mendalam, walaupun terdapat kemungkinan untuk tidak bersifat permanen<sup>260</sup>.

Penting untuk dicatat bahwa frekuensi interdependensi keamanan antar-negara akan semakin melemah pada titik perbatasan yang menjadi garis pemisah di antara kedua belah pihak kompleks keamanan tradisional. Tingkat keacuhan (*boundaries of*

---

<sup>258</sup> *Ibid.*

<sup>259</sup> *Ibid.*

<sup>260</sup> *Ibid.*



*indifference*) relasional menjadi parameter utama yang menentukan letak garis batas antar-komplek keamanan<sup>261</sup>.

Umumnya, negara-negara yang terletak di sepanjang garis batas tersebut merupakan negara yang dengan sadar memilih posisi netral ataupun memilih untuk melaksanakan kebijakan pasifis, dan sebagian kecil lainnya merupakan negara-negara yang – dapat dikatakan - tidak memiliki kapabilitas proyeksi *power* eksternal (semisal Laos dan Myanmar) karena sumber daya nasional yang dimiliki sangat terbatas dan habis dipergunakan pada level domestik<sup>262</sup>.

Di sisi lain, Buzan juga menuliskan bahwa kompleks keamanan tradisional bukanlah sebuah pola abadi yang memiliki kemungkinan sangat kecil untuk berubah. Karena kompleks keamanan tradisional sejatinya merupakan sintesa dari mekanisme aksi-reaksi antar negara, di mana perubahan merupakan sesuatu yang wajar untuk terjadi<sup>263</sup>.

Buzan menyebut mekanisme aksi-reaksi yang terus-menerus terulang tersebut sebagai proses pembentukan (*process formations*)<sup>264</sup>. Terkait dengan hal itu, Buzan menetapkan parameter yang dapat digunakan untuk menganalisa perubahan yang terjadi pada sebuah kompleks keamanan tradisional, yakni parameter yang ia sebut sebagai struktur esensial (*essential structure*)<sup>265</sup>.

Sebuah pergerakan dapat dikatakan signifikan bagi tatanan kompleks keamanan tradisional, jika pergerakan itu melibatkan salah satu atau seluruh komponen struktur esensial, yang terdiri dari pola permusuhan-perkawanan antar negara (*patterns of amity-enmity*) dan pola distribusi kekuatan (*distribution of power*) antar negara inti (*core states*)<sup>266</sup>. Sebagai contoh, fitur kompleks keamanan Timur

---

<sup>261</sup> Barry Buzan dan Ole Waever, *op. cit.*, hh. 48-49

<sup>262</sup> *Ibid.*

<sup>263</sup> *Ibid.*

<sup>264</sup> Barry Buzan, *op. cit.*, hal. 209.

<sup>265</sup> Barry Buzan dan Ole Waever, *op. cit.*, hal. 53

<sup>266</sup> Barry Buzan, *op. cit.*, hal. 211

Tengah akan mengalami perubahan jika terdapat pola pergerakan yang dramatis pada relasi segitiga negara-negara inti di dalamnya, yaitu Israel-Mesir-Suriah.

Selain disebabkan oleh faktor perubahan peta persekutuan (*alignment shift*), pergeseran distribusi power (*power shifts*) dalam kompleks keamanan tradisional juga dapat dipicu oleh perbedaan percepatan pertumbuhan yang terjadi di kalangan negara-negara anggota<sup>267</sup>. Dan dengan frekuensi kejadian yang sangat rendah, *power shifts* juga dapat diwujudkan melalui perubahan pola alokasi sumber daya (*allocation of resources*) yang dilakukan oleh beberapa negara dalam kompleks keamanan tersebut<sup>268</sup>.

Selanjutnya, penstudi juga dapat menemukan dua kategori kompleks keamanan tradisional yang disusun berdasarkan homogenitas power negara-negara anggotanya. Buzan menyematkan kategori *higher-level complexes* bagi kompleks keamanan tradisional yang terdiri dari negara-negara besar (*major power states*), sedangkan istilah *lower-level complexes* digunakan untuk menyebut kompleks keamanan tradisional yang terdiri dari negara-negara berkekuatan lemah dan menengah<sup>269</sup>.

Kategorisasi ini menjadi penting karena adanya perbedaan implikasi proyeksi kekuatan yang mungkin untuk dilancarkan oleh *higher-level* maupun *lower-level complexes* terhadap sistem internasional maupun kepada kompleks keamanan tradisional lainnya<sup>270</sup>. Buzan menuliskan konteks *Overlay* sebagai sebuah kondisi yang mana di dalamnya kita dapat menemukan contoh konkrit pengaruh kuat aktor eksternal (berupa *major power states* ataupun *higher-level complexes*) terhadap dinamika keamanan kompleks lainnya.

Sedemikian kuatnya pengaruh aktor eksternal itu, sehingga kita tidak akan mampu lagi melihat gambaran dinamika keamanan yang otentik (dinamika keamanan

---

<sup>267</sup> *Ibid.*

<sup>268</sup> *Ibid.*

<sup>269</sup> Barry Buzan, *op. cit.*, hal. 195

<sup>270</sup> *Ibid.*

orisinil yang diproyeksikan oleh kompleks keamanan sebelum *Overlay* terjadi)<sup>271</sup>. Apa yang terlihat selama *Overlay* berlangsung, merupakan dinamika keamanan yang sepenuhnya dilancarkan oleh aktor eksternal (terhadap kompleks keamanan yang menjadi objek *Overlay*) dan – hanya kembali – diproyeksikan (dipantulkan) oleh kompleks keamanan terkait. Kita juga tidak dapat memprediksikan fitur keamanan seperti apa yang akan terlihat pada kompleks keamanan tersebut setelah aktor eksternal mengakhiri peranannya dan periode *Overlay* berakhir<sup>272</sup>.

Dalam dimensi keamanan non-tradisional, salah satu fitur yang membedakan kompleks keamanan tradisional dengan kompleks keamanan non-tradisional adalah, kemungkinan pola pembentukan kompleks keamanan yang bersifat *top-down*<sup>273</sup>. Kompleks keamanan non-tradisional dapat dibentuk oleh adanya ancaman sistemik (seperti, Pemanasan Global dan krisis finansial) yang mampu membangkitkan kesetaraan kepentingan (*common interest*) di kalangan unit-unit<sup>274</sup>.

Hal ini berbeda dengan kompleks keamanan tradisional yang umumnya terbentuk secara *bottom-up*, yaitu melalui interaksi antar-negara yang dipicu oleh proksimitas geografis sehingga muncullah identifikasi konteks keamanan nasional sebuah negara dengan negara lain yang berada di sekitarnya<sup>275</sup>. Dengan demikian, kompleks keamanan non-tradisional dapat terbentuk tanpa adanya koherensi geografis apapun, dan Buzan menyebut kompleks keamanan non-geografis ini sebagai subsistem non-regional (*non-regional subsystem*)<sup>276</sup>.

Fitur kedua yang membedakan bentuk kompleks keamanan non-tradisional dengan kompleks keamanan tradisional adalah tahapan intensitas kerjasama di antara unit-unit penyusunnya yang dapat langsung menuju fase komunitas keamanan

---

<sup>271</sup> Barry Buzan dan Ole Waever, *op. cit.*, hal. 61

<sup>272</sup> Barry Buzan, *op. cit.*, hal. 198

<sup>273</sup> Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde, *op. cit.*, hal. 199

<sup>274</sup> *Ibid.*

<sup>275</sup> Barry Buzan dan Ole Waever, *op. cit.*, hal. 46

<sup>276</sup> Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde, *op. cit.*, hal. 202

pluralistik (*pluralistic security community*)<sup>277</sup>, yang merupakan fase terakhir dalam ‘spektrum pertemanan-pemusuhan’ (*amity-enmity spectrum*) yang diajukan oleh *Copenhagen school*.

Hal ini menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan fase kerjasama dalam kompleks keamanan tradisional, di mana negara-negara – umumnya – akan memulai interaksinya dari fase *conflict formation* – titik ekstrem negatif dalam spektrum – menuju pembentukan rezim keamanan (*security regime*) – titik tengah dalam spektrum – sampai pada tahap komunitas keamanan pluralistik – titik ‘pertemanan’ – atau mengalami stagnasi (tetap pada titik *conflict formation* / rezim keamanan), bahkan kemunduran (kembali pada rezim keamanan / *conflict formation*)<sup>278</sup>.

Ketika kerangka analisa pembentukan keamanan regional ini digabungkan, maka terbentuklah sebuah pemetaan konteks keamanan internasional pasca-Perang Dingin yang tidak hanya cukup ditunjukkan melalui distribusi *power*, melainkan juga pola permusuhan-pertemanan, serta dinamika sekuritisasi lintas-sektoral. Dengan demikian, kita akan mendapatkan gambaran lebih jelas dan mendetil tentang bagaimana *power* tidak hanya menjadi ‘motivator’ utama dalam sektor keamanan militer dan politik, melainkan juga dalam sektor keamanan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

---

<sup>277</sup> *Ibid.*

<sup>278</sup> *Ibid.*